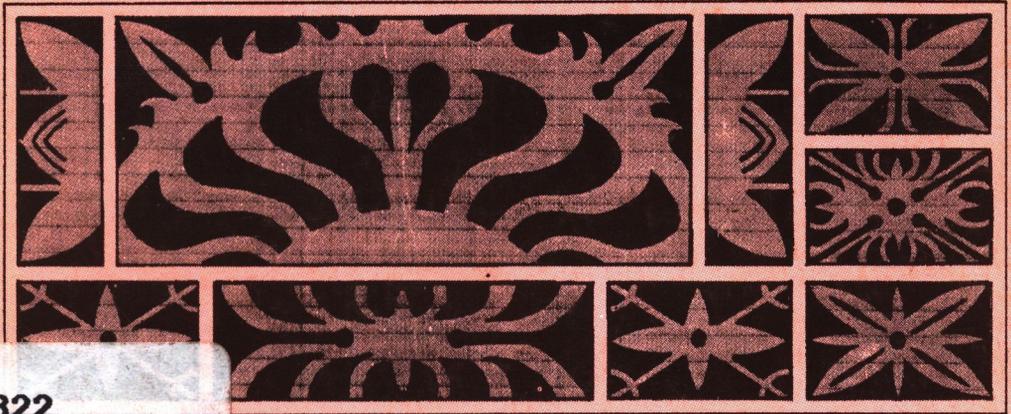




Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI FISIK DAERAH DKI JAKARTA



822
AR
3
NS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI FISIK DAERAH DKI JAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

SEJARAH REVOLUSI FISIK DAERAH DKI JAKARTA

Penulis : G.A Warmansjah, dkk

Penyunting : Sutrisno Kutoyo, dkk

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1978

Edisi I 1978

Diterbitkan ulang oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Edisi II 1997

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta. November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah *Revolusi Fisik Daerah DKI* Jakarta adalah satu di antara hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1980 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang keadaan Jakarta tahun 1942, yaitu zaman pendudukan Jepang sampai kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa tersebut diungkapkan perjuangan fisik masyarakat Jakarta, baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebar luaskan secara instansional.

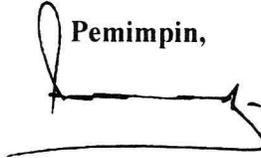
Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, November 1997

**Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat**

Pemimpin,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right, ending in a small flourish.

Soejanto, B.Sc.

NIP. 130 604 670

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Tujuan Penelitian	13
1.2 Masalahan	14
1.3 Ruang Lingkup	14
1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian	15
1.5 Hasil Akhir	16
Bab II Keadaan di Daerah DKI Jakarta pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942--1945)	
2.1 Bidang Pemerintahan	17
2.2 Bidang Sosial Budaya	29
2.3 Bidang Kehidupan Ekonomi	37
2.4 Pengaruh Politik	41
2.5 Kegiatan Masyarakat	44
2.6 Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Organisasi/ Politik/Sosial dan Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional	49
2.6.1 Gerakan Tiga A	49

ix

2.6.2	Gerakan Putra	51
2.6.3	Jawa Hokookai	54
2.6.4	Cuo Sangi In/Syu Sangi Kai	56
2.6.5	Dokuritzu Jumbi Coosakai	59
2.6.6	Gerakan Rakyat Baru dan Angkatan Baru Indonesia ..	61
2.6.7	Keimin Bunka Syidosyo	66
2.6.8	Organisasi Kepemudaan (seinendan, Sinentai, Gakuto-tai)	68
2.6.9	Organisai Kemiliteran/seni Militer (Heiho, PETA, Gyugun Keibodan)	70
2.6.10	Pergerakan Romusya	72
2.6.11	Organisasi Kewanitaan	74
2.6.12	Media Massa	75

Bab III Keadaan di Daerah DKI Jakarta sesudah Proklamasi Kemerdekaan

3.1	Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan ataupun yang merupakan awal dari Proses Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di Jakarta	79
3.1.1	Pengibaran Bendera Sang Merah Putih	79
3.1.2	Berita Proklamasi Kemerdekaan di Daerah Jakarta ..	84
3.1.3	Pembentukan KNI di Daerah Jakarta	87
3.2	Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah DKI	91
3.2.1	Sikap Pasukan Jepang	91
3.2.2	Hambatan-hambatan yang Terjadi di Jakarta	94
3.2.3	Partisipasi Masyarakat Jakarta	97
3.3	Pembentukan Organisasi Kemiliteran (Perjuangan Bersenjata) di daerah DKI Jakarta	99
3.3.1	Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Jakarta	99
3.3.2	Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (BKR Kelaskaran) di Daerah Jakarta	101
3.3.3	Partisipasi Masyarakat Jakarta yang berhubungan dengan Palang Merah dan Dapur Umum	106
3.4	Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara Nica di daerah DKI Jakarta	109
3.4.1	Sikap Masyarakat	109

3.4.2	Akibat-akibatnya	114
Bab IV	Perjuangan di Daerah Jakarta	
4.1	Masa sebelum Aksi Militer Belanda I	117
4.2	Masa Aksi Militer Belanda I di Jakarta	127
4.3	Masa Aksi Militer Belanda II dan Periode Perang Gerilya	132
4.4	Interaksi di Daerah Jakarta dengan berbagai Kejadian bersejarah tingkat nasional	137
4.5	Perjuangan Masyarakat Jakarta selama Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik).....	
Bab V	Keadaan di Daerah Jakarta menjelang akhir revolusi kemerdekaan (Revolusi Fisik)	
5.1	Masa menjelang Persetujuan KMB	145
5.2	Sikap masyarakat terhadap Konperensi antar Indonesia	147
5.3	Sikap masyarakat Jakarta terhadap cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia	150
5.4	Kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan	153
5.5	Pelaksanaan hasil KMB di daerah Jakarta	155
Bab VI	Penutup	159
	Daftar Pustaka	
	Hasil Wawancara/Ceramah.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

Letak kepulauan Indonesia yang berada di persimpangan pelayaran internasional mempunyai arti penting dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan pemerintah kota Jakarta. Sejak pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Balatentara Jepang dan sampai pada pemerintah Republik Indonesia, kota Jakarta dapat memainkan peranannya secara positif, sehingga kota Jakarta dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perancangan politik, pusat perpaduan kebudayaan untuk Indonesia. Dengan demikian pergolakan-pergolakan yang terjadi di kota Jakarta akan berpengaruh dan bergema di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Secara historis pemerintah kota Jakarta dimulai dengan Stad Batavia. Pada tahun-tahun permulaan abad Belanda yang bernama **Vereenigde Oost Indische Compagnie** (VOC) menjalankan usahanya di Indonesia. Tetapi di samping berdagang, persekutuan tersebut juga menduduki dan merampas wilayah-wilayah di kepulauan Indonesia. Dalam tahun 1619 Compagnie Belanda itu membangun **Stad Batavia** (Kota Jakarta yang sekarang) untuk menjadi tempat pusat kedudukannya. Dalam tahun berikutnya terbentuklah alat-alat perlengkapan kota yang menjalankan pemerintahan Stad Batavia di

samping alat-alat pemerintahan pusat **Compagnie** yang mengemudikan pemerintahan atas seluruh wilayah kekuasaan di kepulauan Indonesia atau Nusantara. Pemerintahan **Stad Batavia** berlangsung terus dalam masa Pemerintah Vereenigde Oost Indische Compagnie, kemudian masa-masa peralihan dan masa pendudukan Inggris hingga tahun 1816.

Sejak tahun 1816 mulailah jaman pemerintahan **Nederlandsch Indie** (Hindia Belanda) di Indonesia. Dalam jaman ini pemerintahan kota Jakarta baru di mulai lagi sejak dijalankannya peraturan-peraturan perundangan desentralisasi dalam tahun 1903 yang membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah yang mempunyai keuangan sendiri terlepas dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda, untuk membiayai keperluan-keperluan dan penyelenggaraan urusan-urusan yang dilepaskan dari tanggungan Pemerintah Hindia Belanda itu.

Demikian tanggal 1 April 1905 kota Jakarta dibentuk menjadi Gemeente Batavia yang mempunyai alat perlengkapan kota untuk menjalankan pemerintah daerahnya menurut peraturan perundangan desentralisasi yang mulai dijalankan di Indonesia itu. Dalam tahun 1922 oleh Pemerintahan Hindia Belanda dilakukan pembaharuan pemerintah dan perubahan politik desentralisasi di Indonesia, sesuai dengan itu, maka pada tanggal 1 Oktober 1926 Gemeente Batavia diubah menjadi Stadsgemeente Batavia yang mempunyai alat perlengkapan dan keuangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangga kotanya. Pemerintah kota Jakarta menurut peraturan perundangan desentralisasi yang baru ini berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Hindia Belanda, dalam bulan Maret 1942 karena penyerbuan bala tentara Jepang.

Dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda, mulailah jaman pendudukan Jepang. Pemerintah pendudukan Balatentara Jepang mengeluarkan juga peraturan perundangan desentralisasi menurut sistemnya sendiri. Sejak tanggal 8 Agustus 1942 kota Jakarta ditunjuk sebagai sebuah **Tokubetsu Si** (Stads Gemeente luar biasa). Pemerintah kota Jakarta menurut sistem otonomi Jepang ini berakhir pula dengan berakhirnya pendudukan balatentara Jepang di Indonesia dalam bulan Agustus 1945.

Pada masa Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia terjadi perubahan struktur pemerintahan. Pada tanggal 7 Maret 1942 oleh Pembesar Balatentara Jepang dikeluarkan Undang-undang No. 1 tentang menjalankan pemerintahan balatentara. Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya tetap berlaku. Demikian pula semua hukum dan undang-undang dari pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.

Kemudian dalam bulan Agustus tahun 1942, Panglima Besar Bala Tentara Jepang mengeluarkan Undang-undang 1942 No. 27, tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang tersebut Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut **Syuu**, daerah **Syuu** ini sama dengan daerah **residentie** (keresidenan) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. **Syuu** dibagi dalam **Si** dan **Ken** sama dengan daerah **Si** adalah sama dengan daerah **Stadsgemeente**. Sedang **Ken** sama dengan daerah **regentschap** dahulu. Untuk masing-masing **Si** dan **Ken** diangkat seorang kepala yang disebut **Sityoo** dan **Kentyoo**. Aturan yang dahulu ditetapkan untuk **Stads Algemeente** dan **regentschap**, yaitu **Stadgemeente Ordonnantie** dan **Regentschap Ordonantie** tetap berlaku kecuali apabila diadakan perubahan oleh Pemerintah Balatentara Jepang (Undang-undang 1942 No. 27 Pasal 4).

Suatu perubahan penting yang dilakukan oleh pihak Jepang mengenai pemerintahan **Si** (**Stadsgemeente**) ialah kalau dahulu **stadsgemeente** hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa mengurus urusan pangreh praja (istilah sekarang : pamong praja). Maka menurut Undang-undang tata pemerintahan tersebut di atas ditetapkan bahwa kini **Si** mengerjakan segala pemerintahan di dalam lingkungan daerahnya.

Mengenai **Syuu** (**residentie**), perubahan pokok yang dilakukan terhadap daerah ini ialah kalau dahulu **residentie** hanya merupakan daerah administratif di bawah pimpinan residen yang bertugas membantu Gubernur, maka kini **Syuu** merupakan daerah swatantra yang tingkatannya paling tinggi. Daerah-daerah swatantra tingkat di

bawahnya ialah **Si** (Stadsgemeente) dan **Ken.** (regentschap), sedang propinsi-propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari masa Hindia Belanda dahulu dihapuskan.

Selanjutnya pasal 5 Undang-undang No. 27 tersebut di atas membuka kemungkinan adanya suatu daerah swatantra lain yaitu yang dinamakan Tokubetsu Si. Ini adalah suatu Si yang khusus ditunjuk oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang). Perbedaan antara **Tokubetsu Si** dan **Si** ialah : bahwa **Stadsgemeente luar biasa** itu tidak merupakan daerah swatantra di bawah **Syuu** (residentie), melainkan di bawah Gunseikan yang membentuknya itu Jadi **Tokubetsu Si** mempunyai status kurang lebih sama seperti suatu **Syuu** yang dapat dibentuk sebagai suatu Tokubetsu Si ialah kota yang sangat penting dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Tidak lama kemudian, setelah keluarnya Undang-undang 1942 No. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah itu oleh Panglima Besar Balatentara Jepang ditetapkanlah Undang-undang No. 28 tentang aturan pemerintahan **Syuu** dan aturan pemerintahan **Tokubetsu Si**. Menurut Undang-undang No. 28 antara lain mengatur hal ihwal pemerintah daerah **Tokubetsu Si** itu, ditentukan bahwa nama dan daerah **Tokubetsu Si** ditetapkan oleh Gunseikan. Aparatur pemerintahan **Tokubetsu Si** terdiri atas seorang **Tokubetsu Sityoo**, (Kepala **Tokubetsu Si**) dan beberapa **Zyoyaku** (Wakil Kepala **Tokubetsu Si**) yang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan.

Demikianlah berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang No. 27 dan No. 28 tersebut di atas, maka dengan keputusan Gunseikan tanggal 8 Agustus 1942, Stadsgemeente Batavia Warisan Pemerintah Hindia Belanda ditunjuk sebagai sebuah **Tokubetsu Si**, jumlah **Zyoyaku** ditetapkan sebanyak tiga orang. Luas wilayah **Tokubetsu Si** ini adalah sama seperti wilayah **Stadsgemeente Batavia** dahulu. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang dalam tahun 1945 Jakarta adalah satu-satunya **Tokubetsu Si** di Pulau Jawa.

Untuk Jakarta **Tokubetsu Si** pada tanggal 25 Agustus 1942 telah diangkat seorang Jepang bernama Sakae Tukamoto sedang sebelum adanya Tokubetsu Sityoo Jepang itu, jabatan akting Kepala

Pemerintahan daerah kota Jakarta dipegang oleh seorang Indonesia bernama Bagindo Dahlan Abdullah

Tukamoto hanya menjabat sebagai Kepala **Tokubetsu Si** selama sepuluh bulan, karena mulai tanggal 21 Juni 1943 digantikan oleh K. Yosie, yang kemudian diganti lagi dengan seorang Jepang lain yaitu Hasegawa sampai berakhirnya masa pemerintahan balatentara Jepang di Indonesia.

Untuk melancarkan jalannya pemerintahan, wilayah Jakarta Tokubetsu Si dibagi dalam tujuh bagian yang disebut Siku yaitu : Penjaringan Siku, Mangga Besar Siku, Tanjung Priok Siku, Tanah Abang Siku, Pasar Senen Siku, Gambir Siku dan Jatinegara Siku.

Pada saat-saat Jepang mulai terdesak peperangannya melawan Sekutu, maka untuk menjalankan pemerintahan kota Jakarta juga mengalami kegoncangan, sehingga perhatian Jepang tidak lagi untuk menjalankan pemerintahan, akan tetapi sepenuhnya untuk memperkuat pertahanan perangnya menghadapi Sekutu. Di Jakarta mulai timbul organisasi-organisasi kelaskaran di samping telah ada organisasi setengah militer seperti **Seinendan**, **Keibodan** dan **PETA** bentukan Jepang.

Dalam bidang keamanan timbul kekacauan di mana-mana, dan juga dalam bidang ekonomi sangat menyedihkan. Toko-toko banyak ditutup. Warung menjual makanan tidak laku lagi disebabkan sulitnya keuangan. Penduduk banyak yang kelaparan, sampai timbul wabah, penyakit yang sukar sekali untuk diobati sehingga banyak yang mati karena kekurangan makanan. Sebaliknya di pihak Jepang sibuk mengumpulkan harta kekayaan hasil rampasan dari penduduk, untuk diangkut ke negaranya atau disembunyikan di gua-gua pertahanan Jepang.

Dengan demikian keadaan kota Jakarta makin tidak menentu, terlebih-lebih setelah jatuhnya bom atom berturut-turut di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, yang kemudian diikuti dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

Pada saat Jepang mendekati kehancurannya ini, sebaliknya perjuangan pergerakan rakyat Indonesia mencapai puncaknya. Maka kesempatan yang demikian itu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk memproses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin pergerakan nasional dan para pemuda pada masa itu sangat sibuk di kota Jakarta untuk membicarakan masalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam membicarakan masalah proklamasi ini timbul perbedaan pendapat antara golongan tua, yakni Sukarno - Hatta dan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang termasuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan kaum pemuda, terutama kelompok Sukarni Cs. Perbedaan pendapat ini menimbulkan Peristiwa Rengasdengklok, yang akhirnya timbul kesepakatan bersama bahwa Proklamasi harus dicetuskan di Jakarta.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekembalinya dari Rengasdengklok, tokoh-tokoh pergerakan nasional dan para pemuda mengadakan rapat sampai larut malam di rumah Laksamana Mayeda untuk memproses teks naskah Proklamasi. Rapat baru selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3.00 dini hari, sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Karena dalam rapat tersebut tidak ada seorang Jepang pun yang hadir untuk ikut memproses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kemudian pada pagi harinya, yakni tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 Bung Karno didampingi Bung Hatta di hadapan massa rakyat Jakarta dan sekitarnya membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bertempat di rumah kediaman Bung Karno di Jl. Pagangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sehari kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, yakni tanggal 18 Agustus 1945 diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membicarakan Undang-undang Dasar Negara. Rapat tersebut mengambil tempat di Pejambon Jakarta, yang akhirnya dapat diambil beberapa keputusan dengan mengesahkan Dasar Negara adalah Pancasila, Undang-undang Dasar, bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden yakni Sukarno - Hatta.

Demikian setelah Indonesia merdeka, untuk sementara sebelum ada penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, Pimpinan atas

pemerintahan daerah kota Jakarta dijalankan oleh Suwiryo sebagai pimpinan umum dan wakilnya ialah Bagindo Dahlan Abdullah sedang Sekretaris Kotanya ialah Suratno Sastroamijoyo. Baru kemudian pada tanggal 29 September 1945 Suratno diangkat secara resmi sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia.

Di pemerintah pusat sendiri pada tanggal 29 Agustus 1945 telah dilantik Komite Nasional Indonesia Pusat. Pembentukan Komite Nasional itu selesai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut penetapan Panitia tersebut, maka Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.

Adapun tugas dan kegiatan Komite itu ialah :

1. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka
2. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu di segala tempat di seluruh Indonesia dan bersatu serta berkebangsaan yang bulat dan erat
3. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
4. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum.

Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk Komite Nasional di daerah, sejalan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut, kemudian untuk Jakarta dibentuk pula sebuah Komite Nasional Daerah Kota Jakarta dengan diketuai oleh Mohammad Roem.

Kedudukan Komite Nasional Daerah ternyata beberapa waktu kemudian menimbulkan keraguan, yaitu apakah badan itu merupakan suatu alat perlengkapan daerah atau bukan. Soal ini lalu diperbincangkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, dan akhirnya oleh Badan tersebut diputuskan bahwa Komite Nasional Daerah akan dimasukkan dalam pemerintah daerah, yaitu sebagai badan legislatip.

Selanjutnya diputuskan pula bahwa Komite Nasional Daerah dengan fungsi yang baru ini akan diteruskan ke daerah-daerah karesidenan, kabupaten, kota dan desa otonom. Ketentuan tersebut di atas tercantum dalam Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, tanggal 10 Oktober 1945 No. 2.

Dengan berdirinya Negara Nasional Republik Indonesia, maka Sejarah Pemerintah Kota Jakarta menempuh lagi fase yang baru, yaitu merupakan Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Tetapi pemerintahan daerah yang bercorak nasional ini berlangsung tidak sampai dua tahun lamanya. Karena dengan adanya agresi militer yang pertama dalam bulan Juli 1947 oleh pihak Belanda, yang mengakibatkan didudukinya beberapa bagian dari wilayah Republik Indonesia, termasuk pula kota Jakarta, maka Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak dapat bertahan lagi

Agresi militer itu diikuti dengan tindakan dalam lapangan pemerintahan untuk memperkokoh kedudukan Belanda di Indonesia. Selesai dengan perkembangan ketatanegaraan yang telah berlangsung, maka kemudian pihak Belanda membentuk Pemerintahan **Pre-Federal**. Dalam jaman Pemerintah Hindia Belanda dahulu terdapat **Stadsgemeente Batavia**, kemudian dalam pemerintah **Pre-Federal** ini **Stadsgemeente Batavia** dihidupkan kembali. Dengan demikian Pemerintah Kota Jakarta berlangsung lagi menurut peraturan perundang-undangan Desentralisasi dari sebelum Perang Dunia II ditambah dengan peraturan baru lainnya dari pihak Belanda yang bersifat darurat

Pada saat Belanda melancarkan agresi yang pertama itu Wali Kota Jakarta Suwiryo ditangkap, begitu pula beberapa pejabat lainnya. Baru pada tanggal 21 Nopember 1947 Wali Kota Jakarta Suwiryo dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Gedung Balai Kota diduduki Belanda dengan kekerasan, seluruh kekuasaan di kota Jakarta kini berada di tangan Belanda. Selama didudukinya Balai Kota dan ditawannya wali kota itu, maka berakhirilah sejarah Pemerintah Kota Jakarta yang lahir dan menunaikan tugas penyelenggaraan otonomi di tengah-tengah kancah revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini pula berakhirilah pemerintahan rangkap di kota Jakarta.

Usaha pembentukan Pemerintahan **Pre-Federal** dan negara-negara bagian yang kecil akan merupakan Negara Federal Indonesia itu, pada waktu itu direncanakan juga adanya lingkungan wilayah yang kelak akan menjadi Distrik Federal, yaitu daerah ibukota dari Negara Federal yang tidak termasuk dalam lingkungan salah satu Negara bagiannya, melainkan langsung berdiri sendiri di bawah kekuasaan Pemerintahan Federal.

Pilihan ternyata jatuh pada Kota Jakarta yang sejak dahulu merupakan pusat politik, ekonomi dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Akan tetapi diingat pula terjadinya perkembangan yang besar pada ibu kota Federal itu, sehingga tidak cukup hanya wilayah kota Jakarta saja yang dijadikan Distrik Federal Indonesia, melainkan harus ditambah dengan wilayah-wilayah di sekelilingnya. Demikianlah pada tanggal 11 Agustus 1948 dengan Staatsblad 1948 No. 178 wilayah Stadsgemeente Batavia ditambah dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang merupakan distrik-distrik/ onderdistrik-onderdistrik dari pada Regentschap Batavia, Regentschap Meester Cornelis dari kekuasaan Negara Pasundan. Lingkungan wilayah itu direncanakan menjadi daerah Ibu Kota dari negara Indonesia Serikat yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan suatu negara bagian tertentu. Luas wilayah dari calon Distrik Federal itu lebih kurang 1800 km persegi, dengan batas-batasnya :

- Di sebelah barat : Kali Cisadane (dengan daerah kecil diseberang dekat Tangerang);
- Di sebelah timur : Kali Cileungsi dan Kali Bekasi (dengan daerah kecil di seberangnya dekat kota Bekasi);
- Di sebelah selatan : Batas-batas selatan onderdistrik-onderdistrik Parung, Depok, Cibinong dan sebagian dari Citeureup.
- Di sebelah utara : Pulau Seribu termasuk kedalamannya.

Kemudian menurut Ordonansi tentang susunan pemerintahan Batavia dan sekitarnya itu, maka wilayah yang dicadangkan untuk menjadi Distrik Federal yang ditetapkan sebagai satuan wilayah

dengan nama Gewest Batavia en Ommelanden, Pemerintahan atas gewest ini oleh seorang Gubernur atas nama Pemerintah Pusat dengan berkedudukan di kota Jakarta. Dengan dibentuknya Gewest Batavia en Ommelanden itu maka Daerah swatantra Regentschap Batavia dan Regentschap Meester Cornelis yang telah ada sejak tahun 1925 dihapuskan.

Selanjutnya wilayah Gewest Batavia en Ommelanden dibagi menjadi tiga bagian :

1. Wilayah dari Stadsgemeente Batavia.
2. Residentil Ommelanden van Batavia.
3. Onderdistrict Duizend - Eilanden (Pulau Seribu).

Wilayah Stadsgemeente Batavia dibagi dalam empat distrik dan masing-masing distrik dibagi dalam beberapa onderdistrict, yaitu sebagai berikut :

1. Distrik Matraman, ini dibagi dalam onderdistrict-onderdistrict yang berikut :
 - a. Onderdistrict Senen.
 - b. Onderdistrict Salemba.
 - c. Onderdistrict Matraman.
 - d. Onderdistrict Kampung Melayu.
2. Distrik Gambir, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrict Gambir.
 - b. Onderdistrict Tanah Abang,
 - c. Onderdistrict Petamburan
3. Distrik Penjaringan, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrict Mangga Dua.
 - b. Onderdistrict Sawah Besar.
 - c. Onderdistrict Penjaringan.
 - d. Onderdistrict Krukut
4. Distrik Tanjung Priok, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrict Tanjung Priok
 - b. Onderdistrict Kemayoran

Residentil Ommelanden Van Batavia dibagi secara administratif dalam :

1. Distrik Tangerang Ilir, ini juga dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Cengkareng.
 - b. Onderdistrik Batu Ceper.
 - c. Onderdistrik Teluknaga
2. Distrik Tangerang Udik, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Tangerang
 - b. Onderdistrik Cipondok
 - c. Onderdistrik Serpong.
3. Distrik Kebayoran, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Kebayoran Ilir.
 - b. Onderdistrik Kebayoran Udik
 - c. Onderdistrik Ciledug.
 - d. Onderdistrik Ciputat
4. Distrik Depok, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Depok.
 - b. Onderdistrik Parung.
 - c. Onderdistrik Gunung Sindur.
 - d. Onderdistrik Sawangam
5. Distrik Bekasi, ini dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Bekasi
 - b. Onderdistrik Babelan.
 - c. Onderdistrik Cilincing.
 - d. Onderdistrik Pulau Gadung.
6. Distrik Kramatjati, dibagi dalam :
 - a. Onderdistrik Pasarminggu.
 - b. Onderdistrik Mampang Prapatan.
 - c. Onderdistrik Pasar Rebo.
 - d. Onderdistrik Pondok Gedeh
7. Distrik Cibinong, distrik ini meliputi :
 - a. Onderdistrik Cibinong.
 - b. Onderdistrik Citeureup
 - c. Onderdistrik Cimanggis.

Dengan diadakan pembagian wilayah yang baru itu, maka Residentie Batavia, Regentschap Batavia dan Regentschap Meester Comelis berikut pembagian-pembagiannya dalam satu-satuan wilayah yang lebih kecil dahulu dihapuskan.

Kemudian mengenai Stadsgemeente Batavia dalam pemerintahan Pre-Federal, sampai pada waktu terjadi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat, keadaan masih berlangsung seperti tersebut di atas.

Perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia berjalan terus. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat dalam bulan Desember 1949 yang beribukota di Jakarta, maka kedudukan Stadsgemeente Batavia mengalami peninjauan kembali. Pemerintahan Kota akan diatur oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Serikat sesuai dengan kedudukan dan pertumbuhan kota tersebut. Dan mulai tanggal 31 Maret 1950 Pemerintah Kota Jakarta itu dinamakan Kotapraja Jakarta Raya. Dengan mempunyai lingkungan wilayah yang lebih luas dari pada semula dan mempunyai status yang tersendiri dalam hubungan dengan Struktur Negara Federal itu.

Berhubung dengan terjadinya perubahan terhadap status wilayah Jawa Barat sebagai akibat dari pembubaran Negara Pasundan, maka terhadap kedudukan wilayah yang merupakan Distrik Federal itu, serta pula terhadap kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah Swatantra maupun sebagai lingkungan wilayah yang dikuasai oleh alat-alat perlengkapan RIS diadakan peninjauan seperlunya untuk kemudian diatur kembali.

Sebagai tindakan yang pertama, maka oleh Residen RIS dengan keputusannya tanggal 24 Maret 1950 No. 125, ditentukanlah lingkungan wilayah yang baru dari daerah Ibukota Jakarta, yaitu wilayah ibukota itu diperluas dengan wilayah-wilayah di sekelilingnya yang berbatasan, sehingga lingkungan wilayahnya sebagai berikut :

1. Kotapraja Jakarta.
2. Pulau Seribu.
3. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Jakarta yaitu :

- a. Sebagian dari Distrik Tangerang Ilir, yaitu Onderdistrik Cengkareng.
- b. Sebagian dari Distrik Kebayoran, yaitu wilayah yang meliputi Onderdistrik Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir dan Kebayoran Udik.
- c. Sebagian dari Distrik Kramatjati, yaitu Onderdistrik Mampang Prapatan, Pasar Rebo.
- d. Sebagian dari Distrik Bekasi, yaitu wilayah yang meliputi Onderdistrik Pulo Gadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing, (dega Cilincing, desa Semper).

1.1 Tujuan Penelitian

Untuk memenuhi tujuan dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah yaitu menggali, mengumpulkan, mencatat, meneliti, mengolah sumber sejarah di Daerah kemudian menyusun bahan-bahan sejarah tersebut menjadi satu naskah Sejarah Tematis Daerah zaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) untuk dijadikan bahan pelengkap Sejarah Nasional yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan Nasional.

Di samping tujuan tersebut di atas, penelitian Sejarah dapat diarahkan sebagai berikut :

1. Untuk mencerminkan dan mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang dapat memperkaya dan memberi corak Kebudayaan Nasional
2. Untuk menjaga kelangsungan hidup Kebudayaan daerah agar tidak hilang identitasnya disebabkan adanya pengaruh Kebudayaan luar yang bersifat negatif
3. Penelitian Sejarah Daerah berarti membina loyalitas daerah dalam rangka perjuangan nasional untuk mengadakan dan mempertahankan kehidupan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta memelihara asas Bhineka Tunggal Ika.

1.2 Masalah

1. Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada hakekatnya di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia terlibat dalam Revolusi Kemerdekaan tersebut, tetapi sampai saat ini belum banyak terungkap perjuangan rakyat di tiap - tiap daerah di seluruh Indonesia yang kemudian dituangkan dalam penyusunan sejarah daerah.
2. Untuk Daerah DKI Jakarta yang Statusnya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, maka sudah selayaknya mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia sehingga sifat perjuangan rakyat di Jakarta banyak kaitannya dengan perjuangan nasional
3. Daerah DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat percaturan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlangsung sejak Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan pendudukan Jepang dan Pemerintahan Republik Indonesia, maka sudah selayaknya mempunyai permasalahan yang sangat kompleks dalam sejarah perjuangan bangsa.

1.3 Ruang Lingkup

1. Wilayah Kota Jakarta sementara terus berkembang sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia oleh karena itu struktur pemerintahan Kota Jakarta selalu mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan wilayah kota yang mempunyai status sebagai Ibukota Negara.
2. Dari segi kehidupan tata pemerintahan maka Kota Jakarta dikhususkan, sehingga sebagai Ibukota Negara sudah selayaknya faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik sangat berbeda dengan daerah lainnya. Maka untuk di Jakarta senantiasa terjadi perpaduan berbagai peradaban yang menimbulkan Jakarta menjadi sifat internasional.

3. Sejarah daerah DKI Jakarta masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) tahun 1945--1949 meliputi berbagai segi kemasyarakatan dan organisasi perjuangan yang timbul pada masa itu, yang kesemuanya menyangkut bidang pemerintahan yang pada dasarnya merupakan perjuangan rakyat Jakarta untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian

1. Dalam melaksanakan penelitian Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di DKI Jakarta digunakan metode penelitian sebagai berikut :
 - a. Penelitian kepustakaan (library research).
 - b. Penelitian lapangan (Field Study)
 - c. Interview / wawancara.
2. Bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan melalui penelitian buku-buku perpustakaan, studi lapangan dan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung tersebut merupakan data sejarah yang selanjutnya di olah dan dianalisa secara sistematis.
3. Waktu mengolah dan menganalisa data tersebut ditentukan dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan yang telah diatur yakni tiap minggu sekali diadakan pertemuan untuk membahas hasil penelitian yang didapat oleh tiap-tiap anggota tim.
4. Sasaran dalam mendapatkan sumber penulisan ialah buku-buku harian, majalah, tokoh-tokoh pejuang dan tempat-tempat terjadinya peristiwa sejarah.
5. Dalam penulisan naskah sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di DKI Jakarta menggunakan metode sejarah melalui beberapa fase. Fase-fase yang biasanya digunakan dalam penulisan sejarah ialah fase heuristik, fase kritik, fase sintesa dan fase historiografi, sehingga objektivitas sejarah dapat diharapkan.

6. Adapun buku-buku harian dan majalah serta informasi dari hasil wawancara yang merupakan sumber penulisan naskah sejarah ini, ada yang dikutip secara langsung dan ada pula yang hanya digunakan sebagai studi perbandingan untuk memperkuat sumber lain.

1.5 Hasil Akhir

Naskah ini aslinya disusun oleh suatu Tim di daerah DKI Jakarta menurut pola (*terms of reference*) seperti yang dibuat oleh Proyek Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah di Pusat. Kemudian naskah ini mengalami proses penilaian, penyempurnaan, editing dan koreksi

Proses editing dilakukan dengan menitikberatkan pada segi-segi materi, penyajian dan kebahasaan. Segi materi diperhatikan hal-hal dari hasil penelitian, segi penyajian diusahakan agar tidak menyimpang jauh dari azas segiosentris, sedangkan segi kebahasaan diperhatikan pada masalah kebakuan istilah, dan ejaan.

Naskah ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan pola dan dengan segenap kelebihan dan kekurangannya hendaknya dianggap sebagai usaha perintisan.

BAB II

**KEADAAN DI DAERAH DKI JAKARTA PADA MASA
Pemerintahan Pendudukan Jepang
(1942--1945)**

2.1 Bidang Pemerintahan

Dengan penyerahan kekuasaan Belanda atas tanah air kita kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati-Bandung, maka berakhirilah penjajahan Belanda di Indonesia untuk selama-lamanya. Indonesia membuka lembaran sejarah baru dengan dimulainya Pemerintahan Pendudukan Jepang. Penyerahan kalah tak bersyarat yang dilakukan oleh Letnan Jendral Ter Poorten kepada Letnan Jendral Imamura itu merupakan permulaan pembubaran kekuasaan Belanda di Indonesia yang sudah dibangun selama kurang lebih tiga setengah abad lamanya. Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dengan segera mengeluarkan larangan adanya perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh bangsa Indonesia. Bukan saja perhimpunan politik, akan tetapi juga serikat-serikat lain yang bersifat sosial turut pula kena larangan.

Untuk kota Jakarta sebenarnya sudah dapat direbut oleh Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1942 oleh Pembesar Balatentara Jepang di Jakarta dikeluarkan Undang-undang no. 1 tentang menjalankan pemerintahan Balatentara Jepang. Menurut pasal 3 Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah

untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Segala undang-undang maupun peraturan yang mereka keluarkan bertandatangani Pembesar Balatentara Dai Nippon.

Namun demikian sebagai suatu taktik secara bertahap mereka jalankan pemerintahan sipil sebagai penunjang dalam bidang militer. Pembinaan tata Pemerintahan sipil dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang no. 2 tahun 1942 yang berlaku untuk seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali daerah kesultanan. Pulau Jawa dan Madura terbagi atas : Syuu, Si, Ken, Gun Son, dan Ku yang masing-masing sama dengan daerah-daerah Keresidenan, Stadsgemeente, Kabupaten, Kewedanaan, Kecamatan, dan Desa. Untuk masing-masing Si dan Ken diangkat seorang kepala yang disebut Sityoo dan Kentyoo. Suatu perubahan penting yang dilakukan oleh pihak Jepang mengenai pemerintahan **Si** (Stadsgemeente) ialah kalau dahulu Stadsgemeente hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa mengurus urusan pangrehpraja, maka menurut undang-undang perubahan tata pemerintahan daerah tersebut di atas ditetapkan kini **Si** mengerjakan segala pemerintahan dalam lingkungan daerahnya. Urusan Pemerintahan (Pangrehpraja) di dalam wilayah Stadsgemeente yang dahulu diurus oleh regent (bupati), wedana, sisten wedana, lurah, kepala kampung atau wijkmeester, kini termasuk dalam kekuatan Sityoo (Kepala Si).

Mengenai **Syuu** (residentie), perubahan pokok yang dilakukan terhadap daerah ini ialah kalau dahulu residentie hanya merupakan daerah administratif di bawah pimpinan residen yang bertugas membantu gubernur, maka kini **Syuu** merupakan daerah swatantra yang tingkatnya tertinggi daerah-daerah swatantra tingkat di bawahnya ialah **Si** (Stadsgemeente) dan **Ken** (regentschap), sedang propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari masa Hindia Belanda dahulu dihapuskan.

Selanjutnya pasal 5 undang-undang no. 27 membuka kemungkinan adanya suatu daerah swatantra lain yang dinamakan **Tokubetsu Si**. Status **Tokubetsu Si** kurang lebih sama seperti suatu **Syuu**. Yang dapat dibentuk sebagai suatu **Tokubetsu Si** ialah yang sangat penting dalam lapangan politik, ekonomi, masyarakat, dan

kebudayaan menurut Undang-undang 1942 no. 28 yang antara lain mengatur hal ikwal pemerintahan daerah **Tokubetsu Si** itu, ditentukan bahwa nama dari daerah **Tokubetsu Si** ditetapkan oleh Gunseikan (pembesar Pemerintahan Balatentara Jepang). Aparatur pemerintahan **Tokubetsu Si** terdiri atas seorang, **Tokubetsu Sityoo** (Kepala Tokubetsu Si) dan beberapa **Zyoyaku** (wakil Kepala Tokubetsu Si) yang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan. Demikianlah berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang no. 27 dan no. 28 tersebut di atas, maka dengan keputusan Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang tanggal 8 Agustus 1942 Stadsgemeente Batavia warisan Pemerintah Hindia Belanda ditunjuk sebagai sebuah **Tokubetsu Si** yang jumlah **Zyoyakunya** ditetapkan sebanyak tiga orang.

Kota Jakarta adalah satu-satunya **Tokubetsu Si** di pulau Jawa yang luas wilayahnya sama seperti wilayah **Stadsgemeente Batavia** dahulu. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1942 diumumkan bahwa sebagai Jakarta **Tokubetsu Sityoo** telah diangkat seorang Jepang bernama Sakae Tukamoto. Sedang sebelum adanya **Tokubetsu Sityoo** Jepang itu, jabatan akting kepala pemerintahan daerah kota Jakarta dipegang oleh seorang Indonesia bernama Bagindo Dahlan Abdullah.

Selanjutnya dalam bulan April 1943 keluarlah Osamu Seirei no. 12 (Undang-undang untuk sementara waktu tentang **Ken** dan **Si**). Peraturan ini mengatur lebih lanjut susunan kekuasaan pemerintah daerah **Ken** (regentschap) dan **Si** (dalam pengertian Si ini dimaksudkan pula Tokubet Si). Pasal 3 Undang-undang 1943/12 itu menetapkan bahwa mengenai susunan hak-hak Si/Tokubetsu Si serta cara menjalankan pemerintahan di dalam mengurus rumah tangganya sendiri tetaplah berlaku aturan tentang stadsgemeente dahulu, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh Undang-undang no. 12 ini peraturan perundangan lainnya dari Pemerintah Balatentara Jepang. Kemudian pasal 4 menentukan bahwa Sityo memegang kekuasaan atas daerahnya dan menjadi pula wakil dari pada daerahnya dan menjadi pula wakil dari pada daerah tersebut. Hak-hak yang dahulu dipegang oleh stadsgemeente dan Colege Van Burgenaeste en Wethouders kini semuanya dijalankan oleh Sityoo.

Jadi dalam sistem pemerintahan daerah Pemerintah Balatentara Jepang itu tidak lagi dewan-dewan, semua kekuasaan pemerintah daerah berada di dalam tangan satu orang (pemerintahan tunggal) dengan hanya dibantu oleh beberapa Syoyaku.

Mengenai susunan organisasi Jakarta **Tokubetsu Si**, berbeda **Stadsgemeente Batavia** dahulu yang mempunyai jawatan-jawatan dan bagian-bagian, maka kini *Tokubetsu Si* mempunyai **Sityookanboo** (sekretariat) mengurus pekerjaan berikut : Hal-hal yang termasuk urusan rahasia dan Urusan surat menyurat. Maka **Tokubetsu Si** juga mempunyai Kyoku (kantor) yang jumlahnya ada lima buah, yaitu :

1. Soomukyoku (kantor urusan umum).
2. Keizaikyoku (kantor urusan ekonomi).
3. Kyooikukyoku (kantor urusan pengajaran).
4. Kyooseikyoku (kantor kemakmuran dan kesehatan).
5. Kooukyoku (kantor pekerjaan umum).

Tiap kyoku tersebut dijabat/dipimpin oleh seorang Kyokutyoo (kepala kantor). Para kyokutyoo itu bertugas memerintah dan mengawasi pegawai-pegawai yang di bawahnya serta memimpin dan menjalankan pekerjaan Kyoku di bawah pemerintah Tokubetsu Sityoo.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk melancarkan jalannya pemerintahan, maka wilayah Jakarta Tokubetsu Si dibagi dalam tujuh wilayah/bagian yang disebut Siku, yaitu : Penjaringan Siku, Mangga Besar Siku, Tanjung Priok Siku, Tanah Abang Siku, Gambir Siku, Pasar Senen Siku, Jatinegara Siku.

Dalam tiap siku itu diadakan Sikuyaku syio (kantor siku) yang dikepalai oleh seorang Sikutyoo.

Memang Jepang banyak mengadakan perubahan nama organisasi pemerintahan, bahkan nama tempat pun diusahakan disesuaikan kembali dengan nama-nama Indonesia aslinya. Seperti halnya sebutan nama Batavia menjadi Jakarta itu diperkuat dengan maklumat yang berbunyi sebagai berikut :

MAKLUMAT

Nama Batavia diganti dengan Jakarta, beberapa ratus tahun yang lalu, daerah Batavia terkenal pada rakyat Nippon dengan nama Jakarta, tetapi nama itu diubah oleh pemerintah Belanda dahulu dengan nama Batavia.

Sejak Balatentara Nippon mendarat di Jawa, sudah diusahakan supaya nama itu diganti dan baru-baru ini dari Pemerintah Agung di Tokyo sudah didapat izin untuk merubah nama Batavia itu. Berhubung dengan itu, mulai tanggal 8 Desember, yaitu "Hari Pembangunan Asia Raya" nama Batavia diganti dengan Jakarta.

Jakarta, tanggal 10 bulan

12 tahun 2602.

Gunseikan.

Sejak itu maka **Batavia Tokubetsu Si**, menjadi **Jakarta Tokubetsu Si**. Susunan pemerintahan daerah Jakarta Tokubetsu Si adalah sebagai berikut:

- I. Kanboo (majelis Pemerintahan).
- II. Naisebu (Bagian Pemerintahan Syuu).
- III. Keizaibu (Bagian Kepolisian).
- IV. Keisatuhu (Bagian Ekonomi). Kanboo dan Naisebu dipimpin oleh seorang Butyoo (Kepala) ialah
- V. H. Okuhara. Sedangkan Keisatuhu dipimpin oleh Butyoo bernama S. Tamama. Dan kemudian Keizaibu dipimpin oleh Butyoo bernama T. Asano. Masing-masing bagian itu mempunyai cabang sebagai berikut :
 1. Cabang **Kanboo** disebut **Bunsyoka**.
 2. Cabang **Naisebu** ialah **Eiseika** (Kesehatan), **Kyooikuka** (pengajaran), **Gyoseika** (Pemerintahan Sipil), **Tyoosaka** (penyelidikan), **Kaikaika** (Kenangan), **Saomuka** (Perkara Umum), dan **Zinzika** (urusan Pegawai).
 3. Cabang **Keisabutu** (Kepolisian) ialah **Keisatuka**
 4. Cabang **Keisaibu** ialah **Syoogyooka** (Perniagaan dan hal-hal yang berhubungan dengan bagian itu.)

Pemimpin yang termasuk cabang-cabang **Kanboo** dan **Naisebu** dijabat oleh Atiek Suwardi sedangkan untuk **Keisatuka** ialah Komisaris Polisi Sakanto. Kemudian cabang-cabang **Keisaibu** dipimpin oleh R. Pandu Suradiningrat.

Selanjutnya berhubung dengan berdirinya **Batavia Tokubetsu Si**, maka untuk daerah **Batavia Syuu** diadakan perubahan pembagian daerah seperti berikut :

1. Daerah Krawang Ken.

Pangkalan Son (kecamatan) di Krawang Gun (Kewedanaan) dipecah menjadi dua Son, Yaitu :

- a. **Pangkalan Son** dengan tempat kedudukan **Sontyoo** di pangkalan **Son** ini terdiri dari desa-desa :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) Tegalmalang. | 11) Cicangar. |
| 2) Gombong. | 12) Ciputri. |
| 3) Tegalaru. | 13) Cijati |
| 4) Cidoro. | 14) Parakanbadak. |
| 5) Tonjong. | 15) Kandang Sapi |
| 6) Babakanjati | 16) Wangun. |
| 7) Nambo. | 17) Parung Banteng |
| 8) Pangelaran. | 18) Pegadungan |
| 9) Cigauntis. | 19) Dayeuhluhur. |
| 10) Cibiuk. | 20) Ciguha. |

b. **Teluk Jambe Son**, tempat kedudukan Sontyoo di Teluk Jambe Son ini terdiri dari desa-desa :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) Teluk Jambe Udik | 9) Babakan Sapi |
| 2) Parung | 10) Rancasepat |
| 3) Teluk Jambe Ilir | 11) Barogbeg. |
| 4) Ulekan | 12) Kedung Poloy. |
| 5) Wadas | 13) Ciampel. |
| 6) Gumpol. | 14) Narogteg. |
| 7) Sumedang | 15) Paremanterus. |
| 8) Babakanjati | 16) Gintung. |

2. Daerah Jatinegara Ken.

a. **Jatinegara Gun** dihapus dan diganti **Cawang Jatinegara Gun** Tempat kedudukan Guntyoo di Cawang Gun. Cawang Gun terjadi dari empat Son sebagai berikut

1) **Pondok Gede Son**. tempat kedudukan **Sontyoo** di Pondok Gede Kulon dan **Son** ini terdiri dari :

Kecamatan Pondokgede Kulon, Pondokgede Wetan (keduanya semula termasuk daerah Bekasi Son), Desa Kranggan Kulon, Kranggan Wetan dan Kalimanggis, (ketiga-tiganya semula termasuk daerah Pasar Rebo Son).

2) **Pasar Rebo Son**. Tempat kedudukan **Sontyoo** di **Kramatjati Son** yang terdiri dari

Desa Makasar, Kecamatan Tanjung Oost, Kecamatan Cibubur, Kecamatan Pondok Gede, Kemandoran Cawang, Pesa Cipinang

Melayu, Kebon Pala dan Kramat Jati., Cipinang Melayu, kebon Pala dan kramat Jati semula termasuk daerah Meester Cornelis yang berada di luar daerah atau batas **Batavia Tokubetsu Si**.

- 3) **Pulo Gadung Son**. Tempat kedudukan **Sontyoo** di Pulogadung Son ini terdiri dari Wijk Tanah 80, Desa Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Kecamatan Kiender, Kecamatan Cipinang Pondok Bambu, Kecamatan Cakung (tadinya termasuk Daerah Bekasi Son.)
- 4) **Pasar Minggu Son**. Tempat kedudukan **Sontyoo** di **Pasar Minggu Son** ini terdiri dari :
Wijk Lentengagung, Wijk Kuningan, Wijk Mampang Tegalparang, Wijk Cililitan Rawajeli, Komandoran Kalibata Duren III, Desa Cilindak, Desa Bangka, Desa Ragunan, Desa Pejaten, Desa Mampang Prapatan, Desa Jati, Desa Pasar Minggu, Kecamatan Tanjung Barat, Desa Jagakarsa, Desa Serengseng, Desa Ciganjur, Wijk Kalibata, Kemandoran Pengadegan, Kemandoran Cikoko dan Kemandoran Pancoran.,

Tiga yang terakhir itu tadinya termasuk daerah **Meester Cornelis Son** yang dahulu berada di luar batas **Batavia Tokubetsu Si**

b. **Bekasi Son** terdiri dari dua Son yaitu

- 1) Bekasi Son dengan tempat kedudukan **Sontyoo** di Bekasi terdiri dari :
Kecamatan Bekasi (tadinya termasuk daerah Cibitung Son.), dan Kecamatan Teluk Pucung Ilir
- 2) Cilincing Son, tempat kedudukan **Sontyoo** di Cilincing terdiri dari :
Kecamatan Cilincing, Kecamatan Bojong, Wijk Cilincing (Cina), Wijk Marunda Besar, Wijk Marunda Kecil, Wijk Tugu Batu Bambu, Wijk Tugu Kristen, Kecamatan Cabang Ampat, (tadinya termasuk daerah Cabang **Bugin Son**, Cikarang **Gun**) dan Kecamatan Babelan (tadinya termasuk daerah **Bekasi Son**.)

c. **Cikarang Gun.** terdiri dari tiga **Son** yaitu :

- 1) **Cikarang Son** dengan tempat kedudukan **Sontyoo** di Cikarang Son, ini terdiri dari :
Kecamatan Cikarang, Kecamatan Kedung-gede, Kecamatan dangasem
- 2) **Sukatani Son**, dengan tempat kedudukan **Sontyoo** di **Serengsensong Son** ini terdiri dari :
Kecamatan Serengsensong, (tadinya termasuk daerah Cikarang), Kecamatan Kumejing, (sebelumnya termasuk daerah **Cikarang Son**), Kecamatan Jagawana, (sebelumnya termasuk Cibitung Son, Bekasi Gun), Kecamatan Babakan, (sebelumnya termasuk daerah Cabang Bugin Son)
- 3) **Cabang Bugin Son**, dengan tempat kedudukan **Sontyoo** di **Cabang bungin Son** dan ini terdiri dari :
Kecamatan Cabang Bugin, Kecamatan Terusan, (sebelumnya termasuk daerah **Cikarang Son**), Kecamatan Batujaya, (sebelumnya termasuk daerah Cikarang Son), Kecamatan Pondok Tengah.

Demikianlah maklumat Batavia Syuutyookan tertanggal 20 Nopember 1942.

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1942 Jakarta **Tokubetsu Sityoo** diadakan pembagian Wilayahnya serta ditunjuk pula pejabat-pejabat pamong prajanya secara lengkap, penunjukan itu lewat pengumuman yang diberi kata pengantar sebagai berikut : pegawai-pegawai pengreh praja di bawah penilikan Jakarta **Tokubetsu Si**. Kedudukan mereka dalam **Tokubetsu Si** kini sedang dipertimbangkan untuk mendapat kepastian. Pekerjaan yang dilakukan tidak berubah sifatnya atau lain-lain lagi yang di luar biasa.

Di bawah ini dicantumkan susunan pengurus Pangreh Praja yang dapat penilikan dari **Tokubetsu Si**.

Jakarta **Tokubetsu Si** dibagi atas dua kewedanaan, yaitu Jakarta Kota, dipimpin oleh Wedana R, Nataprawira; dan Jakarta, dipimpin oleh Wedana Mas Oding Sutadipura.

1. Kewenanaan Jakarta Kota dibagi dua Son :
 - a. Son Penjaringan, dipimpin oleh R.K. Puraatmaja.
 - b. Son Tanjung Priok, dipimpin oleh Martawijaya.
2. Kewedanaan Jakarta dibagi atas tiga Son ialah :
 - a. Pasar Senen, dipimpin oleh R. S. Djayakusuma.
 - b. Tanah Abang, dipimpin oleh Sipan
 - c. Jatinegara, dipimpin oleh P. Sanusi Suryadiningrat.

Jatinegara digabungkan dengan Kewedanaan Jakarta sementara menunggu keputusan lebih lanjut.

Distrik Jakarta Kota dibagi atas beberapa Wijk yang dikepalai oleh Kutyoo, yaitu sebagai berikut :

1. Manggadua, dipimpin oleh Empung.
2. Kebon Jeruk, dipimpin oleh Hisbulah
3. Gunung Sari / Pasar Baru, dipimpin oleh Badri
4. Kebon Kelapa, dipimpin oleh R. Endang Natawiguna.
5. Panjaringan, dipimpin oleh Kasran.
6. Krukut, dipimpin oleh Marjuki.
7. Angke Duri, dipimpin oleh M. Salamun.
8. Ancol Sunter, dipimpin oleh Sajat.
9. Tanjung Priok, dipimpin oleh R. Suminta.
10. Jembatan Tinggi, dipimpin oleh Ma'mun.

Kutyoo Cina, yaitu :

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 1. Giodok | : | Lie Bung tiara |
| 2. Kongsy Besar | : | Khoe Eng Tjiang. |
| 3. Pintu Kecil | : | Tan Wie Lim. |
| 4. Patuakem | : | Kho Yan San. |
| 5. Pinangsia | : | Ong Pong Hai |
| 6. Prinsenlan | : | Ong Eng Tjoai. |
| 7. Pasar Baru | : | Oey Boan Hak |

Kutyoo-kutyoo Distrik Jakarta ialah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Gambir | : | Atjin bin Natawisastra. |
| 2. Menteng | : | Soetarman alias Soetadikarta. |
| 3. Kemayoran/Cempaka Putih | : | Mohamad Irahim. |
| 4. Karet | : | Abdul Murat. |
| 5. Tanah Tinggi | : | Mohamad Samai |

- | | | |
|----------------|---|------------------|
| 6. Pasar Senen | : | Achmad. |
| 7. Tanah Abang | : | H. Mohamad Said. |
| 8. Kramat | : | Soetejo. |
| 9. Petojo | : | Mohamad Saleh |
| 10. Salemba | : | Djubahir. |
| 11. Slipi | : | R. Kartadinata. |
| 12. Jati | : | Mohamad Sali |
| 13. Ambon | : | Maruto. |
| 14. Palmerah | : | Djauhari |

Sedangkan Kutyoo-kutyoo Cina ialah sebagai berikut. :

- | | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1. Pasar Senen | : | Tan Joeng Long. |
| 2. Tanah Abang | : | Thio Koen Tjiang. |

Kutyoo - Kutyoo distrik Jatinegara ialah sebagai berikut

- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| 1. Solitude | : | M. Amintaatmaja. |
| 2. Pisangan | : | MO. Ardiwijaya |
| 3. Bidara Cina | : | M. Karnawidjaja. |
| 4. Balimeester | : | Solihan. |
| 5. Rawabangeke | : | M. Sumantapradja |
| 6. Utan Kayu | : | R. Anta. |
| 7. Matraman | : | M. Musri. |
| 8. Jati Rawamangun | : | Umarmadja |
| 9. Melayu Besar | : | - |
| 10. Bukit Duri | : | R. Yahya. |

Kutyoo-kutyoo distrik Cina adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| 1. Jatinegara. | : | Tan Giok Hoay. |
|----------------|---|----------------|

Pengurus Kongkoan Cina :

- | | | |
|------------|---|----------------|
| 1. Leitan | : | Lie Boen Sin. |
| 2. Penulis | : | Tan Boen Sing. |

Pengurus bangsa Arab :

- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| 1. Kapten | : | Hasan Argubi |
| 2. Kutyoo Kota | : | Sekh Abdullah bin Ali Uabjut |

Pengurus Bangsa India.

- | | | |
|----------|---|------------|
| Pemimpin | : | S. Haque.- |
|----------|---|------------|

Demikianlah tata pemerintahan yang diatur oleh Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

Jakada **Tokubetsu Si** wilayah dan tata pemerintahan tersebut, sampai berakhirnya masa Pendudukan Jepang tetap tidak ada perubahan.

Hanya mengenai pejabatnya Tukamoto sebagai Kepala Tokubetsu Si pada tanggal 21 Juni 1943 digantikan oleh K. Yosie yang kemudian juga diganti lagi dengan seorang Jepang lainnya yaitu Hasegawa sampai berakhirnya masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam usaha memulihkan ketertiban dan keamanan di daerah kota Jakarta, Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang mengeluarkan Undang-undang No. 1 pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas pada tanggal 1 Maret 1942 yang antara lain berbunyi : Balatentara Nippon melangsungkan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera. Setiap **gunseibu** didukung oleh para komandan setempat yang disamping bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan juga memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk pemerintahan setempat

Tetapi usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak dapat berjalan lancar. Jepang mengalami kekurangan staf pegawainya, yang sebenarnya Jepang telah berusaha mendatangkan orang-orang Jepang ke Indonesia, tetapi sebelum sampai di Indonesia kapalnya kena terpedo dari tentara Sekutu, sehingga dengan demikian terpaksa diangkat pegawai pegawai Indonesia.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk Kota Jakarta seorang bangsa Indonesia bernama Bagindo Dahlan Abdullah untuk sementara waktu telah diangkat sebagai Kepala Pemerintahan daerah. Dan jabatan Kepala Polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko. Dengan, diangkatnya pegawai-pegawai Indonesia, maka Pemerintahan Militer Jepang mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan gaji pegawai negeri dan lokal.

Kemudian Jepang mengusahakan pen "Jepangan Indonesia", dengan menyebarkan kepada penduduk setempat antara lain termuat dalam undang-undang no. 4 yakni : bahwa hanya bendera kokki Jepang yang boleh dipasang pada hari hari besar. Dan juga lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanya lagu Komigayo.. Sampai waktu (jam) Jepang pun yang harus dipakai. Juga mengenai tarikh (tahun) harus menggunakan tarikh Jepang yakni tarikh **Sumera**.

2.2 Bidang Sosial Budaya

Sebelum Indonesia dapat direbut oleh tentara Jepang pendidikan di Indonesia terpengaruh dengan pendidikan Barat yang sengaja ditanamkan oleh Belanda sejak menjalankan Politik Etika. Pendidikan Barat itu tidak berjalan dengan cepat di kalangan penduduk Indonesia, disebabkan sistem pendidikan disusun secara bertingkat-tingkat yang bersifat feodal. Kemudian setelah datangnya Balatentara Jepang di Indonesia, yang dengan cepat Jepang dapat merebut kekuasaan di tanah air kita, maka langkah-langkah yang diambil oleh Jepang terutama dalam bidang pertahanan dan sosial budaya, yang meliputi bidang pendidikan. Dalam memberikan indoktrinasi kepada angkatan muda melalui Kebudayaan, ternyata Jepang, telah menguji keampuhannya sejak di Taiwan, Korea, dan Mansyuria. Jika media propaganda Jepang sudah mulai bekerja dengan hebat dan lancar pada permulaan bulan April 1942, pokok-pokok yang dilancarkan ialah hal-hal seperti semangat busyido, samurai, kedewaan, dan keagungan Tenno Heika, dari sebagainya.

Dengan demikian untuk melaksanakan indoktrinasi dalam bidang sosial budaya tersebut perlu adanya ruang sekolah sebanyak mungkin. Demikian juga perkumpulan-perkumpulan olah raga yang umumnya hanya beranggotakan pemuda-pemuda menjadi salah satu perhatian yang pertama dari propaganda Jepang. Jepang sangat menghargai pengajaran dan pendidikan sebagai jalan melaksanakan imperialisme kebudayaan. Seorang pejabat tinggi tentara Jepang di Singapura berkata, :

“ Yang paling baik di antara semua alat yang ada untuk propaganda, ialah pengajaran dan pendidikan. Ia dapat dicipta dan diubah

sekehendak hati menurut garis politik yang hendak dipropagandakan Sejak kecil si anak dapat disuruh mengastimilir pelajaran-pelajaran yang menumbuhkan suatu perasaan loyalitas dan membangun kesadaran nasional”.

Untuk segera melaksanakan indoktrinasi tersebut maka sekolah-sekolah yang telah ada yang banyak memberikan sistem pendidikan Barat ditutup untuk diganti dengan sekolah yang menggunakan sistem pendidikan Jepang. Sesuai dengan sistem pendidikan yang diberikan Jepang, maka tidaklah mengherankan bahwa salah satu usaha yang pertama dari Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia ialah mendirikan kursus-kursus di mana di didik kader-kader yang kelak akan disebar di berbagai sekolah dan perguruan. Kursus yang pertama dibuka di Jatinegara pada tanggal 1 Juni 1942. Di tempat ini dididik sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) guru-guru dari seluruh pulau Jawa dan Madura diberi pelajaran selama sebulan dalam bahasa dan semangat Jepang serta maksud dan peperangan di Pasifik.

Kursus kedua yang dimulai pada pertengahan bulan Agustus 1942 meliputi seratus orang guru-guru. Kursus-kursus dan sekolah sekolah yang didirikan oleh Jepang selama di Indonesia, pada umumnya adalah kursus-kursus kilat. Walaupun sekolah-sekolah umum kemudian dibuka kembali, pelajaran-pelajaran yang diberikan kebanyakan hanyalah meliputi hal-hal yang perlu untuk menjepangkan Indonesia. Pelajaran bahasa Jepang sangat diutamakan. Dengan berbahasa Jepang sebagai sangat lingua franca dari daerah “Kesemakmuran Bersama Asia Raya”. Kesempatan untuk perguruan-perguruan tinggi hanyalah mungkin di negeri Jepang sendiri. Walaupun kemudian dalam tahun 1943 Fakultas Kedokteran dan satu Sekolah Hakim sebagai pengganti dari Fakultas Hukum dahulu di Jakarta dibuka kembali. Mata pelajaran yang diberikan ternyata demikian rendahnya, karena hanya berlangsung masing-masing tiga dan satu tahun saja. Masa pelajaran yang demikian singkat itupun hampir separohnya dipergunakan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Jepang. Kecuali pengiriman dua puluh orang mahasiswa Indonesia ke Jepang untuk pendidikan universitas pada tanggal 5 Mei 1943.

Selanjutnya dipentingkan juga untuk membuka sekolah-sekolah guru pertukangan, pertanian, perdagangan dan lain-lain. Yang paling menggembirakan pemerintah ialah sebagian besar rakyat untuk mempelajari bahasa Jepang. Pada bulan Juli 1942 untuk pertamakali di Jakarta dibuka beberapa sekolah berbahasa Jepang. Sebaliknya para pejabat di kalangan Pemerintah khususnya yang terdiri dari orang-orang Jepang juga berusaha mempelajari bahasa Indonesia. Pada bulan Agustus 1942 beberapa Sekolah Menengah telah dibuka kembali yaitu :

1. Sekolah menengah Pertama I, di Jalan Prapatan 12.
2. Sekolah Menengah Pertama II, di Gambir Timur 2.
3. Sekolah Menengah Pertama III, di Manggarai

Adapun yang diterima di sekolah sekolah tersebut ialah murid-murid bangsa Indonesia, Cina serta Arab yang duduk di kelas 1 sampai 3 MULO Bumiputra. Sekolah Menengah Tinggi di buka di Menteng 40 untuk menerima murid-murid bangsa Indonesia, Cina dan Arab yang dulu duduk di : Kelas 1 sampai 3 AMS, I, AII dan B, dan Kelas 4 sampai 5 HBS, A dan B.

Yang diterima murid-murid kepunyaan pemerintah dahulu atau perkumpulan - perkumpulan yang mendapat subsidi. Selain bahasa Jepang, maka diperhatikan pula pembinaan terhadap bahasa Indonesia. Untuk mengurus sekolah - sekolah tersebut dibentuklah panitia yang terdiri dari : Mr. R. Suwandi, Mr. St. Takdir Alisyahbana, Sanoesi Pane, S. Mangunsarkoro. dan Armyan Pane.

Sanoesi Pane, Armyan Pane dan S. Mangunsarkoro masing-masing sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, Penguji Kata-kata baru dan kata-kata istilah. Adapun yang mengurus masalah pengajaran termasuk pula kesehatan dan urusan memperbaiki kehidupan rakyat ialah Syakaikyoku. Untuk mengurus bahasa Jepang, kantor pengajaran di Jakarta telah membuka lima buah sekolah kursus yaitu :

1. Sekolah Bahasa Jepang ke I (bagian tinggi), di Jl. Guntur no. 1, menerima 250 orang siswa yang sudah tamat sekolah bahasa Jepang dan kursus bahasa Jepang.
2. Sekolah Bahasa Jepang ke II (bagian menengah) di Jl. Menteng 40, menerima 200 orang siswa.

3. Sekolah bahasa Jepang ke III (bagian rendah) di Jl. Cilacap no. 5, menerima 200 orang siswa.

Lama belajar enam bulan dengan mendapat pelajaran - pelajaran selain bahasa Jepang juga diperkenalkan keadaan Jepang, gerak badan dan nyanyian Jepang. Jepang tidak sungguh-sungguh dalam latihan ilmiah "saudara muda" mereka, yaitu bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan mereka di dalam hal menimbulkan jumlah semi intelektual yang besar adalah sama dengan tindakan Belanda, jika tidak dapat dikatakan lebih hebat Jepang dengan sengaja menciptakan golongan semi intelektual yang besar, karena golongan inilah yang paling mudah di jadikan mangsa indoktrinasi politik. Sebab yang dipelajari oleh mereka hanyalah yang dapat dipergunakan di dalam masyarakat yang disusun menurut sistem dan politik Jepang. Kelebihan mereka dari khalayak ramai sehingga menjadi pemimpin dari khalayak ramai dari berbagai lapangan, bukanlah kematangan intelektual, akan tetapi hanyalah karena cita-cita baru ala Jepang.

Pemuda-pemuda yang dididik semi intelektual demikian itu melalui dua cara. Cara yang pertama ialah melalui kursus kilat dalam berbagai lapangan, seperti kursus bagi guru-guru selama sebulan yang sudah disebut di muka, kursus pamong praja selama tiga bulan dan lain-lain. Cara kedua ialah dengan jalan mendirikan apa yang disebut Pendidikan "Barisan Pemuda Asia Raya". Satu didirikan di Jakarta dalam bulan Agustus 1942 dan satu lagi di Singapura untuk Sumatera dan Malaya. Kursus yang didirikan di Jakarta berlangsung tiga bulan dan pendidikan yang diberikan didasarkan kepada semangat, kemauan keyakinan dari kursus-kursus Barisan Pemuda Asia Raya. Tiap pemuda ada kesempatan untuk turut masuk pendidikan tersebut.

Dari rencana mata pelajaran dari pendidikan Barisan Pemuda Asia Raya ini dapat diketahui apa yang dimaksud Jepang dengan "Barisan Pemuda Asia Raya". Pelajaran - pelajaran dibagi atas bagian teknis dan teoritis. Bagian teknis meliputi ilmu berbaris dengan sempurna, memimpin pasukan dengan teratur dalam hal gerak-gerik manouvre dan secara disiplin, mempelajari segala semboyan yang diperlukan untuk memberikan isyarat (**seinen**), seperti kode **morst**, bendera, sorotan cahaya, dan sebagainya, olahraga, berenang, silat pencak,

jujitsu, main pedang, gerak badan dan ilmu pengetahuan palang merah. Bagian teori meliputi ilmu kesehatan, ilmu masyarakat, ilmu kebudayaan dan ilmu kesopanan Indonesia, Jepang dan dunia umumnya; ilmu bahasa (bahasa Jepang sebagai bahasa yang utama) ilmu propaganda seperti mengetahui dan pandai menafsir tujuan dan cara bekerja Barisan Pemuda Asia Raya, sejarah Indonesia, Jepang dan Asia (sejarah dunia fakultatif).

Pada upacara salah satu angkatan Pendidikan Barisan Pemuda Asia Raya pada tanggal 27 Desember 1942 di Jakarta. Dr. Slamet Sudibjo sebagai pucuk pimpinan dari kursus-kursus ini mengatakan bahwa para pengikut kursus setelah selesai dilatih akan disebar ke seluruh pulau Jawa untuk melatih pemuda-pemuda yang berjuta-juta banyaknya.

Hanya karena beberapa intelektual Indonesia yang turut memberi pelajaran, sehingga maksud-maksud Jepang dapat dicegah atau dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan harga diri. Sebab pengajar-pengajarnya banyak juga tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, seperti Soekarjo Wirjopranoto yang memberikan pelajaran ilmu propaganda, Dr. Abu Hanifah memberikan pelajaran tentang disiplin, Mr. Syamsudin, Winarso dan Saleh S.A memberikan pelajaran pembelaan diri.

Satu jalan lain yang dipergunakan untuk menanamkan **Nippon-seisin** ini ialah melalui keolahragaan; Masih dalam permulaan bulan April 1942 Ikatan Sport Indonesia (I.S.I) di Jakarta sudah mengadakan rapatnya untuk menyesuaikan diri kepada suasana yang baru. Rupanya pihak Jepanglah yang memberikan isyarat untuk mengadakan rapat tersebut, sebab Ketua Gerakan Tiga A, Mr. Samsudin dan seorang pembesar Jepang dari Gerakan itu hadir juga pada rapat I.S.I tersebut Sebagai anggota Pengurus Besar I.S.I dan sebagai pemimpin rapat yang pertama itu ialah M. Sutardjo, menerangkan bahwa I.S.I. bermaksud akan memperluas didikan dan pergerakan olah raga, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pengurus besar akan merancang suatu kesusilaan olah raga Indonesia, dengan maksud supaya olah raga dikalangan bangsa kita, tidak hanya ditujukan untuk menambah kekuatan tubuh saja, tetapi akan mempertinggi derajat kebatinan pula.

Di samping itu Jepang juga berusaha menanamkan kebudayaan melalui pertunjukan-pertunjukan untuk pemuda-pemuda Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 1942 diadakan pertunjukan di Gedung Komidi Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pemuda. Setelah itu banyak pula pertunjukan sandiwara di pelosok - pelosok kota Jakarta yang mengambil tema perjuangan dan kepahlawanannya. Dengan demikian sebenarnya Jepang telah memasang senjata pedang untuk menusuk dirinya sendiri. Karena adanya pertunjukan tersebut dapat digunakan untuk menanamkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

Pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia Jakarta merupakan tempat berkumpulnya pemimpin pergerakan nasional, berkumpulnya kaum intelektual, dan juga berkumpulnya pemuda putus sekolah. Dengan berkumpulnya ketiga golongan tersebut dari semua suku bangsa di Jakarta, maka rasa kesatuan dan persatuan yang ditanamkan pemimpin - pemimpin bangsa menjadi bertambah berat dan kuat.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada masa pendudukan Jepang semua sekolah warisan Belanda ditutup. Begitu pula perguruan tinggi mengalami nasib yang sama, seperti Technische Hogeschool di Bandung Rechtshogeschool di Jakarta, kecuali Geneeskundige Hogeschool di Jakarta yang diganti namanya menjadi **Ika Daigaku** (Sekolah Tinggi Kedokteran) yang terletak di jalan Prapatan 10.

Pada suatu saat ada peristiwa yang mengejutkan yang terjadi di Jakarta ialah pemberontakan mahasiswa Ika Daigaku, yang akhirnya enam orang pemimpin mahasiswa dikeluarkan antara lain Daan Yahya, Utaryo, Subyianto Joyohadikusumo dan Suroto Kunto.

Kemudian pada pertengahan tahun 1945 atas prakasa pemimpin-pemimpin kaum intelektual dan para ulama didirikanlah Sekolah Tinggi Islam yang, dibanjiri oleh para pemuda. Ini dapat dimaklumi karena pemuda putus sekolah banyak terdapat di Jakarta.

Sekolah Tinggi Islam mengambil tempat di dua gedung, yakni satu di Jl. Tengku Umar menggunakan Gedung Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan yang satu tempat lagi yakni di Jl. Kramat Raya menggunakan Gedung Balai Muslimin Indonesia.

Di sekolah Tinggi Islam ini terjadi pertemuan antara pemuda yang berpendidikan umum dengan pemuda yang berpendidikan agama. Para

mahasiswa yang dikeluarkan dari Ika Daigaku masuk Sekolah Tinggi Islam yang kemudian terpilih menjadi pemimpin Persatuan Pelajar Sekolah Tinggi Islam, yaitu Suroto Kunto sebagai ketua umum, Subiyanto Joyohadikusumo sebagai Ketua dan Idan Bagja Natadiwirya sebagai Sekretaris.

Rektor Sekolah Tinggi tersebut ialah Abdul Kohar Muzakir, sekretaris Prawoto Mangkusasmito dan Kepala Asrama Mohd Natsir. Dosen-dosen pengajar adalah Mr. Ali Budiharjo, mengajar Ilmu Logika (logies, matiq), Mr. Abd. Karim mengajarkan teori Ekonomi, Dr. Priyono mengajarkan Sejarah Umum. Mr. M. Yamin mengajarkan Sejarah Pergerakan Nasional dan Tata Negara, Bung Hatta, H Rosyidi, R Agus Salim, Kyai Mohtar Nasir, M. Zein Jambek dan lain-lain.

Ruang kuliah di tingkat atas dari gedung MIAI, yang kemudian MIAI ini diganti nama dengan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di Jl. Teuku Umar (sekarang Kantor imigrasi Jakarta Pusat). Asrama pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Islam di Balai Muslim Indonesia di Kramat no. 17.

Pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Islam yang mendiami Asrama Balai Muslim Indonesia Jl. Kramat no. 17 ialah :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Bakhrum Rangkuti | 13. Barnawi Said. |
| 2. M. Syarwani. | 14. A. Bukhari |
| 3. Janamar Ajam. | 15. Subiyanto Joyohadikusumo. |
| 4. Rokmah Jayadiningrat | 16. Suroto Kunto. |
| 5. Mohtar. | 17. Bagja Nitidiwirya. |
| 6. M. Hasyim. | 18. Karim Halim. |
| 7. Masmimar Makah | 19. Sutan Makmur Harun. |
| 8. Adnan Samui | 20. Abo Rahmat |
| 9. A. Nasuhi | 21. M. Dimyati |
| 10. Anwar Haryono | 22. Zainal Abidin. |
| 11. Mahmud Idi | 23. Asmin Nasution |
| 12. Suroto. | |

Kuliah dimulai pada permulaan bulan Juli tahun 1945 dan biasanya kalau tidak ada kuliah pelajar-pelajar berkumpul di ruang kelas membicarakan masalah organisasi Persatuan Pelajar Sekolah

Tinggi Islam atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pelajar. Kebanyakan pelajar itu adalah pegawai dari keuangan, Balai Pustaka dan Radio Jakarta dan sebagainya.

Di samping pelajar-pelajar tersebut di atas terdapat pula pemuda-pemuda yang disengaja diberi pendidikan oleh Jepang dengan tujuan untuk disiapkan membantu pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Sejak bulan Juli 1942 para pemuda diberi gedung untuk tempat pendidikannya oleh Barisan Propaganda Jepang (Sendenbu) yang terletak di Menteng 31, Kemudian Gedung ini terkenal dengan Gedung Menteng 31.

Jepang bermaksud mendidik para pemuda Indonesia menjadi kader-kader demi kepentingan Asia Timur Raya. Tetapi maksud dan cita-cita Jepang kemudian berhasil di belokkan oleh para pemimpin Indonesia yang ditugaskan menjadi pengajar di tempat ini, dengan menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang murni Pusat pendidikan ini kemudian dikenal dengan nama "Ashrama Angkatan Baru Indonesia" Ashrama sengaja ditulis dengan membubuhkan "H" di tengah suku kata, untuk membedakan dengan "Asrama" (tanpa h) yang dipergunakan Republik Indonesia yang berarti internaat. Jadi Ashrama Menteng 31 Jakarta, dahulu diartikan sebagai pusat pendidikan politik. Ashrama angkatan baru ini kemudian dipimpin oleh suatu badan yang terdiri dari :

Ketua	:	Sukardi
Wakil ketua	:	Chairul Salèh
Sekretaris	:	A. M. Hanafi
Bendahara	:	Ismail Wijaya.

Pemuda-pemuda yang dididik di tempat ini datang atas kesadaran sendiri, karena mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu Kemerdekaan Indonesia. Umumnya terdiri dari pemuda pelajar dan mahasiswa (52). Sedangkan pengajarnya terdiri dari pemimpin - pemimpin pergerakan dan beberapa orang Jepang. Mereka itu adalah :

1. Ir. Sukarno, memberikan pelajaran Ilmu Politik.
2. Drs. Moh. Hatta, memberikan pelajaran Ilmu Ekonomi Umum.

3. Mr. Sunarjo, memberikan pelajaran Ilmu Negara.
4. Mr. Ahmad Subadjo, memberikan pelajaran Hukum Internasional
5. Mr. Amir Syarifuddin, memberikan pelajaran ilmu Sosiologi, Psikologi dan Filsafat Timur
6. M. Zein Djambek, memberikan pelajaran Agama Islam.
7. Mr. Moh. Yamin, memberikan pelajaran Sejarah
8. M. R. Dayoh, memberikan pelajaran Bahasa dan Kesusastraan Indonesia.
9. Prof. Bekki, memberikan pelajaran Geo Politik.
10. Prof. Nakatani, memberikan pelajaran Bahasa Jepang,
11. R Shimizu, memberikan pelajaran Pengetahuan Umum.

Hampir separoh dari anggota ashmara terdiri dari berbagai mahasiswa Sekolah Tinggi di Jakarta. Semua pelajaran yang diberikan dalam asrama ini kemudian di stensil dan sesudah itu disebarakan ke pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Para siswa dalam ashrama Menteng 31 ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

1. Bagian A : yaitu mereka yang tinggal di Ashrama terdiri dari 43 orang, yang wajib mengikuti semua pelajaran
2. Bagian B : yaitu para pelajar yang mengikuti pelajaran penuh tetapi bertempat tinggal di luar asrama.
3. Bagian C : yaitu para pelajar yang hanya mengikuti sebagian dari mata pelajaran.

Kemudian pemuda-pemuda yang dididik di Menteng 31 terkenal dengan nama Pemuda Menteng 31.

2.3 Bidang Kehidupan Ekonomi

Jakarta yang merupakan pusat administrasi pemerintahan, politik ekonomi, sosial dan budaya sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan masyarakat dari luar Jakarta. Namun demikian unsur kehidupan masyarakat asli di daerah Jakarta tidak dapat lenyap sama sekali, melainkan ciri khasnya masih tetap hidup sampai sekarang. Pencaharian penduduk Jakarta sejak dahulu adalah pertanian (perkebunan dan nelayan). Jakarta adalah pusat administrasi pemerintahan sejak zaman Hindia Belanda, Pendudukan Jepang dan

kemudian Republik Indonesia, Berangsur-angsur banyak pula masyarakat yang mengubah cara hidupnya dengan berdagang dan kepegawaian pamerintah.

Sejalan dengan perkembangan keamanan, pemerintah militer Jepang mengambil ahli semua kegiatan dan pengawasan ekonomi Langkah pertama adalah rehabilitasi prasarana ekonomi Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi di keluarkan. Harta milik musuh. atau yang dibiayai musuh disita dan menjadi hak milik pemerintah Jepang. Perkebunan, bank, pabrik, perusahaan vital disita oleh Jepang khususnya mengenai perkebunan dikeluarkan Undang-undang no. 22 tahun 1942 yang menyatakan, bahwa Gunseikan langsung mengawasi perkebunan - perkebunan kopi, kina, karet dan teh Pelaksanaan mengawasi perkebunan tersebut diserahkan kepada seluruh badan pengawas bernama Saib'ai Kigyo Kanrikodan (SKK).

Badan ini selain sebagai pengawas juga bertindak sebagai pemegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan itu. Dengan demikian sebenarnya tata perekonomian yang dibangun oleh Jepang itu menjurus kepada ekonomi perang. Hal ini dapat dimengerti karena saat Pemerintah Hindia Belanda terdesak perangnya oleh invasi Jepang maka Belanda melaksanakan aksi bumi hangus. Obyek-obyek vital dihancurkan, yang sebagian besar terdiri dari alat-alat produksi. Akibatnya pada saat pertama pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh.

Selanjutnya tindakan pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang mengadakan ekonomi perang untuk jangka panjang. Padi dan hewan yang ada di Indonesia dicatat, dan dihimpun dan dikerahkan secara totaliter. Bukan saja untuk keperluan Jepang sehari-hari melainkan untuk persediaan jangka panjang dalam menunjang perang. Dengan uang kertas militer Jepang yang terus saja dicetak, padi dan hewan dibeli secara paksa, sehingga mengakibatkan terasanya kekurangan bahan makanan bagi rakyat sendiri. Masa kelaparan mulai dialami oleh rakyat. Berbagai penyakit menular merajalela di kampung kampung. Banyak desa yang hampir kosong karena penduduknya mati kelaparan.

Di kota Jakarta ada pembatasan tempat tinggal bagi orang-orang Asing (Sekutu) Bagi mereka yang berumur dari 17 tahun sampai 60 tahun harus tinggal dalam daerah perlindungan (Interneiringskamp). Daerah perlindungan yang disediakan ada dua tempat, yaitu : Petojo Barat dengan batas-batas di sebelah timur Jl. Cideng Barat, sebelah Selatan dengan bagian utara Jl. Lematang. Daerah perlindungan kedua yaitu : Raden Saleh dengan batas sebagai berikut : sebelah timur Gang Kramat, sebelah barat dengan Sungai Ciliwung. Sebelah Selatan Gang Obat dan sebelah Utara bagian Selatan dari Piatu Vincentius. Dari tindakan tersebut di atas bukan saja mempersulit orang-orang asing yaitu : Belanda, Inggris, Amerika dan Australia yang tinggal di Jakarta, tetapi pada umumnya penduduk Jakarta sendiri juga terbatas ruang geraknya, akibat kerasnya pengawasan Kempeitai (Polisi Militer Jepang).

Di samping itu penduduk Jakarta banyak kehilangan mata pencaharian, karena daerah-daerah yang diawasi itu sudah otomatis tidak dapat digunakan untuk berdagang, dengan semakin berkobarnya Perang Asia Timur Raya, maka menyerap ekonomi perang lebih besar. Suasana perang semakin berkobar itu, membuat pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang meningkatkan usahanya untuk mengeruk harta dan pengerahan tenaga dari daerah-daerah jajahannya.

Di Jakarta banyak kongsi dagang Belanda dan Cina yang terpaksa ditutup atau gulung tikar. Begitu pula pasar, toko serta warung banyak yang ditutup. Hal itu disebabkan barang-barang banyak yang dirampas oleh Jepang untuk kebutuhan perangnya. Keadaan rakyat di Jakarta mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan. Rakyat kecil seperti buruh pelabuhan, buruh kereta api, pelayan toko, tukang pikul dan sebagainya, menderita karenanya. Harta kekayaan mereka habis terjual dan nafkah sukar didapat.

Lintah darat merajalela di mana-mana, lintah darat ini biasanya terdiri dari tuan tanah yang banyak menguasai hasil perkebunan. Dengan adanya lintah darat ini maka penduduk Jakarta mendapatkan tekanan ekonomi dari dua pihak. Satu pihak dari Pemerintah Pendudukan Jepang, dan yang satu lagi dari tuan tanah tersebut. Perjuangan rakyat Jakarta bertambah berat, Untuk menghadapi tuan

tanah pun memerlukan kekuatan fisik, sedangkan keadaan rakyat sudah menderita. Sulit sekali usaha untuk menaikkan taraf hidup penduduk Jakarta, akibat mendapat tekanan dalam bidang ekonomi dan pemerintahan itu. Pada saat-saat Jepang mengalami kekalahan dimana-mana, maka mulailah Jepang berbuat lunak terhadap penduduk Indonesia umumnya dan penduduk Jakarta khususnya. Di samping itu kota Jakarta merupakan tempat berkumpulnya para pemimpin pergerakan nasional dan para pemuda pelajar yang telah mempunyai rasa harga diri dan bangkit rasa kenasionalannya.

Melihat keadaan yang makin lunaknya balatentara Jepang terhadap para pemimpin pergerakan nasional dan pemuda pelajar, maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan untuk mengatur siasat dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan Indonesia Merdeka.

Sementara itu kesibukan Balatentara Jepang dalam mengumpulkan harta kekayaan dari bumi Indonesia semakin meningkat Banyak alat angkutan yang dimonopoli oleh Jepang untuk keperluan mengangkut barang-barang yang akan dibawa ke negeri Jepang atau ketempat sembunyiannya.

Alat-alat angkutan di Jakarta umumnya hasil peninggalan penjajahan Belanda seperti trem listrik, oto mobil, lori dan sebagainya. Sedangkan alat-alat angkutan penduduk berupa delman, gerobak, kuda, dan beca. Selain alat alat angkutan juga tempat-tempat penting untuk sarana produksi dikuasai oleh Jepang,

Semua alat komunikasi berada di tangan pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa perjuangan rakyat Jakarta untuk menaikkan tata kehidupan ekonominya dan sekaligus perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, langkah pertama adalah merebut dan menguasai alat-alat komunikasi tersebut diatas termasuk merebut Jawatan Kereta Api, instansi pemerintah dan media massa termasuk radio sebagai alat penyiar yang sangat menentukan

2.4 Pengaruh Politik

Sejak tanggal 5 Maret 1942 Jakarta telah direbut oleh Jepang. Balatentara Jepang terus mengejar sisa - sisa pasukan KNIL lainnya, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jendral H. Imamura di Kalijati Bandung. Sejak itulah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia berakhir dan dengan resmi ditegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan jaman Hindia Belanda di mana hanya terdapat satu pemerintahan Sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yakni :

1. Tentara Keenambelas di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta)
2. Tentara Keduapuluh lima di Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi
3. Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, dan Irian Barat, dengan pusatnya Makasar.

Dapat dikatakan dalam tempo yang sangat singkat sejak Jepang melancarkan penyerbuan ke Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Pasukannya terus mengalami kemenangan yang gemilang. Akan tetapi pasukan Jepang tersebut rupanya sudah mencapai puncaknya dan hanya bertahan sampai bulan Maret 1942. Pertempuran yang terjadi selanjutnya merugikan pasukan Jepang. Pada pertempuran di Laut Karang tanggal 7 Mei 1942, armada Jepang menderita kekalahan yang hebat. Sejak saat itu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berada di pihak yang lakukan ofensif sedang Jepang berbalik menjadi defensip.

Kekalahan yang dialaminya itu. menyebabkan berubahnya politik pemerintahan Balatentara Jepang terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Dalam rangka untuk melakukan perang semesta terhadap sekutu, maka Jepang hendak mengerahkan seluruh potensi material dan tenaga manusia. Oleh karena itu mau tidak mau Jepang harus menggunakan wibawa pemimpin-pemimpin pergerakan nasional, yang besar pengaruhnya di kalangan rakyat. Agar Jepang

memperoleh sebanyak mungkin bantuan dari rakyat, baik tenaga maupun kekayaan, maka Jepang memberi janji yang masih samar-samar tentang Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu Jepang juga berusaha mempengaruhi Angkatan Muda agar ikut membantu usaha Jepang memenangkan perang di Asia Timur Raya.

Para pemuda dihimpun dalam Seinentai atau Seinendan dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah dalam Gakutotai Orang-orang dewasa dalam Kaibodan dan kaum wanita dalam Fuzinkai. Semua dididik dalam bidang kemiliteran dan ditanamkan **hoko seisin** (semangat berbakti), yaitu berbakti kepada Jepang untuk mencapai kemenangan terakhir. Barisan propaganda Jepang (Sedenbu) bergerak dengan giatnya, mulai membangkitkan perasaan anti Barat dan Belanda.

Gerakan yang bersifat politik Jepang untuk meyakinkan rakyat Indonesia atas kekuatan tentara Jepang, terkenal dengan Gerakan "Tiga A" (Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia). Gerakan Tiga A ini dimulai pada tanggal 29 April 1942 dipimpin oleh Mr. R. Syamsudin, ternyata gerakan tidak mendapatkan hasil yang di harapkan, karena bagi orang-orang Indonesia yang cerdas pandai tidak timbul reaksi apa-apa. Tak lama kemudian Gerakan Tiga A dibubarkan.

Dengan dibubarkan Gerakan Tiga A, kemudian pada tanggal 9 Maret 1943 berdiri organisasi yang bersifat fasis bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang kepemimpinannya diserahkan kepada para pemimpin pergerakan nasional yang terdiri dari "Empat Serangkai" yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K. H. Mas Mansur. Sebenarnya para pemimpin pergerakan merasa berat hati untuk menerimanya, karena sudah semenjak semula ada rasa benci kepada fasisme. Putera ialah suatu organisasi Jepang yang berdasarkan fasis. Semua perkumpulan-perkumpulan harus menggabungkan diri kepadanya. Meskipun mereka sangat benci kepada fasisme Jepang, tetapi perintah memimpin "Putera" itu diterima juga, karena dengan jalan inilah cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat dipelihara.

Di samping itu terdapat pemimpin-pemimpin yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang yaitu Mr. Amir Syarifudin, Sutan Syahrir,

dan Tan Malaka. Mereka ini membuat propaganda anti Jepang secara diam-diam. Sikap mereka ini pun disetujui oleh Sukarno-Hatta. Kemudian setelah ketahuan ada hubungan yang erat antara mereka, maka akhirnya "Putera" dicurigai dan dibubarkan.

Dengan bubarnya "Putera" itu, maka tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah organisasi yang baru yaitu Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa) yang sangat menonjolkan kebaktian. Dengan adanya organisasi yang baru ini maka semua badan yang ada bersifat kebaktian kepada Jepang dilebur kedalam Jawa Hokokai seperti Fuzinkai (Perkumpulan Wanita), Masyumi, Kakyō Sakai (Perhimpunan Cina), Tai Iku Kay (Perkumpulan Olah Raga), Keimin Bunka Syidoso (Himpunan Budaya) dilebur ke dalam Jawa Hokokai, yang pimpinan tertingginya langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan Ir. Sukarno hanya menjabat sebagai Kono (Penasehat).

Sementara itu sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak pemerintah militer Jepang membentuk barisan para militer yang dikenal dengan nama Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Riwayat pembentukannya dimulai dengan usul R. Gatot Mangkupraja melalui suratnya yang ditujukan kepada Gunseikan pada tanggal 1943 yang antara lain meminta supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. tidak saja dibelakang garis perang, tetapi juga di medan perang. Baru pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima yang kedua Tentara Keenam belas, Letnan Jenderal Kumakici Harada memaklumkan Osainu Seirei no. 44 yang mengatur pembentukan PETA (Boei Giyugun). Kemudian tanggal 8 Januari 1944 Jepang memperkenalkan sistem baru, yaitu yang disebut Tonarigumi (Rukun Tetangga), dengan kewajiban untuk mengadakan latihan pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan mata-mata musuh dan menyampaikan ikhtiar militer kepada penduduk, menganjurkan penambahan hasil bumi dan berbakti kepada pemerintah militer di bidang lain.

Situasi perang semakin memburuk bagi Jepang, sehingga pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo), mengumumkan tentang "Kemerdekaan kelak di kemudian hari" bagi bangsa Indonesia.

2.5 *Kegiatan Masyarakat*

Dalam pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Indonesia, Jepang berusaha mengikut sertakan para pemimpin pergerakan nasional dan para pemuda untuk menyokong perang Jepang melawan Sekutu. Tujuan Jepang akan menjadikan mereka sebagai kader-kader politik dari pemerintahan Jepang, tetapi sebaliknya mereka melatih dan mempersiapkan diri untuk melawan kekuasaan Jepang.

Dalam usaha melawan kekuasaan Jepang itu para pemimpin pergerakan nasional menempuh cara legal yang berarti bekerja sama dengan Jepang tetapi untuk menghancurkan dari dalam. Sedangkan yang lain lagi menempuh cara ilegal yang berarti tidak mau bekerja sama dengan Jepang dalam segala bidang. Walaupun demikian baik cara legal maupun cara ilegal mempunyai tujuan yang sama ialah Indonesia Merdeka.

Di Gedung Menteng 31 di dirikan suatu organisasi setengah kepanduan dan setengah militer dengan nama "Barisan Banteng". Barisan ini merupakan kader-kader revolusi tempat menanamkan semangat kebangsaan Indonesia, dan menaburkan benih kebencian kepada Jepang. Organisasi ini kemudian berkembang ke seluruh pulau Jawa, terutama di kota-kota besar. Di Jakarta saja Barisan Banteng mempunyai anggota lebih kurang 10.000 orang pemuda. Anggotanya rata-rata antara 13 dan 25 tahun mulai dari Murid Sekolah Dasar sampai kepada mahasiswa tanpa membedakan status dan kedudukan. Barisan Banteng menciptakan lagu-lagu nasional yang mengandung semangat perjuangan, misalnya Mars Barisan Banteng. Lagu-lagu ini diajarkan kepada para anggota, walau pun pemerintah Jepang melarangnya menyanyikan lagu-lagu nasional yang mengandung perjuangan di tempat umum. Barisan ini juga merupakan barisan pengawal dari para pemimpin dan merupakan organisasi semi militer sebelum adanya Barisan Pelopor (Shuishintai), Seinendan Kaibodan dan PETA.

Lama kelamaan Jepang mencium latar dan maksud dari usaha Barisan Banteng ini. Sebab selain menciptakan lagu-lagu pejuang Barisan Banteng juga mengecat ujung senjata bambunya dengan warna merah putih pula. Akhirnya setelah dapat pelbagai rintangan dari

pemerintah Jepang, maka pimpinan Asrama Menteng 31 mendapat perintah halus dari Kempetai untuk membubarkan Barisan Banteng.

Sebelum pembubaran diresmikan, pernah satu pasukan Barisan Banteng ditahan oleh polisi Jepang dan pemimpin-pemimpin yang berumur antara 17 sampai 20 tahun dibawa ke kantor polisi di Prapatan Jakarta. Karena pemimpinnya ditahan dan para anggota tidak bersedia disuruh membubarkan diri, dan secara demonstratif mereka ikut ke kantor polisi. Mereka menuntut supaya pemimpinnya dibebaskan dan kalau tidak mereka tidak mau kembali ke markasnya. Akhirnya Jepang terpaksa melepaskan para pemimpin mereka ini. Setelah dengan resmi Barisan Banteng dibubarkan, pusat pimpinannya mengeluarkan selebaran yang berbunyi : "Walau pun Barisan Banteng telah dibubarkan tetapi semangat Banteng tetap menyala dalam dada kita".

Barisan Banteng telah dibubarkan tetapi Angkatan Baru tetap berdiri di Menteng 31, dan terus melakukan kegiatannya. Selain dari Angkatan Baru juga berdiri organisasi pemuda lainnya, yaitu Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini adalah bagian dari Jawa Hokookai yang merupakan kader vorming yang tangguh dan disiplin, kuat lahir batin. Kemudian Bung Karno sebagai pemimpin Jawa Hokookai, yang secara resminya juga Pemimpin Pengurus Pusat Barisan Pelopor, menunjuk Sudiro sebagai Pemimpin Harian Barisan Pelopor.

Tujuan Barisan Pelopor ini selain untuk Kadervorming juga untuk Masa-aksi. Kemudian atas petunjuk Bung Karno dan beberapa pemimpin lainnya, telah diangkat antara lain Chairul Saleh, Agus Karna, Mashud, Asmara Hadi, Sukarjo Wiryopranoto dan Otto Iskandardinata sebagai anggota-anggota Pengurus. Juga tidak ketinggalan untuk Syuu-Rengo-Taico (Pemimpin Barisan di Karesidenan) ditunjuk pula Dr. Muwardi untuk Tokubetsu Si Jakarta, Dr. M. Toha untuk Cirebon, Kr. Lawi untuk Pekalongan, Abdullah Sajad untuk Banyumas dan Suprpto sebagai wakilnya, Winamo Danuatmojo untuk Semarang, Dr. Marjaban untuk Kedu, Pangeran Bintoro untuk Yogyakarta, Sarino Mangunpranoto untuk Pati, Sidik Joyosukarto untuk Kediri, Dul Amowo untuk Surabaya, Bambang Suparto untuk Bojonegoro, Kyai Maskur untuk Malang, dan lain-lain.

Ternyata Barisan Pelopor ini dengan cepat berkembang ke daerah-daerah sampai ke tingkat Kabupaten dan Kotapraja. Untuk Jakarta sendiri, di samping Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Dr. Muwardi dan Mr. Wilopo sebagai **Fuku Rengotaico** di tiap-tiap Kawedanan dan Kecamatan dibentuk **Daitai** dan **Cutai**, untuk kelurahan dibentuk **Syotai** terdiri dari 25 orang pemuda Mr. Moh. Roem adalah **Syotai Kwitang**.

Kemudian di Jakarta dibentuk Tokubetsu Shuisintai (Barisan Pelopor Istimewa) terdiri dari 100 orang yang anggota-anggotanya dipilih sendiri oleh Bung Karno. Mereka itu antara lain : Chaerul Saleh, Supeno, S. Suhud, Sumarjo, Pujosemedi, Muharam Atmajasutisna, Nasrun, Johar Nur, Chalid Rasyidi, Yusuf, Durhoeni Lutfi, Harsono Cokroaminoto, Sumanto, Aidit, Lukman, Ir. Sakirman, Wiyoto, Wenas, Van der Eikhout, A. Alaidrus, J. Munadi, Islan, Hadikusumo, Sarwoko, Manaf Roni, I. Sutarjo, dan lain-lain yang semuanya pria. Barisan Pelopor Istimewa ini selain melakukan latihan perang-perangan juga menerima kursus-kursus politik dari pemimpin pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandardinata dan lain-lain. Lencana Barisan Pelopor berbentuk "Kepala Banteng dan sebuah lingkaran" yang warnanya bermacam-macam tergantung kedudukan dalam Barisan.

Barisan Pelopor ini termasuk gerakan legal, karena memang ada hubungan dengan Jawa Hokookai bentukan Jepang itu. Kemudian pada bulan Juni 1945 di Jakarta dan beberapa kota lainnya timbul gerakan-gerakan ilegal. Di Menteng 31 terdapat gerakan "Angkatan Muda" di bawah pimpinan Sukami dan Chairul Saleh, giat mengadakan kursus politik.

Kursus-kursus politik ini lambat laun menjurus ke arah persiapan kemerdekaan Indonesia. Dari Menteng 31 sering di adakan gerakan di bawah tanah yang pengaruhnya sampai jauh ke luar daerah bahkan sampai ke luar Jawa. Tetapi ada beberapa pemimpin yang berpendapat bahwa gerakan di bawah tanah semata-mata tidak begitu besar faedahnya, maka sebagian bekas pemimpin-pemimpin pemuda dan mahasiswa, seperti : Chaerul Saleh, Sukami, Harsono Cokroaminoto, Wikana, Muwardi, Kotot Sukardi, Sudiro, Asmara Hadi, Mr. Moh

Roem, dan lain-lainnya, memasuki berbagai organisasi yang didirikan oleh Jepang

Chairul Saleh sebagai pemimpin Persatuan Pelajar-pelajar Indonesia dan Sukarni sebagai bekas pemimpin Indonesia Muda menjadi pegawai-pegawai Sendenbu atau Barisan Propaganda Tentara Jepang. Muwardi menjadi pemimpin Barisan Pelopor di Jakarta, bagian pemuda Jawa Hokokai, dan Kotot Sukardi dari S.P.I. menjadi pegawai Keimin Bunka atau Badan Kebudayaan. Begitu pula Wikana dan Sudiro (mbah) dulu anggota Partindo, kemudian Gerindo. Bekerja pada Kaigun Bukanfu (Kantor Angkatan Laut Jepang). Gerakan legal ini untuk selanjutnya ditempuh oleh para pemimpin pergerakan nasional yang termasuk anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sedangkan gerakan ilegal ditempuh oleh para pemimpin pergerakan nasional yang semenjak semula tidak simpatik dengan Jepang, seperti Amir Syarifuddin, Tan Malaka, Sutun Syahrir dan sebagainya.

Di samping itu mereka yang dulu masuk dalam pergerakan pemuda ada juga yang tidak, tetapi sudah masuk dalam pergerakan nasional seperti Adam Malik dari P A R I (Partai Republik Indonesia) yang semula dipimpin oleh Ibrahim Datuk Tan Malaka terkenal dengan Tan Malaka. Karena tidak ada suatu gerakan yang menarik pemuda-pemuda Indonesia di Jakarta, maka banyaklah di antaranya yang masuk menjadi anggota Barisan Pelopor yang masih bebas bergerak.

Alat untuk mematangkan pikiran-pikiran supaya pemuda Indonesia bersatu di bawah satu pimpinan ialah antara lain : Surat Kabar "Asia Raya" yang dipimpin oleh Sukarjo Wiryopranoto, Sumanang, Winamo, Anwar Cokroaminoto dan B.M. Diah. Hambatan untuk persatuan pemuda ini terutama adalah adanya rasa curiga satu sama lain masih ada, karena tidak semua pemuda-pemuda itu anti Jepang.

Kemudian ditetapkan bahwa pada permulaan bulan Juni 1945 akan diadakan rapat yang bersifat resmi untuk menentukan sikap pemuda dalam pergolakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan yang pertama ini pemuda-pemuda ingin

mendapat pimpinan yang berani serta harus menentang Jepang. Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 1945 bertempat di Gedung Jawa Hokookai, Gambir Selatan No. 6 Jakarta itu tidak dihadiri oleh Jepang, tetapi hanya pemuda-pemuda dan yang mempunyai hubungan dengan gerakan pemuda.

Dalam rapat itu dikemukakan beberapa pikiran untuk mencari persatuan di kalangan pemuda Indonesia, terutama yang belum mengikat dirinya untuk bergerak, Pokok pembicaraan itu adalah mencari ideologi melancarkan gerakan tersebut, apa dan mau ke manakah pemuda Indonesia. Demikian banyak yang bertanya, ada yang menjawab, pemuda juga menghendaki kekuasaan politik, agar dapat melaksanakan cita-cita untuk Indonesia Merdeka. Sesuai dengan ikrar pemuda tanggal 3 Juni 1945 agar Pemuda Indonesia menghendaki Indonesia Merdeka sekarang juga atas kesanggupan dan kekuatan sendiri dan siapa merintangai perjuangan ini adalah penghalang dan penghianat.

Gerakan Angkatan Baru Indonesia mewakili gerakan pemuda. Putusan rapat itu menyatakan bahwa dalam suatu pertemuan pertukaran pikiran tentang usaha mempersatukan tenaga dan usaha Angkatan Baru Indonesia untuk membangun negara merdeka. Waktu rapat tersebut hadir kurang lebih 100 wakil dari gerakan pemuda, dan dinyatakan perlunya membentuk suatu panitia sementara yang akan mempersiapkan rencana organisasi buat suatu gerakan Angkatan Baru Indonesia.

Dalam pertermuan wakil-wakil pemuda itu, akhirnya berhasil menyusun Panitia Sementara Angkatan Baru sebagai berikut :

1. Sebagai Ketua B.M. Diah (Wartawan).
2. Sukami (Angkatan Muda),.
3. Sudiro (Barisan Pelopor).
4. Syarif Thayeb (Mahasiswa Kedokteran).
5. Harsono Cokroaminoto (Pemuda Islam).
6. Wikana (Kaigun Bukanfu).
7. Chairul Saleh (Angkatan Muda)
8. Gultom (Pemimpin Seinendan, Pemuda Kristen).
9. Supeno (Baperpi).

10. Asmara Hadi (Barisan Pelopor).

Tugas panitia tersebut ialah untuk menyusun Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja gerakan pemuda dalam perjuangan selanjutnya. Kemudian mengadakan Permusyawaratan Besar Angkatan Baru Indonesia yang akan memperkuat kedudukan dan arti pemuda Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan, karena ketidakpercayaan kepada Jepang,

2.6 Interaksi di Daerah dengan Kegiatan Organisasi/Politik/Sosial dan Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional.

2.6.1 Gerakan Tiga A.

Gerakan Tiga A adalah suatu cara dari Jepang untuk mengikutsertakan pemuda-pemuda Indonesia, agar menyokong Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pembentukan Gerakan Tiga A di Jakarta terjadi bersamaan dengan peringatan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran (Tencosetsu) Kaisar Hirohito. Pada tanggal 29 April 1942 dimulailah suatu gerakan yang disebut “Gerakan Tiga A”. Jadi semboyan tersebut diambil dari hutuf awal perkataan Asia. Dengan melalui surat selebaran, surat kabar, siaran radio, sehingga dengan cepat terdengar di kalangan rakyat Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Tujuan dari Gerakan Tiga A adalah untuk meyakinkan rakyat Indonesia atas keputusan tentara Jepang yang tidak terkalahkan, dan meyakinkan pula atas jasa-jasa Jepang kepada rakyat Indonesia yang telah berhasil dibebaskan dari penjajahan Belanda.

Gerakan Tiga A ini memberikan pengertian bahwa Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Jadi jelas bahwa segala di Asia ini Jepanglah yang paling super maka dianggap yang paling “tua”. Gerakan Tiga A meliputi berbagai bidang pendidikan. Karena secara formal bidang inilah dalam waktu singkat dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah yang cukup besar.

Sekolah-sekolah menurut sistim pendidikan Jepang. Pada bulan Mei 1942 Gerakan Tiga A mendirikan Sasan A Seinen Kunrensyo

(Pendidikan Pemuda Tiga) di Jatinegara. Pemimpin dari pendidikan ini terdiri dari seorang Jepang dan seorang Indonesia, yang keduanya termasuk Gerakan Tiga A. Pendidikan Gerakan Tiga A ini merupakan kursus kilat yang lamanya hanya setengah bulan, dan para pemuda kursus terdiri dari kaum remaja yang berumur antara 14--18 tahun yang diterima sebagai peserta kursus adalah bekas anggota kepanduan atau pergerakan pemuda lainnya.

Cara-cara pendidikan yang diberikan adalah sangat unik. Sejak pagi-pagi benar sudah harus bangun tidur, lalu diajar olah raga bersama-sama. Setelah itu baru bekerja sebagai tukang masak dapur, tukang kebun, tukang sapu dan sebagainya. Jadi tidak ada yang duduk berselimum menunggu terbitnya matahari. Apabila sudah siang sedikit, mulailah dilakukan pendidikan olah raga yang terdiri dari gerak badan bermain Sumo, Jujitsu, perang-perangan, dan lain-lain. Tempo-tempo para pemuda itu harus bekerja menggali tanah. Dalam segala hal sangat dipentingkan soal disiplin, sopan santun dan tata tertib dalam pekerjaan. Memang disiplin adalah penting sekali artinya untuk diri sendiri maupun dunia ramai. Pada waktu malam diadakan kesempatan bagi pemuda-pemuda itu untuk belajar bahasa Jepang. Dengan jalan itu orang berharap dapat membentuk pemuda yang bersemangat dan berjasa untuk masyarakat.

Selanjutnya direncanakan tanggal 7 Juli 1942 akan dirayakan sebagai hari pemuda dan untuk pertama kalinya terjadi perang dengan Cina dalam Insiden Jembatan Marcopolo. Kemudian Jepang beranggapan bahwa tanggal 7 Juli itu sebenarnya adalah permulaan pertempuran antara kekuasaan Nippon dengan kekuasaan Amerika Serikat dan Inggris. Jadi tanggal 7 Juli itu merupakan timbulnya semangat muda dari segenap bangsa Jepang. Maka semangat muda itu dibulatkan dalam cita-cita akan membebaskan/ memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari kekuasaan Barat dengan menggunakan semboyan "Asia Untuk Bangsa Asia". Itulah sebabnya Gerakan Tiga A perlu diadakan dalam kalangan masyarakat di Indonesia. Memang untuk masyarakat awam, Gerakan Tiga A ini mendapat sambutan baik. Akan tetapi bagi golongan Intelektual yang telah bergerak dalam bidang politik, Gerakan Tiga A itu dianggap sepi karena Gerakan ini tidak ada manfaatnya dalam perjuangan mencapai

cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berhubung golongan intelektual ini banyak berkumpul di Jakarta, maka dengan sendirinya Gerakan Tiga A tersebut tidak menembus dalam lapisan masyarakat yang lebih luas di wilayah Jakarta.

Ini semua rupanya sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, maka Jepang tidak mau memberikan kepercayaan kepemimpinan Gerakan Tiga A tersebut kepada tokoh politik yang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia, melainkan kepemimpinan Gerakan Tiga A dipercayakan kepada orang yang belum dikenal sama sekali dalam masyarakat, yakni Mr. Raden Samsudin. Ini dapat dimengerti agar Jepang mudah mengendalikan jalannya Gerakan Tiga A ini untuk keperluan Jepang sendiri. Tetapi ternyata Gerakan Tiga A tidak dapat bertahan lama, karena harapan Jepang tidak dapat diwujudkan, sehingga hanya beberapa bulan saja sudah dibubarkan.

2.6.2 *Gerakan Putera*

Pada perayaan pertama dari Hari Pembangunan Asia Raya pemerintah Pendudukan Jepang di pulau Jawa menetapkan beberapa pokok pendirian dan garis-garis besar usaha perayaan. Pokok-pokok pendirian tersebut di antaranya ialah :

- a. Segala usaha perayaan harus mempunyai tujuan menambah semangat dan tenaga berperang untuk mencapai kemenangan bagi Asia Tiinur Raya, menguatkan tenaga di belakang garis perang.
- b. Mengadakan rapat-rapat umum yang terbuka dan yang akan dikunjungi oleh pihak Jepang dan oleh segenap bangsa Asia lainnya berhubung dengan pembentukan persatuan tenaga dalam masa peperangan yaitu suatu organisasi rakyat.
- c. Memulai gerakan untuk menambah hasil bumi atau makanan yang berarti pula menyokong tenaga perang.
- d. Mulai mengadakan gerakan dan usaha serta latihan supaya orang sanggup dengan ikhlas dan cuma-cuma (dengan tidak mengharap upah) memberikan tenaga atau pikirannya untuk pembangunan atau kepentingan umum misalnya melatih pemuda-pemuda supaya

suka ramai-ramai memberikan tenaga mereka dengan cuma-cuma untuk membuat lapangan olah raga umum dan lain-lainnya.

- e. Mulai mengadakan usaha-usaha yang bagus untuk melatih serta mendidik pemuda-pemuda dengan disiplin, menurut setertib-tertibnya kepada segala aturan dan perintah (komando).
- f. Mengadakan sayembara mengarang syair, nyanyian, poster yang mengandung semboyan dan sebagainya, semua itu dengan maksud mengobarkan semangat rakyat untuk pembangunan Jawa Baroe dengan cara bekerja bersama-sama yang sebaik-baiknya.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pendirian tersebut di atas, tampak bahwa Jepang sudah mengubah sikap terhadap nasionalisme Indonesia termasuk kepada para pemimpin pergerakan nasional Jepang tidak dapat menunggu lama lagi akan hasil Penjepangan Indonesia melalui jangka panjang seperti sekolah-sekolah umum, kursus-kursus kilat dalam Gerakan Tiga A. Jepang ingin mencoba memberikan semboyan baru yakni Pembangunan Jawa Baroe yang didukung oleh organisasi-organisasi, militer dan semi militer di kalangan penduduk, yang dapat dipergunakan sebagai tenaga pembantu Angkatan Perang dan buruh kasar untuk berbagai keperluan usaha perang.

Pembangunan Jawa Baroe yang dijanjikan Jepang itu sebenarnya sudah akan dimulai pada tanggal 1 Januari 1943. Sedangkan organisasi rakyat yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) secara resmi berdiri tanggal 1 Maret 1943. Tetapi rapatnya yang pertama dan sangat besar berlangsung pada tanggal 9 Maret 1943 di lapangan Ikada.

Organisasi rakyat yang bernama Pusat Tenaga Rakyat itu sebagai pengganti Gerakan Tiga A yang telah bubar sejak 8 Desember 1943. Putera tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membujuk para pemimpin pergerakan nasional dan golongan intelektual, sebagai alat untuk pengabdian yang lebih besar dari rakyat, guna usaha peperangan yang diduga akan lebih memuncak dan semakin mendekati pulau Jawa.

Pada upacara pembukaan Kantor Besar Putera Pada tanggal 16 April 1943, Somubuco (Kepala Departemen Urusan Umum) sendiri berkata tentang tugas para pemimpin Putera sebagai berikut, "Adapun pada hari yang penting ini saya hendak mengemukakan pesan yang wajib diperhatikan :

- Pertama : maksud mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat, ialah tidak lain memberi bantuan usaha untuk mencapai kemenangan yang terakhir dalam peperangan Asia Timur Raya.
- Kedua : karena segala pekerjaan Pergerakan Pusat Tenaga Rakyat ini sangat erat hubungannya dengan jalan pemerintahan Balatentara Dai Nippon..... Saya harap dengan sangat, supaya tuan-tuan pemimpin sekalian sungguh-sungguh bekerja bersama-sama dengan badan-badan yang mungkin didirikan kemudian hari, menurut haluan yang sesuai dengan Pergerakan Pusat Tenaga Rakyat..... punsaya mengharapkan supaya jerih payah tuan-tuan sekalian yang suka hidup dan yang suka mati bersama-sama, akan berhasil sebaik-baiknya, yaitu dapat mendirikan Jawa Baroe sebagai salah satu keluarga dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya”.

Kepemimpinan Putera diserahkan kepada Empat Serangkai yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiyai RM. Mansyur. Gerakan Putera ini sama sekali tidak memberi kebebasan terhadap para pemimpin pergerakan nasional untuk membimbing rakyat. Karena gerakan ini sangat bersifat fasis dan perkumpulan-perkumpulan politik harus menggabungkan diri ke dalamnya

Pada awal berdirinya, Putera mendapat sambutan yang baik dari organisasi-organisasi yang ada. Tahap pertama : Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (P.G.R.I.), Perkumpulan Pegawai Pos Menengah (Midpost), mengatakan akan bergabung dengan Putera. Kemudian pada tahap ke dua Pegawai Pos, Telegrap Telepon dan Radio (P.T.T.R.) di Bandung, dan Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Mr. Maria Ulfah Santoso dan Ny. Jusupadi Danuhadiningrat di Jakarta menyatakan bergabung dengan Putera. Kemudian dari kalangan organisasi pemuda “Barisan Banteng” dan organisasi olah raga Ikatan Sport Indonesia (LS.L) menyatakan diri masuk ke dalam Putera. Dan juga dari kalangan pelajar : Badan

Perantaraan Pelajar-pelajar Indonesia di bawah pimpinan Supeno masuk ke dalam Putera.

Untuk di Jakarta memang Putera dapat berkembang secara baik, karena Jakarta sebagai pusat pergerakan Putera dan pusat administrasi pemerintahan Jepang. Tetapi untuk di daerah-daerah tingkat Syu dan daerah yang lebih rendah tidak dapat berkembang secara wajar. Ini disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang buruk pada masa itu.

Sekalipun Putera merupakan organisasi resmi pemerintah, tetapi bantuan pemerintah tidak bisa dirasakan oleh Putera. Hidupnya tergantung dengan pengerahan dana iuran dari anggota dan keuntungan badan-badan perdagangan yang didirikan. Namun dengan segala kekurangannya, Putera berhasil untuk mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan. Dengan rapat-rapat raksasa dan dengan memakai media komunikasi massa pihak Jepang, pemimpin-pemimpin Indonesia dapat mencapai rakyat secara lebih luas daripada yang pernah dialami dalam jaman Hindia Belanda.

Memang berkumpulnya tokoh-tokoh pergerakan nasional di Jakarta, secara strategi perjuangan menguntungkan rakyat Jakarta, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita pergerakan nasional Jakarta terlebih dahulu mendapat perhatian. Tetapi akhirnya Jepang menilai bahwa Putera kurang menguntungkan bagi usaha Jepang dalam memenangkan perangnya di Asia Timur Raya, sehingga mulailah direncanakan pembentukan organisasi yang baru sebagai pengganti Putera.

2.6.3 *Jawa Hokookai*

Perkembangan dan aktifitas Putera dinilai kurang memuaskan bagi pemerintah Jepang. Di samping itu dengan semakin memburuknya situasi medan perang bagi Jepang, yang hampir di setiap sektor pertahanan Jepang di daerah Pasifik terdesak oleh pihak Sekutu. Maka dengan demikian pembentukan organisasi baru, yang merupakan suatu badan yang berkewajiban untuk mengerahkan segala dana dan daya, untuk diabdikan kepada Jepang dalam rangka perang. Semesta melawan Sekutu dipercepat. Maksud pembentukan organisasi ini ialah supaya seluruh penduduk di Jawa memenuhi kewajibannya,

yaitu mengorbankan diri dan berjuang untuk mencapai kemenangan akhir dalam Perang Suci ini melaksanakan dan menganjurkan usaha dan tindakan Pemerintahan Balatentara Dai Nippon dalam suasana persaudaraan antara penduduk seumumnya agar supaya cita-cita peperangan Asia Timur Raya ini lekas tercapai dan tersusun masyarakat baru di Jawa yang menjadi anggota yang kuat di dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.

Organisasi baru yang akan dibentuk itu sebenarnya sudah sejak bulan Januari 1944 dibicarakan melalui satu panitia untuk mempersiapkannya. Dengan dibentuknya organisasi yang baru maka semua badan yang ada bersifat kebaktian kepada Jepang, di lebur ke dalamnya. Sedangkan Putera dinyatakan bubar. Organisasi yang baru itu diberi nama Jawa Hokookai (Himpunan Kebaktian rakyat Jawa) yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Di dalam Jawa Hokookai menonjolkan sifat berbakti dan dihubungkan dengan perasaan keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam dengan menyatakan peranan **Dai Toa** itu sebagai Perang Suci. Dengan ini Jepang secara berterus terang menuntut supaya semua rakyat, semua penduduk Jawa bersiap menunggu Sekutu dan menjadikan pulau itu menjadi suatu benteng perlawanan total. Di dalam **Tonari Gumi** dijelaskan sifat berbakti yang menonjolkan gotong royong dan cinta kampung halaman atau tanah air sendiri berarti ikut membantu dalam menyelesaikan Perang Suci

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pimpinan tertinggi Jawa Hokookai adalah Gunseikan, sedangkan Bung Karno adalah sebagai anggota penasihat saja. Jawa Hokookai ini berkantor di Gedung Gambir Selatan No. 6 Jakarta.

Kegiatan Jawa Hokookai sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi :

- a. melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk mengembangkan segenap tenaga kepada pemerintahan Jepang.
- b. memimpin rakyat untuk mengembangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa.
- c. memperkokoh pembelaan tanah air.
- d. memperteguh kehidupan dimasa perang.

Syarat yang diterima menjadi anggota Jawa Hokookai ialah :

- a. minimal berumur 14 tahun
- b. bangsa Indonesia dan Jepang pegawai negeri terlebih dulu atau organisasi kelompok profesi
- c. orang Jepang yang bukan pegawai negeri terlebih dulu mengajukan permohonan kepada Syucokan setempat.
- d. Bangsa Cina dan Eropa terlebih dahulu diteliti. Pengurus pusat Jawa Hokookai mempunyai tiga bagian yaitu bagian pendidikan, bagian usaha dan bagian umum. Pusat Jawa Hokookai berada di Jakarta, untuk Jawa Hokookai tingkat daerah hanya memiliki dua bagian saja. Jawa Hokookai merupakan organisasi sentral, yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokkokai yang sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokookai (Kebaktian Para Pendidik), Izi Hokookai (Kebaktian untuk para Dokter). Kecuali itu Hokookai mempunyai anggota istimewa yang disebut Tokubetsu Hokookai. Yang terdiri dari Fuzinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Kebudayaan). Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Heiho) serta beberapa Hokookai perusahaan.

Di Jakarta Hokookai semacam itu ada semua, mengingat semua administrasi pemerintahan Jepang berada di Jakarta ternyata Jawa Hokookai ini pun mengalami nasib seperti Putera. Dalam usaha pengerahan barang-barang bahan makanan seperti padi dan lain-lain Jawa Hokookai merupakan pelaksana utama. Penyelenggaraan sosial ekonomi masyarakat dimobilisasi melalui Jawa Hokookai, dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sampai pertengahan tahun 1945 peranan Jawa Hokookai sangat baik.

2.6.4 *Cuo Sangi In/Syu Sangi Kai*

Setibanya Perdana Menteri Tojo di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943 dan terus mengucapkan pidatonya di lapangan Ikada (Merdeka = Monas). Jakarta yang isi pidatonya ialah pengambilan bagian dalam pemerintahan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dalam pidato Perdana Menteri Tojo itu tidak menjanjikan Kemerdekaan untuk Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Agustus 1943 Saiko

Sikikan mengumumkan garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan yang dijanjikan itu. Rencana itu meliputi pembentukan badan-badan pertimbangan di daerah dan di pusat Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk kedudukan-kedudukan yang tinggi dan penunjukkan orang-orang Indonesia menjadi penasehat pada Badan Pemerintahan Militer.

Dengan pembentukan Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In) dimuat dalam Osamu Seirei No. 36/1943, yang dikeluarkan oleh Saiko Sikikari. Sedangkan mengenai Badan Pertimbangan di Karesidenan dan Kotaraja Istimewa (**Syuu dan Tokubetsu Si Sangi Kai**) dimuat dalam Osamu Seirei No. 37/1943 untuk kemudian dijelaskan dalam Osamu Kanrei No. 8/1943. Osamu Kanrei tersebut merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan untuk melaksanakan Osamu Seirei. Cuo Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat adalah suatu badan yang tugasnya mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan Pemerintah mengenai soal-soal politik dan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Balatentara.

Pengangkatan orang-orang Indonesia untuk duduk dalam Cuo Sangi In itu diwujudkan dengan penunjukan Prof. Hussein Jayadiningrat menjadi Departemen Urusan Agama sejak 1 Oktober 1943 M. Sutarjo Kartohadikusumo dan R.M. T.A. Soerio menjadi Syutyo (setaraf dengan Residen) sejak tanggal 10 Nopember 1943, masing-masing untuk Kotapraja Jakarta Raya dan Bojonegoro.

Pengangkatan penasehat-penasehat orang Indonesia pada Badan Pemerintahan Militer dilakukan pada permulaan Bulan September 1943. Tujuh orang bangsa Indonesia diangkat menjadi Sanyo yang dipilih untuk enam macam Bu (Departemen). Mereka itu adalah :

- a. Ir. Soekarno untuk **Somubu** (Dep. Urusan Umum).
- b. Mr. R. Soewandi untuk **Nainubu** (Dep. Urusan Dalam Negeri).
- c. Abdul Rasjid untuk **Naimubu** (Dep. Urusan Dalam Negeri).
- d. Prof. Mr. Dr. R., Soepono untuk **Sihobu** (Dep. Kehakiman).
- e. Muchtar bin Prabu Mangunegara untuk **Kotubu** (Dep. Pekerjaan Umum).

- f. R. Prawotosumodilogo untuk **Sangyobu** (Dep. Ekonomi).
9. Mr. Muh. Yamin untuk **Sendenbu** (Dep. Propaganda).

Sedangkan **Cuo Sangi In** yang pertama dimulai tanggal 16 sampai 20 Oktober 1943 berhasil membentuk **bunkai** (bagian) sebanyak empat-macam. Jalannya sidang itu diawasi dengan ketat oleh Gunsekan dan pembesar-pembesar tentara Jepang lainnya, maka jawaban sidang tak lepas dari kehendak Pemerintah, yakni supaya seluruh potensi kerja dan produksi dikeluarkan guna kepentingan perang. Pada mulanya dikuatirkan bahwa melaksanakan **Cuo Sangi In** dikira sukar, tetapi karena Giin di bawah pimpinan Pemerintahan Balatentara, sehingga perundingan baik dan lancar maka kekuatiran itu menjadi hilang, bahkan dapat melegakan perasaan bagi Kepala Bagian Urusan Politik dan Departemen Urusan Umum. Kekuatiran itu disebabkan karena banyak diantara anggota yang sudah pengalaman dalam Volksraad dahulu di mana pembicaraan berlaku sangat bebas, kecam mengecam tentang tindakan Pemerintah Kolonial atau politik seseorang atau segolongan pihak lawan, tetapi apakah tindakan dalam **Cuo Sangi In** ini dapat juga dipergunakan oleh para anggota untuk mengecam tindakan-tindakan Pemerintah Militer Jepang? Tidakkah para anggota akan mempraktekkan sistem Demokrasi dalam **Cuo Sangi In** ciptaan fasisme ini? Tetapi berhubung pengawasan sangat ketat dalam persidangan, maka sikap para Giin dan cara mereka mengemukakan pendapat hanyalah menurut kehendak Jepang. Di samping itu Cuo Sangi In ini memang satu badan yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Badan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memikat bangsa: Indonesia di Pulau Jawa untuk kerelaan berkorban.

Tindakan selanjutnya setelah pembentukan **Cuo Sangi In** (Badan Pertimbangan Pusat) di Jakarta, maka mulailah merencanakan pembentukan **Sangi Kai** (Badan Pertimbangan) di tiap Karesidenan dan Kotapraja Jakarta Raya. Tiap Sangi Kai mengutus seorang wakil untuk duduk dalam **Cuo Sangi In**. Pemilihan anggota **Sangi Kai** yang berjumlah seorang dari tiap Kabupaten dan dua orang dari Bagian Kotapraja Jakarta raya, dilakukan secara bertingkat. Cara pemilihan dilakukan sebagai berikut : Tiap lurah menunjuk seorang pemilih dari desanya. Pemilih-pemilih dari tiap Keresidenan berkumpul secara

tertutup di bawah pimpinan Residen. Waktu berkumpul dipilih calon-calon dari tiap Kabupaten atau bagian Kota dan langsung dipilih dengan jalan menunjukkan tangan ke atas. Dengan terbentuknya **Cuo Sangi In** dan **Sangi Kai** oleh Pemerintah Militer Jepang itu, sepiantas lalu seakan-akan penting, akan tetapi jika dilihat seakan-akan kekuasaan yang diberikan kepada Pejabat-pejabat Indonesia itu tidak ada artinya. karena kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan orang Jepang yang masing-masing menjadi Kepala Bagian dari Departemen Urusan Umum tersebut.

2.6.5 *Dokuritzu Jumbi Coosakai*

Pada saat pertahanan Jepang mulai terdesak oleh kekuatan Sekutu di mana bulan Maret 1945 Iwojima jatuh ke tangan Amerika Serikat dan kemudian pada tanggal 1 April 1945 menyusul jatuhnya Okinawa sehingga medan pertempuran sudah mendekati Negara Nippon asli. Situasi buruk itu sebenarnya sudah lama diderita oleh Jepang, tetapi yang terutama menyebabkan untuk segeranya Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari ialah jatuhnya kepulauan Saipan yang terletak sangat strategis itu ke tangan Amerika Serikat pada bulan Juli 1944, maka menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang. Akibat yang langsung yang dialami di Jepang ialah moral masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot. Yang menyebabkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi, timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal angkutan dan kapal perang. Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan jatuhnya Kabinet Perdana Menteri Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Keadaan angkatan perang Jepang dan Nugini, Kepulauan Salomon dan Marshal, dapat dipukul mundur oleh angkatan perang Sekutu, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang menghadapi serangan Sekutu atas Kota-kota Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya, bahkan tentara Sekutu telah mendarat di kota minyak Balikpapan. Menghadapi yang kritis Pemerintahan Militer di Jawa di bawah pimpinan Saiko Syikikan Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan suatu Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan (Dokuritzu Jumbi Coosakai) tindakan itu merupakan langkah Konkrit pertama bagi terpenuhinya janji Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia kelak dikemudian hari" yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944.

Maka pada tanggal 29 April 1945 yaitu pada hari Tencosetsu (hari ulang tahun Tenno Heika) Pemerintahan Balatentara Jepang mengumumkan pengangkatan *Koico* (Ketua) Badan Penyelidik tersebut di atas sebagai *Kaico* (Ketua) ialah Dr. K.R.T. Rajiman Widyadiningrat dibantu oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan Kiyai H. Wahid Hasim. Maka pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertempat di Gedung Cuo Sangi In Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan pula upacara pengibaran Bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda.

Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam Dokuritzu Zumbi Coosakai tersebut telah dibentuk Badan Perundingan yang terdiri dari seorang *Kaico* (Ketua) dua orang *Fuku Kaico* (Ketua Muda) dan 60 orang *lin* (anggota) termasuk empat orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda. Terdapat pula tujuh orang Jepang, yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang. Mereka ini tidak berhak mengeluarkan suara. Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 yang menjadi pokok pembicaraan ialah Dasar Filsafat Negara yang kemudian dikenal sebagai "Pancasila". Pertama kali Mr. Muh. Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan lima dasar dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Tiga hari kemudian, yakni pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama lahirnya Pancasila. Materi Pancasila yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau prikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima dasar itu atas “petunjuk seorang teman ahli bahasa” oleh Ir. Sukarno dinamakan Pancasila.

Sesudah sidang pertama itu, pada tanggal 22 Juni 1945 sebanyak sembilan orang anggota Dokuritzu Jumbi Coosakai, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso, telah membentuk suatu panitia kecil yang menghasilkan suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian Indonesia Merdeka. Dokumen tersebut kemudian terkenal dengan nama “Piagam Jakarta”. Sidang yang kedua dari Dokuritzu Jumbi Coosakai berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rencana Undang-undang Dasar.

Dalam Uraian Gerakan Rakyat, tidak dapat meninggalkan Gerakan sar yang diketuai oleh Ir. Sukarno, Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman.

Dari sidang ini menghasilkan Pembukaan beserta batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Sebagai perumusan Undang-undang Dasar ini, panitia menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep dasarnya dan mengandung pula perumusan dasar Filsafat Negara yakni Pancasila.

2.6.6 *Gerakan Rakyat Baru dan Angkatan Baru Indonesia*

Dalam Uraian Gerakan Rakyat, tidak dapat meninggalkan Gerakan Angkatan Baru Indonesia yang berkedudukan di Jakarta

Gerakan Angkatan Baru Indonesia melibatkan antara pemimpin Pemuda Indonesia dalam menghadapi Jepang. Sedangkan Gerakan Rakyat Baru adalah gerakan yang pembentukannya pada tanggal 28 Juli 1945 diresmikan oleh Saiko Sisikan. Gerakan Rakyat Baru ingin melaksanakan berdirinya Negara Indonesia Merdeka berdasarkan Panitia yang telah dibentuk oleh Jepang. Akan tetapi Angkatan Baru Indonesia menginginkan mendirikan Negara Indonesia Merdeka atas kekuatan sendiri. Inilah titik awal timbulnya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Para Pemuda sudah bosan melihat Shimizu yang senantiasa menampilkan diri sebagai pemimpin pemuda Indonesia. Maka dalam rapatnya tanggal 3 Juni 1945 yang diselenggarakan di Gedung Gambir Selatan no. 6 Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Jepang hanya semata-mata dihadiri oleh Para Pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan dengan gerakan pemuda. Dalam rapat tersebut antara lain :

1. Syarif Thayeb (Ika Daigaku)
2. F. Gultom (Seinendan)
3. Pandukartowiguno (Indonesia Muda)
4. Adam Malik (Wartawan)
5. Lukman Hakim (Indonesia Muda)
6. Supeno (Baparpi)
7. Chairul Saleh (PPM)
8. Harsono Tjokroaminoto (Masyumi)
9. Bahtiar Husin Lubis (Radio)
10. Sudiro (Mbah) dari Kaigun
11. Wikana (Gerindo Kaigun Bukanfu)
12. Subianto (Surya Wirawan)
13. Muhamad Nur (J.C.P.)
14. S.F. Mendur (Surya Wirawan)
15. Sutan Damil (J.C.P.)
16. Muwardi (Bagian Pelopor)
17. Lopian (Pemuda Minahasa)
18. Abdul Rasak (Kalimantan)
19. J. de Fretes (Ambon)
20. Zumir (Zirnukyoku Ambon)
21. Supardi (Wartawan)

22. Kotot Sukardi (S.P.I.)
23. Sudiro (Indonesia Muda)
24. Supeno (Indonesia Muda)
25. Asmara Hadi (Indonesia Muda)
26. K. Gunadi (Indonesia Muda)
27. Sumaryo (Barisan Pelopor)
28. Ismail Thayeb (Wartawan)
29. Inu Kertapati (Kebudayaan)
30. B.M. Diah (Wartawan)
31. Sofwan (Golongan Islam).

Dalam rapat-rapat selanjutnya yang diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 1945 tercatat nama-nama tambahan

1. A. Mustika Hanafi, Jl. Garuda No. 66 Jakarta.
2. Sumarjo, Medan Kimia 6 Paviliun, Jakarta.
3. A.S. Sumadi, Kepu Selatan, Jakarta.
4. Surawiyono, (Hisbulah)
5. Djohar Nur (Ika Daigaku)
6. Sjamsudin, Def Van de Bos
7. Subadio, Jl. Guntur, Jakarta.
8. Wangsa Widjaya, Paseban dalam Jakarta.
9. Prabowo, Kemayoran Jakarta.
10. D.N. Aidit, Kemayoran, Jakarta.
11. H.M. Lukman, Jl. Maluku Jakarta
12. Malik Saleh, Pandeglang, Banten.
13. Sitorus, Jl. Tangerang Jakarta
14. Chalid Rasyidi, Gambir Barat 2, Jakarta.
15. Chairul Saleh (alm).
16. Hasnan, (Asrama Sekolah Tabib).
17. Sukrisno, Jl. Paseban, Jakarta.
18. Suroto, Jl. Paseban Jakarta.
19. Suhud, Jl. Kramat, Jakarta.
20. Darwis, (Mahasiswa Kedokteran).
21. Sorengpati.
22. Sayoko, (Mahasiswa Kedokteran).
23. S.K. Trimurti, Kramat Lontar, Jakarta.

Dalam rapat-rapat dari Pemuda-pemuda tersebut tetap berpedoman dengan ikrar tanggal 3 Juni 1945 yaitu agar Indonesia merdeka sekarang juga, atas kesanggupan dan kekuatan sendiri dan siapa merintanginya perjuangan ini adalah penghalang dan penghianat. Untuk membuat Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja telah ditunjuk "Panitia Sementara Angkatan Baru" yang terdiri dari :

1. B.M. Diah sebagai Ketua, (Wartawan),
2. Sukami, (Angkatan Muda).
3. Sudiro, (Barisan Pelopor).
4. Syarif Thajeb (Mahasiswa Kedokteran).
5. Harsono, Cokroaminoto.
6. Wikana, (Kaigun Bukanfu).
7. Chairul Saleh, (Angkatan Muda).
8. Gultom (Seinendan, Pemuda Kristen).
9. Supeno (Baperpi).
10. Asmara Hadi (Barisan Pelopor).

Semakin buruknya situasi peperangan bagi Jepang dan kekalahan Jepang sudah mulai terbayang. Maka gerakan Angkatan Baru Indonesia menyatakan maksud dan tujuannya ialah : "Mempersiapkan dan, menyediakan tenaga Angkatan Baru Indonesia yang berdasarkan kedaulatan Rakyat. Persoalan ini sengaja dilemparkan dalam gerakannya, karena di kalangan anggota-anggota yang diangkat Jepang untuk Badan Penyelidik. Usaha Kemerdekaan belum ada kesatuan mengenai : "Bentuk Negara dan susun negara yaitu Republik, Kerajaan, atau Bentuk lain".

Putusan mengenai dasar dan tujuan gerakan tersebut diambil pada tanggal 15 Juni 1945, Rencana Anggaran Dasar Angkatan Baru Indonesia adalah sebagai berikut :

- Pasal 1. : Nama : Gerakan ini bernama Gerakan Angkatan Baru Indonesia didirikan di kota Jakarta pada tanggal 15 bulan Juni 1945.
- Pasal 2. : Kedudukan : Pusat Pimpinan Gerakan berkedudukan di kota Jakarta.

- Pasal 3.. : Maksud : Mempersiapkan dan menyediakan tenaga-tenaga Angkatan Baru Indonesia untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat
- Pasal 4. : Usaha : Memusatkan tenaga Angkatan Baru Indonesia dalam satu ikatan kokoh.
Memberi pendidikan, petunjuk, pimpinan dan pengorbanan kepada rakyat di dalam melaksanakan cita-citanya.

Di samping putusan mengenai Anggaran Dasar itu ada pedoman bekerja pula, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Pemuda-pemuda ke seluruh Jawa dan Madura untuk membentuk Panitia-panitia yang dapat menerima segala keputusan Panita di Jakarta.
2. Mengikhtiarkan adanya panitia-panitia semacam ini di lain daerah Indonesia.
3. Permusyawaratan Besar di Jakarta untuk menyetujui segala usul rencana

Pedoman ini dibuat dalam Bab I, kemudian dalam Bab II ialah :

- a. 1. Menyiarkan maksud dan tujuan Gerakan Angkatan Baru Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia.
2. Menyediakan dan mengumpulkan segala alat-alat dan keperluan supaya Gerakan Angkatan Baru Indonesia ini dapat berjalan dengan tenaga sendiri.
3. Menyediakan satu susunan pemasyarakatan menuju kesatuan atau ikatan yang kokoh.
4. Memikirkan dan merencanakan secara konkrit segala sesuatu yang mengenai Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat.
5. Mengadakan usaha untuk menyelenggarakan ayat 3 dari pada maksud dan tujuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar.

- b. 1. Menyusun satu Barisan Perjuangan untuk mencegah aliran-aliran yang bertentangan dengan dasar gerakan, serta untuk melakukan sanksi gerakan, jika gerakan menjatuhkan hukuman atas bukti yang nyata.
2. Mengatur gerakan untuk bersiap-siap, baik dalam jaman perang ini maupun dalam mempertahankan dan membela Negara Republik Indonesia Merdeka.

Inilah pedoman kerja yang diterima oleh Musyawarah Pemuda di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1945. Dalam menerangkan tujuannya, Angkatan Baru memakai surat kabar -"Asia Raya" sebagai terompetnya, dengan menyatakan konsepsinya adalah terutama agar rakyat, mengetahui bahwa Angkatan Baru menuju kepada bendera Negara, Rakyat untuk Rakyat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan Rakyat akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya Angkatan Baru Indonesia diselenggarakan oleh Panitia yang telah dibentuk oleh Jepang.

Maka akhirnya banyak para pemuda yang di ikut sertakan kedalam gerakan rakyat baru yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan Nasional. Para pemuda menolak, dan mulailah timbul perbedaan pendapat.

2.6.7 *Keimin Bunka Syidosyo*

Badan Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Syidosyo) didirikan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bertujuan untuk mengerahkan agar karya-karya seniman (seperti : roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara dan film). tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Berdirinya Keimin Bunka Syidosyo tersebut berdasarkan atau setelah banyaknya hasil karya sastra yang bersemangat untuk mencapai cita-cita perjuangan rakyat Indonesia. Hal yang demikian itu tidak sesuai dengan anjuran Pemerintah saat itu di mana karya-karya sastra harus ditunjukkan ke arah usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Juga mengenai kegiatan-kegiatan para sastrawan diawasi dan sastrawan tidak boleh mengeluarkan isi hatinya dalam bentuk cerita (tulisan), kecuali bila mendukung kepentingan atau politik pemerintahan militer Jepang.

Keimin Bunka Syidosyo mempunyai bagian-bagian antara lain : bagian musik, bagian sandiwara, bagian seni tari, bagian seni lukis. Pada masa Jepang sekalipun diadakan pengawasan ketat, para sastrawan masih dapat menghasilkan karya-karya sastra yang sifatnya menentang kebijaksanaan dan kepentingan Jepang. Seperti sajak Chairil Anwar “ Siap Sedia” yang menyebabkan pengarangnya ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan untuk beberapa waktu. Sajak tersebut mengajak kawan-kawan untuk bangkit dengan kesadaran dan mengayunkan pedang untuk menuju dunia baru, sajak tersebut berbunyi antara lain :

Kawan-kawan,
Dan kita bangkit dengan kesadaran,
Mencucuk dan menyerang berulang,
Kawan-kawan,
Kita mengayun pedang ke Dunia Terang.

Juga Cak Darusim (di Surabaya) dengan sandiwaranya berani menyentil ketidak benaranan Jepang :

Pegupon Omahe doru,
Milok Nippon tambah soro.

“Milok Nippon tambah soro” artinya “Ikut Nippon tambah sengsara”. Demikian kemudian Tjak Darusim ditangkap dan ditahan, serta disiksa oleh Kompeitai, sehingga meninggal dunia. Dengan melihat kejadian itu, sastrawan - satrawan agar terhindar dari sensor, maka menggunakan kata-kata susunan sindiran yang samar-samar, seperti drama Usmar Ismail : “Api”, “Citra”, “Ki Hakim” (Dr. Abu Hanifah), “Taupan di atas Asia “, “Intelek Istimewa”, “Dewi Rini”

Di antara tontonan yang mendapat kesempatan dan fasilitas dari Jepang hanyalah sandiwara. Dengan sandiwara ini membuat pelaku-pelakunya bebas bergerak, sandiwara berfungsi sebagai propaganda, penerangan dan hiburan untuk rakyat, misalnya perkumpulan sandiwara Bintang Surabaya, Cahaya Timur, Warna Sari, Miss Tjitjih dan lain-lain. Di samping karya-karya sastra yang bersifat menentang kebijaksanaan dan kepentingan Jepang tersebut, juga terdapat karya-karya sastra yang mendukung Tiga A atau setarap dengan itu misalnya

"Cinta Tanah Air" oleh Nur Sutan Iskandar, "Palawidja". oleh Karim Halim, "Angin Fuji" oleh Usmar Ismail, kesemuanya itu adalah karya sastra yang berisi propaganda Jepang untuk menggelorakan semangat berjuang dan berkorban untuk kepentingan Asia Timur Raya. Karya-karya seperti inilah yang diinginkan oleh Jepang.

Dibanding dengan bidang lainnya, dapat dimengerti bahwa kehidupan masyarakat sastrawan jauh lebih baik karena penguasa Jepang dalam batas tertentu membantu memberikan fasilitas bagi perkembangan sastra. Cabang seni suara, seni drama, seni film menerima fasilitas yang sama, akan tetapi seni sastra dan lain-lainnya diatur dan diawasi oleh suatu badan yang dibentuk oleh Jepang. Mengenai kegiatan seni suara, komponis C. Simanjuntak menciptakan lagu "Tanah Tumpah Darahku" menggambarkan kecintaan kepada Tanah Air. begitu pula lagunya "Maju Putra Putri Indonesia" membangun semangat kesadaran bangsa Indonesia.

2.6.8 Organisasi Kepemudaan (*Seinendan, Seinentai, Gakuto - tai*)

Situasi perang pada tahun 1943 mulai berubah, kini pihak Sekutu berada dalam sikap ofensif, sedang Jepang berbalik berada dalam sikap defensif. Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan wilayah pendudukan, yang luas itu, memerlukan dukungan dwi penduduk di daerah masing-masing. Karenanya sejak itu Jepang sudah mulai lebih intensif, mengumpulkan dan mendidik kaum muda Indonesia. Untuk itu pada tanggal 9 Maret 1943 diresmikan berdirinya Gerakan *Seinendan* yang disebut juga Jawa *Seinendan*. Pelantikan Gerakan *Seinendan* (Barisan Pemuda) ini dilakukan pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya tercatat 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan itu bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda, agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri tetapi maksud yang sebenarnya yang selalu disembunyikan oleh Jepang ialah agar dengan demikian Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat angkatan perangnya melawan Sekutu.

Kepada anggota *Seinendan* diberikan latihan militer, baik untuk mempertahankan maupun untuk penyerangan. Untuk di Jakarta Kantor

Besar Jawa Rengo Seinendan didirikan pada tanggal 10 Juli 1943 di Merdeka Utara no. 7 Jakarta. Orang-orang Indonesia terkemuka yang bekerja di sini umumnya adalah bekas guru, seperti :

1. Sukardi (Sendenbu).
2. Chairil Anwar (Sendenbu).
3. Sadaryun (Bunkyokyoku).
4. L. Siswomartojo (Bunkyokyoku).
5. S. Panjaitan (Bunkyokyoku).
6. Munaf (Bunkyokyoku).
7. A.F. Gultoni (Bunkyokyoku).
8. Abdul Latif (Cuo Seinen Kunrensyo).
9. Sarmidi Mangunsarkoro (Bunkyokyoku).
10. W. Hutajulu (Bunkyokyoku)
11. P. H. I. Siagian (Latihan Pertanian).
12. Moh. Slamet (Cuo Seinen Kunrensyo).
13. Iman Sukadi (Cuo Seinen Kunrensyo).
14. Abd. Firman (Cuo Seinen Kunrensyo).
15. N. B. Sihombing (Cuo Seinen Kunrensyo).

Salah satu instruksi dikeluarkan khusus mengenai “haluan Seinendan terhadap soal barang makanan” Usaha untuk menggiatkan Seinendan memperoleh hasil yang lebih tinggi dalam pekerjaan masing-masing ialah : dengan jalan mengadakan perlombaan - perlombaan berupa kegiatan antara lain : belajar bahasa Nipon, latihan baris, membuka hutan, mengusahakan sawah dan ladang, mengadakan pupuk buatan sendiri, membuat barang pertukangan kepada semua barisan Jawa Seinendan untuk dijadikan pedoman latihan. Di samping itu anggota Seinendan yang sungguh-sungguh giat melakukan pekerjaan diberi tanda kerajinan dan hadiah lain. Begitu pula pemimpin Seinendan diberi tunjangan berupa uang apabila telah menyelesaikan selama tiga bulan atau lebih pada Badan Pendidikan Pemimpin Seinendan Daerah (Cuo Seinendan Kurensyo). Besarnya tunjangan antara Rp. 4,- sampai Rp. 10,-. Peraturan ini dimulai dalam bulan Mei 1944, dan selanjutnya anggota Seinendan dapat pula diangkat menjadi pegawai negeri sejak bulan Nopember berikutnya (Aturan - aturan Seinendran, 2605/1945).

Untuk Tokubetsu Si Rengo Seinendan berkedudukan di Jakarta merupakan gabungan Seinendan Kotapraja Istimewa Jakarta. Di samping didirikan Gerakan Seinendan, juga berdiri pula gerakan 'Keibodan, Fuzinkai, Seinentai yang kesemuanya itu merupakan latihan pendidikan jasmani dan rohani pemuda - pemuda yang dapat dipergunakan untuk memberi sumbangan kepada Jepang dalam Perang Suci mewujudkan lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya.

2.6.9 *Organisasi Kemiliteran/Seni Militer (heiho, PETA, Gyugun Keibodan).*

Timbulnya Putera, Jawa Seinendan, Keibodan, Heiho dan juga Romusya, hampir pada waktu yang bersamaan, yakni pada awal tahun 1943 sekitar bulan Maret dan April. Keibodan merupakan mata-mata yang diperlakukan sebagai pembantu tugas kepolisian, Heiho nama dari barisan pembantu kesatuan - kesatuan Angkatan Perang yang dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang dan dibawa kemana-mana sebagai tenaga pekerja, sedangkan Romusya adalah barisan pekerja yang bukan merupakan bagian dari ketentaraan .

Kemudian pendidikan kemiliteran secara formal yang diberikan ialah, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Pembentukan PETA ini ditentukan dalam Osamu Seirei No. 4 tanggal 3 Oktober 1943. Dari badan ini muncul suatu golongan yang memperoleh pendidikan militer jaman Jepang, Perhatian penduduk terhadap PETA ternyata sangat besar, terutama dari pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan tergabung dalam Seinendan.

Dalam bulan Mei 1943 di Jakarta didirikan satu pendidikan Pemimpin Latihan Keibodan. Pada angkatan pertama dididik 44 orang yang terpilih dari anggota kepolisian Pendidikan berlangsung selama sebulan. Keibodan bukanlah barisan yang mendapat gaji dan seragam, karena perlunya dana untuk segala bahan barang maka anggota diperkenankan memakai pakaian menurut kemauan sendiri.

Akhirnya setelah situasi peperangan semakin genting Keibodan pun diberi latihan dasar untuk memperkuat pembelaan dan juga diberi pakaian seragam.

Sekarang keperluan barisan pekerja bagi Jepang sangat terasa, usaha perang adalah nomor satu di atas segala urusan lain. Usaha perang memerlukan bantuan dari rakyat di dalam lapangan, terutama dari pihak pemuda. Jika Sekutu mendarat nanti, Jepang tak mungkin dapat mempertahankan diri tanpa bantuan bahan perbekalan. Pembuatan kubu-kubu pertahanan, pembuatan benteng, jalan, lapangan udara dan sebagainya meminta banyak tenaga di dalam medan perang. Tenaga - tenaga pekerja disebut "Prajurit Kerja" yang akan disebar ke seantero medan perang di Pasifik Barat Daya dan Asia Tenggara. Untuk di Indonesia dalam memenuhi prajurit ekonomi dan prajurit kerja mereka dibantu Heiho dan Romusya pada sekitar pertengahan tahun 1943. Syarat-syarat penerimaan Heiho lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan Keibodan dan Romusya. Ini dapat dimengerti karena barisan Heiho ini adalah semacam milisi Indonesia. Heiho yang merupakan pembantu prajurit Jepang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut syarat yang diterima sebagai Heiho ialah para pemuda yang berbadan sehat, kelakuan baik dan berumur antara 18--25 tahun serta pendidikan paling rendah Sekolah Dasar.

Heiho setelah selesai menjalankan pendidikan maka diberikan pangkat dari prajurit sampai sersan.

Kalau Heiho yang berkedudukan di dalam organisasi militer Jepang hanyalah sebagai pembantu prajurit, lain halnya dengan PETA yang langsung mempunyai kedudukan sebagai militer penuh dengan mencapai pangkat yang lebih tinggi. Keanggotaan PETA berasal dari berbagai golongan dalam masyarakat. Pemimpin masyarakat atau orang terkemuka di dikerahkan seperti pegawai negeri dapat diangkat sebagai perwira yang menjabat sebagai Komandan Batalyon (Daidanco). Begitu pula Pemimpin Agama dan tokoh pergerakan Nasional. Sedangkan pangkat Cudanco atau Komandan KOMPI diberikan kepada guru-guru sekolah atau pegawai pemerintah yang kedudukannya lebih rendah dari pada tersebut di atas. Kemudian pangkat Syodanco atau komandan peleton umumnya dipilih dari pelajar-pelajar sekolah menengah, sehingga yang ditunjuk sebagai pengikut pendidikan calon Komando Batalyon pada umumnya bukanlah terdiri para pemuda yang masih sekolah melainkan tokoh-

tokoh yang oleh pejabat militer Jepang diangkat mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Masih ada pangkat di bawah Syodanco ialah Budanco (Komandan Regu) yang diberikan kepada anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.

Di kota Jakarta banyak terdapat anggota PETA tersebut dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi. Adapun pendidikan PETA tidak berpusat di Jakarta, melainkan di Bogor dengan pelatih PETA orang Jepang bernama Yanagawa. Tetapi karena pusat administrasi pemerintah pendudukan Militer Jepang berada di Jakarta maka tidak mustahil apabila di Jakarta banyak terdapat markas dari PETA, di Jakarta bermarkas di Jagamonyet

Peranan PETA di Jakarta sangat besar, terutama pada saat-saat sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan PETA Jakarta dapat bekerjasama dengan tokoh pergerakan Nasional dan Pemuda-pemuda dalam perjuangan mencapai cita-cita pergerakan Nasional, yakni Indonesia Merdeka.

2.6.10 Pergerakan Romusya

Untuk membangun sarana perang seperti benteng dan jalan raya, Jepang memerlukan tenaga kasar. Selain itu tenaga ini juga diperlukan untuk yang memerlukan tenaga pekerja di pabrik atau tempat produksi lainnya. Tenaga-tenaga ini banyak di dapat; di desa Pulau Jawa sebagai pulau yang padat penduduknya memungkinkan pengerahan tenaga tersebut secara besar-besaran. Pada mulanya tugas - tugas yang dilakukan itu bersifat sukarela.

Propaganda Jepang menganjurkan agar orang dengan rela menjadi tenaga pekerja dari Angkatan Perang Jepang dalam peperangan yang dihadapi. Maka Angkatan Perang Jepang terdapat seribu satu macam pekerjaan yang memerlukan tenaga buruh kasar. Semakin keadaan peperangan menghebat, semakin besar jumlah buruh kasar atau Romusya tersebut. Sebenarnya arti kata **Romusya** tidak lain dari tenaga pekerja atau kuli. Pada permulaan bulan September 1944 di kota Jakarta terdapat 500 orang **Romusya** sukarela yang terdiri dari para, pegawai tinggi dan menengah dengan Bung Karno sebagai pemimpin, bekerja selama seminggu disalah satu tempat yang sangat

penting. Para pegawai itu bekerja dalam rangka apa yang disebut "Pekan Perjuangan Mati-Matian".

Akan tetapi lama-kelamaan pengerahan tenaga yang bersifat sukarela itu berubah menjadi paksaan beratus ribu tenaga pekerja yang dikerahkan dari Pulau Jawa, baik dengan keinsafan sendiri maupun secara tipu dijadikan Romusya dikirim keluar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Birma, Muangthai, Vietnam dan Malaya. Mereka pada mulanya dijanjikan hanya selama tiga bulan untuk dipekerjakan, tetapi dalam kenyataan sudah sampai pada waktunya tidak kembali, bahkan banyak yang meninggal dunia di tempat kerjanya, karena diperlakukan sangat buruk, kesehatan tidak terjamin dan makanan tidak cukup sedang pekerjaan sangat berat

Akibat itulah timbul ketakutan di kalangan penduduk untuk dijadikan "prajurit kerja" maupun "prajurit ekonomi", sehingga banyak penduduk meninggalkan desanya lari ke kota-kota menghindari untuk dijadikan Romusya. Para Romusya yang selamat keadaannya sangat menyedihkan, setelah kembali ke desa banyak memberikan informasi yang sebenarnya, bahkan banyak pula Romusya yang dikirim ke luar Jawa atau ke luar negeri tidak sampai di tempatnya, tetapi diceburkan ke laut. Begitu pula para pemuda yang menghilang dari desanya pergi ke kota-kota setelah Jepang kalah perang, maka dapat dikembalikan lagi ke desanya dengan membawa pengalaman baru yang dapat digunakan untuk membangun desanya. Tetapi itu hanya sebagian kecil saja, karena yang sebagian besar para romusya itu banyak yang menderita lahir batinnya dan tidak sedikit pula mati karenanya. Juga mengenai pemuda-pemuda yang lari ke kota-kota, kebanyakan mereka ini menjadi gelandangan karena sulit mencari pekerjaan di kota-kota.

Pada masa pendudukan pemerintahan pendudukan Jepang itu, kota-kota terutama Jakarta menjadi sasaran utama bagi pelarian penduduk desa yang ingin menyelamatkan dirinya dari ancaman dijadikan Romusya, dengan sendirinya menimbulkan masalah sosial ekonomi kota Jakarta yang semakin menyedihkan. Penduduk makan makanan yang tidak bisa dimakan sepertinya iles-iles, bekicot dan lain-lain yang bisa dijadikan makanan sekedar pengisi perut, akibatnya banyak yang keracunan dan timbul wabah penyakit menular.

2.6.11 Organisasi Kewanitaan.

Kaum Wanita juga tidak luput dari kewajiban **hokosheisin** (semangat mengabdikan) untuk melayani perang semesta Jepang di Asia Timur Raya. Maka pada bulan Agustus 1943 didirikan Fuzinkai (Perkumpulan Wanita) yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Fuzinkai itu merupakan organisasi vertikal dari atas ke bawah sesuai dengan hirarki pemerintah Balatentara Jepang. Sebagai pucuk pimpinan adalah bagian wanita dari Jawa Hokokai yang membawahi Fuzinkai kabupaten (Ken), kotapraja (Si), kewedanaan (Gun), kecamatan (Son) kelurahan (Ku). Ketua atau anggota - anggota pengurus dari Fuzinkai telah ditetapkan lebih dahulu yaitu para istri pejabat-pejabat di masing - masing daerah, yang diwajibkan masuk menjadi Fuzinkai ialah semua wanita yang berumur 15 tahun ke atas.

Dengan demikian jelaslah bahwa Fuzinkai sebagai organisasi yang telah meluas meliputi seluruh daerah di Jawa dan Madura. Tujuan Fuzinkai adalah untuk membantu Balatentara Dai Nippon dengan usaha yang sesuai dengan kedudukan wanita serta mempertinggi derajat kesusilaan wanita.

Kesusilaan di sini bukanlah suatu kesusilaan dalam hal pendidikan manusia susila. Seorang Jepang yang baik ialah seorang yang mempunyai semangat Jepang yakni semangat Yamato Damasyi. Jadi kesusilaan menurut pengertian Jepang itu adalah semangat Jepang yang disebut juga Yamato Damasyi, salah satu diantaranya ialah Busyido (Semangat Berkorban). Berkorban jiwa maupun raga untuk menjunjung tinggi Tenno sebagai putera Dewi Amaterasu - 0 - Mi - Kani. Jadi jelas bahwa tujuan pembentukan Fuzinkai yang disebut untuk mempertinggi derajat kesusilaan Wanita" itu adalah dalam arti sebagai usaha untuk mempertinggi semangat mengabdikan dan berkorban dari kaum wanita bagi perang semesta Jepang melawan Sekutu..

Kegiatan Fuzinkai adalah sebagai berikut :

- a. Anggota harus mengutamakan kesederhanaan dan berusaha saling latih-melatih sambil mempertinggi derajat kesusilaan wanita di Jawa.

- b. Menjalankan pekerjaan dalam mempertinggi kehidupan di belakang garis perang dalam lapangan usaha seperti : menabung, pendidikan keselamatan umum dan kesehatan.
- c. Mengadakan rapat-rapat, pidato, kursus, dan merapatkan hubungan dengan Seinendan, Keibodan dalam latihan untuk menghadapi apabila ada serangan musuh
- d. Mengadakan hubungan rapat dengan sekolah-sekolah dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak sekolah maupun luar sekolah dan dalam rumah tangga.
- e. Boleh juga melakukan pekerjaan yang patut diusahakan oleh kaum wanita.

Jadi jelaslah bahwa Fuzhakai mempunyai kesempatan yang luas untuk mengadakan rapat-rapat penerangan baik untuk anggota - anggotanya sendiri maupun di luar sekolah. Salah seorang Pemimpin Fuzinkai ialah Ny. Mangunpuspito menyatakan pada tahun 1944 berjuang atau berkorban (pikiran, tenaga) harta benda atau kesenangan pada waktu yang lalu di samping sebagai tugas ibu dan Istri.

Sementara itu dengan tujuan untuk lebih meningkatkan partisipasi kaum wanita dalam perang Asia Timur Raya, Jepang kemudian membentuk " Barisan -Srikandi" sebagai bagian dari Fuzinkai. Barisan Srikandi adalah barisan istimewa untuk mengatur tata usaha sendiri, latihan bersama, dalam melaksanakan kebaktian. Barisan Srikandi ini dibentuk bulan April 1944 di Jatinegara. Latihan selama satu bulan dalam hidup sederhana seperti prajurit, mempelajari tatakrama, adat istiadat kewanitaan, bahasa Nippon, bercocok tanam, memasak dan sebagainya. Setelah tamat Barisan Srikandi ini dijadikan pemimpin utama yang berdiri di depan barisan wanita.

2.6.12 *Media Massa*

Media massa yang terutama pada masa pendudukan Balatentara Jepang ialah surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film , sandiwara, dan sebagainya. Karena dengan alat-alat tersebut dapatlah dipancarkan propagandanya. Maka Jepang menguasai sepenuhnya dalam mengendalikan media komunikasi massa seperti tersebut di atas. Surat kabar dan majalah dilarang terbit dengan tidak ada ijin istimewa dan dibentuklah badan-badan sensor. Dalam melaksanakan

pengawasan tersebut di Jakarta yang langsung berada di pusat administrasi pemerintahan berjalan ketat, sekali pikiran pikiran atau pendapat yang tidak sesuai dengan kehendak Jepang dilarang. Surat kabar yang terbit langsung berada di bawah sebuah organisasi (Badan) pengawas yang diberi nama Jawa Syinbunkai.

Surat kabar Belanda berbahasa Belanda, Cina dan Indonesia dihentikan penerbitannya oleh pemerintah militer Jepang. Hanya untuk sementara, surat kabar Tjahaya Timur dan surat kabar Pemandangan pada bulan April 1942 masih dapat terbit.

Tetapi walaupun berkeras untuk mempertahankan akhirnya dihentikan juga penerbitannya, kemudian sebagai gantinya diterbitkan surat kabar Asia Raya dalam bulan April juga dipimpin oleh Sukarjo Wiryopranoto.

Kemudian pada tanggal 8 Desember 1942 di Jakarta diterbitkan oleh pemerintah Militer Jepang sebuah surat kabar bernama Jawa Shinbun. Surat kabar ini berbahasa Jepang di bawah pimpinan Bunsyiro Susuki (30). Surat kabar Asia Raya dan Jawa Shinbun merupakan sumber pemberitaan bagi seluruh surat kabar di Jawa. Selain dari pada itu diterbitkan pula surat kabar Kung Yung Pao berbahasa Cina di bawah pimpinan Oei Tiang Tjoe.

Tindakan pemerintah Militer Jepang itu, ternyata tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai keluar pulau Jawa. Kemudian pada tanggal 2 Pebruari 1943, setelah surat kabar yang berada di bawah pengawasannya beredar, pemerintah pendudukan militer Jepang mengadakan perserikatan (gabungan) surakkabar-suratkabar di Jawa dan diberi nama Jawa Shimbun Kai. Pengurusnya terdiri dari pimpinan Redaksi semua surat kabar yang terbit di Jawa termasuk Jawa Shimbun dan kantor Domei cabang Jawa. Ditunjuk sebagai ketua perserikatan ialah Bunsyiro Suzuki dari surat kabar Jawa Shinbun, sedang Sukarjo Wiryopranoto dari Asia Raya ditunjuk sebagai Ketua Muda atas penunjukan Gunseikan.

Di samping surat kabar tersebut terbit pula majalah seperti : Djawa Baroe, Pandji Poestaka, Seruan Kita yang menerbitkan Seinendan di Jakarta. terbit dua kali sebulan tiap tanggal 10 dan 25. Majalah ini gratis, dan setiap terbit sejumlah 20.000 exemplar. Setelah Indonesia

Merdeka surat kabar Asia Raya untuk sementara masih dapat terbit, tetapi akhirnya pihak Jepang mengadakan larangan tentang berita Proklamasi hal yang demikian menimbulkan pertentangan dan akhirnya pihak Jepang mengadakan larangan untuk terbitnya Asia Raya tersebut.

Sementara itu beberapa orang wartawan Indonesia di bawah pimpinan B.M. Diah berhasil memaksa pegawai - pegawai Jepang untuk meninggalkan percetakan Jawa Shinbun Kai, dan kemudian mereka menerbitkan Surat Kabar Merdeka pada tanggal 1 Oktober 1945. Adapun media masa selain pers, juga siaran radio sangat baik untuk penerangan masyarakat, sekalipun pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang sangat kecil jumlahnya radio tersebut. Tetapi siaran radio ini sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pendudukan Militer Jepang.

Untuk melindungi atau memberantas penerangan - penerangan yang merugikan perjuangan, maka beberapa orang pemuda dan Mahasiswa yang bekerja sebagai wartawan dan bekerja di percetakan berhasil menerbitkan secara gelap Berita Indonesia, suatu surat kabar harian yang pertama kali terbit setelah Proklamasi.

Dalam menyebar luaskan Berita Indonesia itu pegawai Jawatan Kereta Api sangat berjasa sekali. Setelah Indonesia Merdeka kantor Domei di Jawa yang berkedudukan di Jakarta diganti namanya menjadi Kantor Berita Antara atas usaha Adam Malik, Sumanang dan lain-lain.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DKI JAKARTA SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

3.1 Kegiatan Masyarakat yang Relevan dengan ataupun yang merupakan Awal dari Proses Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di Jakarta

3.1.1 Pengibaran Bendera Sang Merah Putih.

Pada saat-saat Jepang dalam keadaan terjepit dari serangan musuh atau Sekutu di mana pada bulan Maret dan April 1945 secara berturut-turut Iwojima dan Okinawa jatuh ke tangan Amerika Serikat, sehingga medan pertempuran semakin mengancam negara Nippon yang sebenarnya. Dengan demikian pemerintah Pendudukan Militer di Indonesia juga turut mengalami kegoncangan-kegoncangan yang mengakibatkan timbulnya perubahan - perubahan dalam kebijaksanaan pemerintahnya. Janji “Kemerdekaan Indonesia” di kelak kemudian hari “seolah-olah akan direalisasikan bahkan pemerintah militer Jepang di Indonesia mengangkat orang-orang Indonesia untuk duduk dalam “Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan” (Dokuritsu Jumbi Coosakai). Di Samping itu, juga diperbolehkan berkibarnya Bendera Sang Merah Putih berdampingan dengan Bendera Hinomaru setiap ada upacara kenegaraan.

Kemudian setelah Badan Penyelidik tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka badan itu dibubarkan dan dibentuk badan baru yang diberi nama "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (Dokuritu Jumbi linkai). Badan ini lebih luas lagi tugasnya sampai untuk menyelenggarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dipercayakan kepadanya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini diketuai oleh Bung Karno, dan Bung Hatta sebagai Wakil Ketuanya. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu oleh Gunaikan pada tanggal 7 Agustus 1945-yang akan diberi tugas untuk meneruskan hasil kerja dari Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu sebenarnya di negara Jepang sendiri telah terjadi peristiwa yang mengagetkan yakni pada tanggal 6 Agustus 1945 Kota Herosima telah di bom atom oleh pihak sekutu. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945 disusul dengan jatuhnya Bom atom di Kota Nagasaki Domei di Jakarta. Bertepatan dengan peristiwa tersebut yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 pasukan Rusia telah masih ke mansyuria terus bergerak merebut Korea dan menyatakan perang kepada Jepang. Ini memunyai arti besar bagi Rusia setelah perang dunia nanti.

Tiba-tiba pada suatu saat Kantor berita Jepang Domai di Jakarta yakni satu-satunya Kantor Berita Jepang yang ta pernah tidak menerima berita dari Tokyo hilang di udara untuk menerima penyiaran berita-berita dari Tokyo hilang di udara untuk menerima penyiaran berita-berita dari Tokyo lagi. Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945. Hali ini satu kejadian yang luar biasa, buat orang-orang yan gberkerja di Kantor (Penyiaran) suara-suara bisikan yang disampaikan dengan diam-diam, dapat diketahui bahwa sejak tanggal 13--14 Agustus 1945 itu Jepang telah siap menghentikan peperangannya dan menyerahkan kepada Sekutu. Resminya diumumkan baru tanggal 14 dan 12 siang.

Bersamaan dengan peristiwa yang terdiri di Negara Jepang itu. Beberapa tokoh Pergerakan Nasional yakni Bung Karno, Bung Karno, Bung Hatta dan Dr. K.T.R. Rajiman Wedyodiningrat pada tanggal Agustus 1945 kelak kemudian haru" Ucapan Terauci pada tanggal

12 Agustus 1945 kepada pemimpin-pemimpin tersebut teracugi pada tanggal 12 Agustus 1945 kepada Pemipinan-pemipinan tersebut antara lain "Bahwa Pemerintah Agung di Tokyo telah memutuskan memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia.

Melaksanakan Kemerdekaan itu terserah kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tuan berdua menjadi pimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Sekembalinya Bung Karno dan Bung Hatta dari Dalat yakni pada tanggal 15 Agustus 1945 mendarat di Lapangan Terbang Kemayoran disarnbut oleh Masa Rakyat Indonesia dengan meriah. Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menyiapkan Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang akan diselenggarakan pada pagi keesokan harinya di Gedung Dewan Sanyo di Jln. Pejambon Jakarta untuk menyelenggarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu pada tanggal 15 Agustus 1945 itu pula para pemuda bersama para Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran, berkumpul di ruang Bakteriologi Pegangsaan. Yang hadir pada pertemuan itu adalah Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nuk, Parjono, Abubakar, Eri Sudewo, Armansyah, Subadio, Suroto Kunto dan beberapa orang lainnya lagi. Pertemuan ini dilanjutkan lagi pada tanggal 15 Agustus 1945 kira-kira pukul 24.00 di Cikini 71. Pada pertemuan ini datang pula beberapa Wakil dan Group lainnya yang tidak hadir dalam perundingannya di Institut Bakteriologi tersebut di antaranya ialah Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor Istimewa, Sukami, Yusuf Kunto dari Groupnya Sukarni, dan Singgih Shodanco dari Daidan PETA Jakarta Dalam pertemuan ini dapat diambil kesimpulan bersama bahwa Kemerdekaan Indonesia tetap dan harus dinyatakan sendiri oleh Rakyat Indonesia dengan tidak menunggu-nunggu kemerdekaan hadiah dari Jepang. Bung Karno dan Drs. Moh. Hatta di bawa keluar kota, supaya mereka terhindar dari Jepang dalam pembicaraan tugas mereka yang historis tentang Proklamasi.

Dengan demikian terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, sehingga terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan Muda ini digerakkan oleh Pemuda Menteng 31 (Sukami, Chaerul Saleh Cs). yang mempunyai hubungan erat dengan Pemuda Pelajar Cikini 71, Mahasiswa Prapatan

10, dan Daidan PETA Jakarta. Pihak Pemuda bersama-sama pasukan PETA akan mengadakan Revolusi merebut Kota Jakarta. Oleh karena itu Bung Karno dan Bung Hatta harus di bawa keluar Kota. Setelah terjadinya Insiden pembicaraan antara Bung Karno dengan pihak pemuda, akhirnya pihak pemuda berhasil membawa Bung Karno (diikuti dengan keluarganya) dan Bung Hatta ke luar Kota. Dari pemuda adalah Sukarni dikawal oleh Pasukan PETA di bawah pimpinan Shodanco Singgih. Ternyata di Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari telah berkibar bendera Merah Putih tanpa didampingi bendera Hinomaru. Memang sejak beberapa hari sebelumnya di Rengasdengklok telah terjadi perebutan kekuasaan, Rakyat Rengasdengklok dan PETA berhasil menguasai seluruh Wilayah di Rengasdengklok. Maka kedatangan tokoh Pergerakan Nasional Sukarno dan Hatta di Rengasdengklok terjamin keselamatanya.

Di luar Kota ini terdapat sebuah Markas PETA di bawah Komandan PETA Codanco Subeno Cudan Rengasdengklok termasuk bagian dari Daidan Purwakarta yang banyak hubungan dengan Daidan Jakarta. Shodanco Singgih mewakili Dewan Jakarta yang banyak mengadakan kontak dengan Daidan Purwakarta dan Cudan Religasdengklok.

Adapun tokoh pergerakan nasional Sukarno-Hatta di Rengasdengklok beristirahat di rumah seorang Cina bernama Jiouw Kie Siong, setelah sebelumnya diterima di Markas PETA Rengasdengklok oleh Shodanco Umar Baksan

Pembicaraan di Rengasdengklok antara pihak Pemuda dengan Sukam tidak berlangsung lama, karena Sukarno telah menyatakan kesediaa memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sukarno-Hatta di jemput oleh Mr. Subarjo, Sudiro (mbah), bersama-sama Yusuf Kunto Sehingga sore harinya tanggal 16 Agustus 1945 rombongan Sukarno Hatta kembali ke Jakarta.

Sekalipun ada perbedaaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, akan tetapi sekembalinya dari Rengasdengklok, ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari antara anggota - anggota PPKI dengan pihak pemuda terus mengadakan rapat untuk

memproses tek Proklamasi di rumah Laksamana Mayeda yang terletak di jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta (dulu bernama Oranye Nassauboulevard). Yang hadir dalam dapat di rumah Laksamana Mayeda itu adalah : Bung Karno Bung Hatta. Mr. Subardjo, Mr. Sutarjo, Mr. Teuku M. Hasan, Mr. Latu harhari, Dr. Rajiman Widiodynamicrat, Dr. M. Amin, Yusuf Kunto, Dr. G S.S. Ratulangi, Mr. I.G. Ketut Puta, Otto Iskandardinata, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Abbas Andi Pangaran Supomo, Chairul Saleh, Sukarni, Dr. Samsi, Dr. Buntaran, M. Andi Sultan Dg. Radja, Hamidhan, dan R. Ripai.

Dalam Rapat itu berhasillah disusun sebuah Naskah “Proklamas Kemerdekaan Indonesia”. Susunan Naskah ini diambilkan dari kelima alinea ketiga rencana perubahan Undang-undang Dasar yang mengenai Proklamasi. Kemudian ditambahkan kalimat yang melengkapi tentang caranya menyelenggarakan Revolusi Indonesia. Penyusunan Naskah ini dilakukan oleh Panitia Lima yang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Subardjo, Sayuti Melik dan Sukarni. Bung Hatta yang mendiktekan Naskah tersebut atas perintah Bung Karno, kemudian Bung Karno yang menuliskannya.

Selanjutnya Naskah Proklamasi akan dibacakan oleh Bung Karno di hadapan masa rakyat Jakarta dan sekitarnya. Sedianya Proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada Jakarta. Barisan pelopor yang bertugas menjaga keamanan telah di Instruksikan oleh pimpinannya yakni Sudiro sebagai berikut :

- a. Supaya dengan berkelompok/berbaris menuju ke lapangan Ikada dan sampai di tempat itu keesokan harinya tanggal 7 Agustus 1945 pukul 11.00 (Jepang = 9.30 jam Indonesia). Sebagai lazimnya saat yang sebenarnya telah saya ajukan setengah jam.
- b. Keperluan menghadiri upacara yang sangat penting tidak ditegaskan untuk Proklamasi.
- c. Tidak perlu membawa panji-panji barisan Pelopor atau Bendera (agar tidak memberi kesempatan pada pihak Jepang mencurigai kita).

Rencana ini rupanya bocor, karena ternyata telah banyak terlihat serdadu Jepang bersenjata lengkap. Kemudian Anggota Barisan

Pelopor segera ditugaskan memasang kertas, dengan Instruksi di lapangan Ikada, agar segera menuju ke rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur untuk melangsungkan upacara penting tersebut.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi teks Proklamasi dibacakan oleh Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta di hadapan masa rakyat Jakarta dan sekitarnya.

Acara yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan disambung dengan pidato singkat dari Bung Karno.
- b. Pengerekan Sang Saka Merah Putih.
- c. Sambutan Wali Kota Suwiryo.
- d. Sambutan Dr. Muwardi (sebagai Kepala Bagian Keamanan).

Lagu Kebangsaan Indonesia, yang secara spontan dinyanyikan oleh hadirin, segera setelah bendera Dwi Warna berkibar di angkasa, sebenarnya tidak tercantum dalam acara. Tidak pula acara pendaftaran "Pasukan Berani Mati" itu baru timbul pada saat setelah Proklamasi dibacakan.

Setelah selesai Pembacaan teks Proklamasi terus diikuti dengan Pengibaran Bendera Sang Merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Yang mengerek bendera adalah Pasukan PETA bernama Latif Hendraningrat Codanco dengan dibantu oleh S. Suhut dari Barisan Pelopor Istimewa.

Dengan demikian berhasillah perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan negerinya dalam cengkraman penjajahan yang kurang lebih selama 350 tahun lamanya. Berakhirlah pembacaan teks Proklamasi tersebut di atas, dengan ditutup pidato singkat oleh Bung Karno, yang menyatakan bahwa sejak saat ini kita telah bebas dari Penjajahan dan mulai hidup dalam alam Kemerdekaan.

3.1.2 Berita Proklamasi Kemerdekaan di Daerah Jakarta

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di pegangsaan Timur no. 56 Jakarta telah diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Untuk

Masa Rakyat Jakarta dan sekitarnya, sebenarnya tidak terkejut lagi adanya berita Pembacaan naskah Proklamasi tersebut. Karena sejak di tandatangan Naskah Proklamasi di rumah Laksamana Mayeda di Jl. Imam Bonjol no. 1 Jakarta (Oranje Boulevard) itu pihak Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa terus mengadakan cara-cara penyegaran siaran-siaran sampai pagi hari.

Dengan cepat dilakukan percetakan kilat (roneo) atas bantuan tenaga rakyat, dan kaum buruh Kantor Berita "Domei" ketika itu. Pekerjaan Percetakan secara kilat ini dapat diselesaikan beribu-ribu surat sebaran pada pagi buta tanggal 17 Agustus itu.

Di samping penyebaran Proklamasi ini, rakyat seluruh kota dikerahkan bersama-sama pada jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 untuk mendengarkan sendiri pembacaan Proklamasi itu oleh Bung Karno di halaman rumah kediamannya di Pegangsaan Timur. Benar setelah selesai diproklamasikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka dengan giatnya polisi - polisi Jepang hendak menghalang-halangi penyebaran Proklamasi itu, usaha mereka tidak berhasil. Malahan penyebaran lebih banyak lagi terjadi. Di satu tempat mereka punguti bersih, tetapi di lain tempat sudah merata meluas lagi penyebaran tersebut. Demikianlah kegiatan dan besarnya kemauan serta keyakinan rakyat membantu Penyiaran Proklamasi tersebut.

Akhirnya dengan kemauan sendiri dan dengan keteguhan keyakinan kaum buruh di Kantor Berita Domei di Jakarta, maka dapatlah penyiaran Proklamasi itu disiarkan ke seluruh Indonesia dan boleh disebutkan ke seluruh dunia melalui udara. Kira-kira setengah jam kemudian barulah diketahui oleh Jepang di Domei dan di kantor-kantor Jepang lainnya, bahwa Proklamasi itu sudah melayang di udara. Dengan cepat pucuk pimpinan Militer Jepang di Jakarta mengadakan tindakan dengan memerintahkan kepada Domei untuk menarik berita itu dengan keterangan bahwa berita itu keliru. Sejak tanggal 17 Agustus itu Jepang mendesak Bung Karno - Hatta supaya melakukan sidang lengkap dari Panitia Persiapan Kemerdekaan dan supaya meneruskan rencana "Kemerdekaan Hadiah" setidak - tidaknya menyesuaikan langkah dengan rencana Gunsaikanbu.

Bagi rakyat Jakarta setelah mendengar pembacaan naskah Proklamasi dengan spontan mengadakan pawai keliling Ibukota yang dimulai dari siang hari setelah selesai upacara Pengibaran Bendera di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.

Sehari setelah pembacaan Proklamasi masih diteruskan pawai keliling Ibukota Jakarta, melalui depan Gedung Proklamasi yang masih sempat diterima oleh Bung Karno, Mr. Latuharhary Ibu Fatmawati dan lain - lain. Pawai tersebut merupakan pawai spontanitas rakyat Jakarta dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dari pagi sampai malam hari pawai terus berlangsung mengelilingi kota Jakarta sampai jauh masuk ke pedalaman, dengan maksud untuk menyebarluaskan Proklamasi

Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu pula terjadi insiden bendera yakni banyak bendera Hinomaru diturunkan dan diganti bendera Merah Putih. Juga sudah dimulai perebutan alat komunikasi secara kecil - kecilan seperti menduduki Kantor-kantor jawatan kereta api, kntor telpon dan kantor siaran Radio. Tetapi sejauh itu belum terjadi peristiwa fisik yang berarti karena banyak masa rakyat yang mundur teratur mengingat Jepang masih mempunyai kekuatan militernya secara lengkap. Meskipun demikian masa rakyat Jakarta yang digerakkan oleh pemuda, tetap menyusun taktik dengan menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan gerakan yang lebih baik.

Untuk selanjutnya masa rakyat Jakarta menginginkan agar semua yang berbau Jepang disingkirkan. Gerakan ini diatur oleh Komite Van Aksi yang bermarkas di gedung Menteng 31. Dalam rapat tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menghasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan Politik bagi Indonesia Merdeka. Keputusan itu adalah :

- a. Mengesahkan Undang-undang Dasar Negara.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta.
- c. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Rapat tersebut terhitung rapat yang pertama kali setelah Indonesia merdeka, rapat ini bertempat di Gedung Pejambon Jakarta. Kemudian untuk menghilangkan semua yang berbau Jepang, maka PPKI mengadakan sidang hari kedua yakni tanggal 19 Agustus dengan membentuk 12 Departemen, dan sekaligus menunjuk para Pemimpin Departemen serta menetapkan pembagian Wilayah Negara Republik Indonesia (RI). Dan sidang hari ketiga mengenai tentara kebangsaan. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno dalam pidato Radionya mengatakan berdirinya tiga badan baru yakni : Komite Nasional Indonesia (KNI), Panitia Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Selanjutnya Komite Nasional Indonesia mengadakan Rapat yang Pertama diselenggarakan di Gedung Komdi Pasar Baru tanggal 29 Agustus 1945 malam. Atas desakan pemuda-pemuda karena anggota-anggota KNI pusat itu luas sekali, akhirnya diputuskan untuk membentuk badan pekerja. Dan selanjutnya Pimpinan KNI Pusat dipegang oleh Sutan Syahrir.

3.1.3 Pembentukan KNI di Daerah Jakarta

Negara Republik Indonesia telah ditetapkan bersama-sama dengan Undang-undang Dasar pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian dalam aturan peralihan disebutkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945 aturan peralihan pasal IV).

Komite Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta mengeluarkan maklumat sebagai berikut :

- a. Mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Y.M.E.
- b. Menjaga nama dan kehormatan bangsa dengan menjauhkan segala pikiran dan perbuatan yang jahat-jahat dengan memegang teguh ketentraman.
- c. Hendaknya hidup seperti biasa sehari-hari bekerja dan terus membuka perusahaan, toko-toko dan warung-warungnya masing-masing.

Bagi rakyat biasa yang tidak mengerti akan percaturan di Jakarta, kedua maklumat pertama itu memberi keyakinan bahwa Republik Indonesia sudah berdiri dengan teratur dan Sukarno-Hatta telah menerima Pemerintahan dari tangan Jepang. Padahal dalam kenyataan Jepang masih lengkap dalam Organisasi Pemerintahan maupun Militernya. Pada masa itu sebenarnya di Jakarta terjadi Pemerintahan rangkap yakni sebagai pusat administrasi Pemerintahan Republik Indonesia dan Pusat dari Pemerintahan Militer Jepang yang tinggal menunggu waktu pembubarannya.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 berkumpul seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama-sama pemukapemaka rakyat lainnya di Prapatan 10 Jakarta. Dalam pertemuan itu dipimpin oleh Adam Malik untuk pembentukan Komite Nasional sebagai Badan sementara, seperti yang telah diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu pembicaraan yang cukup menarik adalah Sutan Syahrir. Di antaranya menyatakan bahwa sangat dibutuhkan sekali adanya suatu badan yang dapat mengkoordinasi perjuangan. Golongan Pemuda mendengar perkataan Sutan Syahrir bersedia melaksanakannya, karena dianggap mempunyai pandangan yang luas kemuka dan cukup mampu untuk itu.

Tentang berita-berita dari Jakarta tersebut akan terus menggerakkan semangat dan aksi di seluruh kepulauan di Indonesia.

- a. Maka dengan terbentuknya Komite Nasional di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta, yang dengan tujuan membulatkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Kemerdekaan Indonesia, yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat.
- b. Komite Nasional Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada KomiteKomite Nasional di daerah.
- c. Komite Nasional Pusat, dan daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang anggota Pengurus.

Untuk pertama kali Ketua pusat ditetapkan oleh pemimpin besar Ir. Sukarno. Kemudian pada pelantikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dari hasil rapat yang diselenggarakan di Gedung Komidi Jakarta memilih Pimpinan Pusat Komite Nasional sebagai berikut :

Mr. Kasman Singodimejo	:	Ketua Eksekutif Komite sebagai Ketua Pusat Komite Nasional.
Mr. Sutarjo (Jakarta Syuutyokan)	:	Sebagai wakil ketua I.
Mr. Latuharhary	:	Sebagai Wakil ketua II.
Adam Malik	:	Sebagai Wakil ketua III.

Dalam Pelantikan Pimpinan Pusat Komite Nasional tersebut diteruskan dengan ucapan sumpah Anggota-anggotanya yang bunyinya sebagai berikut :

Kami segenap anggota komite Nasional Pusat berjanji mencurahkan segala pikiran, tenaga, harta benda dan jiwa raga untuk Negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka yang adil, kekal, kemakmuran berdasarkan kedaulatan rakyat.

Di daerah Jakarta sendiri untuk sementara sebelum ada penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, Pimpinan atas pemerintahan daerah kota Jakarta dijalankan oleh Suwiryono sebagai Pemimpin umum dan wakilnya adalah Bagindo Dahlan Abdullah, sedang Sekretaris kotanya ialah Suratno Sastroamijoyo. Oleh karena itu sejalan dengan pembentukan Komite Nasional Pusat tersebut, kemudian untuk Jakarta dibentuk pula sebuah Komite Nasional Daerah Kota Jakarta dengan diketuai oleh Mr. Mohammad Roem, dan dibantu dengan 54 anggota antara lain :

1. H. Ahmad Carawardana.
2. Moh. Baseri.
3. Mr. Asmaun.
4. Mr. Dahlan.
5. Nurasyid.
6. Nn. R.A. Minarsih Wiranata Kusumah.
7. O s m a n.
8. Oebeid.
9. R.M.S. Mangkudiputra.
10. R. Soemarjono.
11. R. Gatot Sutadipraja.
12. R. NoeharAm A. Soetrisna
13. R. Sukario.
14. Ramelan.

15. Sri Yuliani.
16. Supadi Natosuparto.
17. Sumarji.
18. Soeprapto.
19. Syawal.
20. Suryasumirat.
21. St Sanif.
22. Sabikin.
23. Syamsudin Saat, dan lain-lain.

Anggota-anggota yang menjadi badan Eksekutif ialah :

1. Noor St. Iskandar.
2. Y. Yahya.
3. S u p r a n o t o .
4. Boerai

Komite Nasional Daerah akan dimasukkan dalam pemerintahan Daerah yaitu sebagai Badan Legislatif, selanjutnya diputuskan pula bahwa Komite Nasional Daerah dengan fungsinya yang baru ini hanya akan diteruskan di daerah-daerah Karesidenan, Kabupaten, Kota dan desa otonom.

Demikianlah pada tanggal 23 Nopember 1945 keluarlah Undang-undang 1945 no. 1 yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Undang-undang ini bermaksud mengatur dan memberi ketegasan lebih lanjut terhadap kedudukan Komite Nasional Daerah untuk sementara waktu sebelum diadakan Pemilihan Umum. Tetapi pada hakekatnya Undang-undang 1945/I itu dapatlah dianggap suatu peraturan perundangan desentralisasi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan perundangan desentralisasi Republik Indonesia itu, isinya sangat singkat yaitu hanya terdiri dari 6 pasal :

- Pasal 1 : Undang-undang 1945/I itu dinyatakan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan di Karesidenan, Kabupaten, dikota berotonomi dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negri

- Pasal 2 : Menetapkan bahwa Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya.
- Pasal 3 : Menentukan bahwa oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang untuk menjadi Badan Eksekutif yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan Pamerintahan sehari-hari dalam Daerah itu. Biaya untuk Komite Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Dengan demikian maka Wali Kota Jakarta Suwiryo selain menjabat Badan Eksekutif juga menjabat Badan Legislatif. Disamping Jabatan tersebut Kepala Daerah Suwiryo memegang pula Pimpinan atas Korps. Pamongpraja dan Kepolisian di Kota Jakarta.

3.2 Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah DKI.

3.2.1 Sikap Pasukan Jepang

Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, maka sebenarnya sejak itu pulalah berakhir kekuasaan jajahannya terutama Kekekuasaan Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Indonesia. Sekutu telah menentukan syarat-syarat yang harus di pikul oleh Jepang setelah kalah perang tersebut. Syarat itu tercantum dalam sebuah keterangan yang dibuat oleh sekutu pada tanggal 26 Juli 1945 di Postdam (dekat Berlin) yang terdiri dari 13 pasal. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa sesudah kalah perang dibolehkan memelihara Industrinya, kecuali industri yang memungkinkan Jepang mempersenjatai diri kembali. Deklarasi Postdam inilah yang mendorong Jepang untuk menerima syarat-syarat dari Sekutu untuk menghindarkan dari kehancuran total.

Dari tanggal 15 Agustus 1945 sampai 2 September 1945 tidak boleh terjadi penyerahan di Indonesia menurut Pemerintah Jendral

Mac Arthur. Sehingga dengan demikian kedudukan Jepang hanyalah sebagai alat Sekutu, untuk menjaga keamanan di daerah-daerah jajahannya sampai pengambilalihan secara resmi oleh pihak sekutu, masih, utuh dan lengkap.

Seperti juga ditegaskan oleh pihak Gunseikanbu kepada Bung Hatta tanggal 16 Agustus 1945 malam, bahwa Jepang adalah juru kuasa Sekutu di Indonesia. Oleh karena itu sikap Jepang terhadap perjuangan rakyat Indonesia bersifat mencegah dan menghalang-halangi. Sekalipun Jepang telah pernah membentuk sebuah Badan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, akan tetapi dengan adanya Kapitulasi Jepang terhadap Sekutu itu, maka Jepang tidak ada hak lagi untuk membantu terselenggaranya Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu perjuangan rakyat Indonesia sudah sampai puncaknya, dan sukar untuk dibendung. Pemuda-pemuda yang tergabung dengan pemuda Menteng 31 bersama-sama dengan Mahasiswa Prapatan 10 dan PETA yang masih bersenjata lengkap siap menghadapi kemungkinan yang terjadi, setelah kita memberanikan untuk memproklamasikan Kemerdekaan atas usaha sendiri. Sehingga benar atas kerja sama antara golongan tua dan yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan pihak pemuda tersebut, akhirnya berhasillah dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.

Gunseikan berusaha untuk menggagalkan berita Proklamasi dengan cara menarik pemberitaan dari Kantor berita DOMEI bahwa siaran tentang Proklamasi itu dinyatakan keliru. Sementara itu angkatan muda di kota Jakarta berusaha untuk merebut seluruh Instansi pemerintah dan alat-alat komunikasi di Ibukota dan sekitarnya.

Dengan telah disyakkannya Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tangag 18 Agustus 1945, berarti Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia telah dapat berjalan berdasarkan Undang-undang tersebut. Apalagi bersamaan dengan itu ditunjuk pula Presiden dan Wakil Presiden yakni Bung Karno dan Bung Hatta dan kemudian ditetapkan pula Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia termasuk aparat-aparat Pemerintahannya. Dengan demikian lengkaplah persyaratan Pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Selanjutnya Perjuangan rakyat Indonesia adalah mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru saja di proklamirkan itu dari ancaman penjajah manapun juga. Sudah dapat dibayangkan bahwa penjajah Belanda pasti akan kembali lagi, dan juga Jepang meskipun sudah kalah perang tetapi masih mendapat tugas oleh sekutu untuk menjaga keamanan dan keutuhan bekas Wilayah Pendudukan.

Perjuangan rakyat Jakarta dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 19 Agustus 1945 berhasil sangat memuaskan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tercapai, begitu pula Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia berjalan lancar. Dapat dikatakan sampai saat ini tidak terjadi peristiwa-peristiwa fisik yang berarti di Jakarta.

Meskipun demikian Pemuda yang tergabung dalam Komite Van Aksi yang bermarkas di Menteng 31, beranggapan bahwa di Ibukota masih perlu diusahakan untuk suatu Gerakan merebut Kekuasaan yang masih ditangan Jepang. Pada tanggal 20 Agustus 1945 diadakan gerakan merebut senjata dari tangan Jepang, serta pelucutan senjata PETA untuk pihak perjuangan Indonesia dan bukan sebaliknya pelucutan senjata untuk diberikan kepada lawan. Kemudian juga pada tanggal 20 Agustus 1945 malam diikrarkan ketiga kalinya, dengan isyarat penembakan dari Kemayoran serta pembakaran rumah penduduk di beberapa tempat. Tetapi karena belum ada kerja sama yang baik dari kelompok PETA dan Heiho, juga belum Bergeraknya masa rakyat Jakarta dan sekitarnya maka usaha ini dapat digagalkan oleh Jepang.

Jadi boleh dikatakan Ibukota yang mecetuskan Proklamasi tidak berhasil merebut kekuasaan di Jakarta, karena kekurangan pasukan pelopor yang gagah perwira untuk menggerakkan masa yang telah siap sedia untuk cepat bertempur. Lebih-lebih karena tidak ada komando untuk berontak yang diucapkan oleh Daidanco Kasman Singodimejo atau dari Sukarno Hatta. Maka usaha untuk merebut Ibukota yang digerakkan oleh pemuda itu, mudah ditumpas oleh Jepang.

3.2.2 Hambatan-hambatan yang Terjadi di Jakarta

Dalam Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia di daerah Jakarta, ternyata mengalami hambatan-hambatan yang cukup berat. Sekalipun Kota Jakarta telah berhasil dijadikan pusat administrasi pemerintahan republik Indonesia, akan tetapi dari pihak Jepang masih pula menghalang halangi. Di tiap-tiap instansi pemerintahan masih berkibar bendera Hinomaru (bendera Jepang). Sekalipun status Jepang di Indonesia tinggal sebagai alat sekutu yakni untuk menjaga keamanan Indonesia jangan sampai berubah dari status quo, hingga menunggu datangnya pasukan sekutu untuk mengadakan Kapitulasi secara resmi.

Suasana seperti tersebut di atas sudah pasti mengganggu jalannya Pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja didirikan. Karena itu pemuda-pemuda berusaha untuk merebut, menduduki kantor-kantor dan alat alat komunikasi yang vital. Gerakan pemuda ini tergabung dalam Komite Van Aksi yang bermarkas di Gedung Menteng 31. Pada mulanya "Komite Van Aksi ini berkantor berpindah-pindah. Sejak dari berdirinya tanggal 1 Agustus 1945 pernah menempati Gedung untuk markasnya di Prapatan 10.

Kemudian baru pada tanggal 22 Agustus 1945 mereka pindah ke Menteng 31. Gedung ini memang sejak bulan Juli 1942 diberikan oleh Sendenbu kepada pemuda-pemuda untuk digunakan tempat pendidikan. Pemuda dalam menyokong perang Jepang melawan Sekutu. Karena kelihaihan dari tokoh-tokoh Pergerakan Nasional, akhirnya pemuda-pemuda Menteng 31 tersebut dapat diputar balikan untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sinilah terdapat pemuda-pemuda yang progresif revolusioner, untuk perjuangan mencapai cita-cita nasional. Oleh karena itu dengan masuknya kembali pemuda-pemuda yang tergabung ke dalam Komite Van Aksi berarti lebih mantapnya peranan gedung Menteng 31 dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan dan Pengurus Komite Van Aksi terdiri dari :

1. Ketua Umum : Sukarni
2. Wakil Ketua I : Chairil Saleh
3. Wakil Ketua II : W i k a n a

- | | | | |
|-----|---------|---|---------------------|
| 4 | Anggota | : | Adam Malik |
| 5. | Anggota | : | Pandu Kartawiguna |
| 6. | Anggota | : | Maruto Nitimihardjo |
| 7. | Anggota | : | Kusneini |
| 8. | Anggota | : | Johar Nur |
| 9. | Anggota | : | D a r w i s |
| 10. | Anggota | : | A.M. Hanafi |
| 11. | Anggota | : | Armunanto |

Selanjutnya Komite Van Aksi membentuk bagian atau sub. komite untuk menjalankan tugas masing-masing. Urusan khusus dipegang oleh Sukarni, dibantu oleh Chairul Saleh. Urusan Pemerintah dan soal-soal luar negeri dipegang oleh Adam Malik. Urusan Sekretariat dipegang oleh A.M. Hanafi. Urusan Penyelidikan dan penghubung dipegang oleh Armunanto. Di samping itu badan-badan lain juga didirikan :

- a. Angkatan Pemuda Indonesia (A.P.I.) untuk Pemuda, Ketuanya Wikana dan Wakil Ketua Chairul Saleh.
- b. Barisan Buruh Indonesia (B.B.I.) untuk Buruh Ketuanya Kusnaini dan Wakil Ketua Pandu Kartawiguna.
- c. Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk rakyat tani. Ketuanya Maruto Nitimihardjo dan Wakil Ketua Syamsudin Tjan.
- d. Barisan Pengemudi Beca yang digerakkan oleh Chalid Rasjidi.

Supaya persatuan antara mereka makin kokoh maka perlu adanya suatu program. Maka disusunlah program pertama, yang kemudian disiarkan keseluruh Indonesia dengan menggunakan surat selebaran yang diberi nama Suara Rakyat,, Selebaran Suara Rakyat ditulis dalam bahasa Indonesia berupa stensilan yang dibuat berpuluh ribu jumlahnya. Suara Rakyat ini dibuat secara diam-diam, dan melalui gerakan di bawah tanah dikirim ke darah-daerah. Suara Rakyat edisi pertama terdiri dari tiga lembar yang isinya sebagai berikut :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah Merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing.

Pengaruh Komite Van Aksi dari Menteng 31 mendapat sambutan di seluruh Jakarta, dan sekitarnya bahkan menjalar keseluruh

Indonesia Perjuangan makin lama makin berat, karena Jepang makin bersifat menentang aksi rakyat Indonesia. Tetapi walaupun demikian pemuda-pemuda di bawah Komando Komite Van Aksi dan Komando Perjuangan rakyat lainnya tidak gentar menghadapi tantangan itu Sementara itu Pelopor Sekutu telah muncul di beberapa tempat di Jakarta dan siap untuk mendarat. Radio Sekutu terus menerus memberi ancaman kepada kaki tangan Jepang dan menuduh Jepang penjahat Perang.

Rombongan Wakil tentara Sekutu yang pertama-tama datang di Jakarta ialah regu kecil yang dipimpin oleh Mayor Greenhalgh. Rombongan ini mendarat dengan parasut di Jakarta pada tanggal 8 September 1945. Tujuannya ialah untuk mengadakan Pembicaraan-pembicaraan dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta, juga bertugas untuk melihat dari dekat perkembangan terakhir di Indonesia. Walaupun telah diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya, Greenhalgh memberikan laporan yang lain kepada atasannya. Dilaporkan olehnya bahwa bangsa Indonesia sebenarnya acuh tak acuh terhadap politik dan gerakan kemerdekaan. Kaum Nasional organisasinya buruk dan apa yang ada bukannya Proklamasi Kemerdekaan tetapi tindakan anarkhi yang dilakukan oleh sekelompok kecil kaum Nasionalis Indonesia. Kemudian menyarankan kepada atasannya agar pengangkutan pasukan Sekutu dapat segera dilaksanakan supaya tugas-tugas utamanya dapat segera diselesaikan.

Beberapa hari kemudian yakni tanggal 16 September 1945 menyusul kapal penjelajah Cumberland yang mendaratkan kapalnya dengan membawa pasukan dibawah pimpinan Laksamana Muda W. R. Patterson.

Melihat situasi kota Jakarta yang makin panas ini, pihak pemuda tidak gentar, bahkan terus mengatur barisan perjuangan. Beberapa tempat penting telah diduduki, tetapi sangat terasa sekali perlunya kekuatan pejuang diperlengkapi dengan senjata, Sebab dengan kekuatan pejuang bersenjata inilah, kita baru dapat mengimbangi kekuatan musuh

3.2.3 Partisipasi Masyarakat Jakarta

Kota Jakarta yang berpenduduk cukup padat bila dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia lainnya, maka meskipun statusnya hanya Kota, akan tetapi diistimewakan karena memang sejak dari penjajahan Belanda sampai dengan Republik Indonesia, dapat memainkan peranannya sebagai Ibukota Negara maupun kota perjuangan. Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, sudah selayaknya bila penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa di seluruh Indonesia. Adapun Ibukota Jakarta sebagai Kota perjuangan karena memang Jakarta tempat tercetusnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada saat-saat bangsa Indonesia melengkapi persyaratan berdirinya Negara Indonesia. Maka Jakarta lah tempat untuk memproses Undang-undang Dasar Negara dan aparat pemerintahan serta bentuk dan dasar negara Indonesia jauh dari pada itu bahwa sejak awal abad ke 20 Jakarta merupakan tempat pencetus idea (cita-cita) Pergerakan Nasional ialah Indonesia Merdeka. Seperti berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah suatu bukti bahwa partisipasi rakyat Jakarta sangatlah besar terhadap berdirinya Negara Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu dengan terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia yang tepatnya berdiri tanggal 17 Agustus 1945, serta dimantapkannya dengan adanya Undang-undang Dasar dan lengkap dengan aparat pemerintahannya, maka masyarakat Jakarta sanggup berdiri tegak untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia dari ancaman manapun juga.

Seperti telah disebutkan pada bagian muka tadi bahwa beberapa hari setelah Indonesia Merdeka, di Jakarta berdiri beberapa badan Perjuangan. Hal ini sangat diperlukan karena Negara yang baru Merdeka itu belum mempunyai tentara Nasional yang teroganisasi secara baik. Memang pada zaman Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Indonesia, sudah banyak pemuda-pemuda kita yang mendapat pendidikan kemiliteran seperti Seinendan, Keibodan, PETA, Heiho dan sebagainya bahkan banyak pula bekas KNIL pada zaman penjajahan Belanda. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya merupakan modal utama kekuatan phisik di Indonesia. Akan tetapi

sebelum terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, maka badan-badan perjuangan sangat diperlukan.

Untuk masyarakat Jakarta terutama pemuda-pemudanya menyatukan diri dalam bentuk Komite Van Aksi yang bermarkas di Gedung Menteng 31 di bawah pimpinan Sukarni, Adam Malik, Chairul Saleh, Maruto Nitimiharjo dan lain-lain, terus melancarkan gerakannya mengobarkan semangat perjuangannya dengan merebut dan menduduki tempat-tempat yang penting untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Republik Indonesia. Badan-badan perjuangan yang bernaung dibawah Komite Van Aksi adalah angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).

Pembentukan badan-badan perjuangan ini tidak terbatas di Jakarta akan tetapi terus diikuti di seluruh Indonesia. Sepertinya Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hisbullah, Sabillillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), dan lain sebagainya.

Badan perjuangan yang bersifat khusus adalah kesatuan-kesatuan Pelajar, Tentara Pelajar, Tentara Genie Pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), yang hubungannya dengan Tentara Reguler lebih dekat.

Salah satu badan perjuangan yang mempunyai sistem tersendiri dalam pembentukannya ialah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sistem pembentukannya mengikuti jalan hirarkhi kepamongpraajaan yang ada, baik di tingkat pusat sampai di tingkat Daerah yang terkecil. Di tiap rukun tetangga kita dapati tiga orang anggota BKR, kemudian meningkat kepada rukun kampung, di Kecamatan, di Kawedanaan dan akhirnya pusat BKR sebagai pusat kota. BKR Jakarta Raya dibentuk pada tanggal 1 September 1945, pucuk pimpinannya dipegang oleh Muffreini Mukmin. Didalam Perusahaan yang penting dibentuk pula BKR-BKR setempat, dengan sistem yang demikian tersebarlah anggota BKR kesegenap penjuru daerah dan apabila saatnya telah tiba yaitu saat untuk mengadakan tindakan dan perlawanan, mereka dapat digerakkan sekaligus, mengikuti komando yang diberikan oleh Pimpinan Pusat.

Masih ada lagi badan Perjuangan Rakyat Jakarta yang betul-betul dari lapisan masyarakat paling bawah ialah Barisan Pengemudi Beca yang digerakkan oleh Pemuda Menteng 31 di bawah pimpinan Chalid Rasjidi. Badan Perjuangan ini dalam jumlah besar dan sangat kompaknya. Semua Badan Perjuangan pada masa itu timbul dengan kesadaran tanpa pamrih tetapi dengan kerelaan berkorban untuk Negara dan Bangsa Indonesia.

3.3 Pembentukan Organisasi Kemiliteran (perjuangan Bersenjata) di Daerah DKI Jakarta.

3.3.1 Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Jakarta.

Berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 23 Agustus 1945 yang ditujukan kepada seluruh Rakyat Indonesia berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Untuk menyusun Negara yang akan menghadapi dunia internasional karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho dan pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia”.

Dengan adanya badan-badan perjuangan, BKR lokal dan kemudian BKR secara resmi diinstruksikan oleh pemerintah tersebut di atas, jelaslah bahwa kekuasaan harus sepenuhnya di tangan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu dengan secepat mungkin semua alat-alat yang berhubungan dengan pemerintahan direbut dan dikuasai oleh bangsa Indonesia

Langkah pertama adalah merebut alat-alat komunikasi yang sangat berhubungan dengan jalannya pemerintahan terutama dalam bidang ekonomi, penerangan, perkantoran dan sebagainya. Dalam bidang perekonomian yang sangat menentukan pada masa itu adalah jawatan kereta api, perkebunan, pabrik-pabrik dan lain-lain. Adapun dalam bidang penerangan adalah kantor berita, pemancar radio dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang perkantoran ialah kantor pos

besar, kantor telpon, kantor instansi pemerintah lainnya yang sangat vital.

Pada tanggal 1 September 1945 Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera sang Saka Merah Putih terus menerus di seluruh Indonesia, dan salam kemerdekaan ditetapkan dengan “ Merdeka “. Sejak diumumkan keputusan Pemerintah ini maka mulailah perang bendera dan perang lencana Merah Putih diseluruh Indonesia. Di kota Jakarta perang bendera dan perang lencana ini makin membakar revolusi. Di tiap rumah, gedung dan bangunan-bangunan lainnya dikibarkan bendera Merah Putih. Bendera Hinomaru diturunkan dan diganti Sang Merah Putih. Terjadilah insiden bendera di mana-mana.

Kemudian pada tanggal 3 September 1945 terjadilah perebutan alat perhubungan yang banyak mendatangkan keuntungan dalam bidang perekonomian alat perhubungan ini ialah Jawatan Kereta Api Badan Perjuangan yang tergabung dalam Komite Van Aksi sebagai penggerak utama dalam peristiwa perebutan ini. Pada mulanya Djohar Nur dari Komite Van Aksi, datang menemui Pemuda-pemuda kereta api. Pada tanggal 2 September 1945, Johar Nur menemui Legiman Haryono untuk membicarakan tentang caranya mengambil alih Jawatan Kereta Api dari Jepang ketangan Republik Indonesia. Kemudian diadakan rapat di sebuah rumah dekat stasiun Manggarai Jakarta. Dalam rapat ini hadir antara lain Johar Nur, Maruto Nitimihario, Kusneini, Armansyah, Ma'riful, Pandu Kartawiguno, Kusnandar dan lain-lain.

Dari kalangan Pemuda kereta api hadir antara lain Legiman Haryono, Niinan, Sutrisno, Sugandi, Suyatmang Aji Nur, Zulkifli, Suwignyo dan lain sebagainya. Pada masa itu yang menjadi pimpinan Serikat Buruh Kereta Api yaitu Mr. Sanyono dan Mr. Hindromartono kedua-duanya sangat mendukung rencana tersebut di atas. Juga dalam pelaksanaan perebutan harus mengikut sertakan dua orang pejabat penting dan lainnya, Kereta Api yaitu Sugiri dan Ir. Abdul Kadir.

Dari hasil rapat sejak siang sampai malam hari itu, hasilnya telah menghasilkan kebulatan pendapat dan menentukan pimpinan dalam perebutan Jawatan Kereta Api itu adalah Johar Nur, Kusnandar, Sidik

Kedapad, M. Hasan Goyo, Armansyah dan lain-lain dari pemuda Menteng 31. Sebagai langkah pertama direbut terlebih dahulu Stasiun Kota, kemudian Stasiun tram listrik Kramat Raya dan selanjutnya seluruh stasiun kereta api seluruh wilayah Jakarta. Perebutan ini berjalan dengan lancar, tanpa ada perlawanan yang berarti dari Pihak Jepang. Hanya dalam waktu satu hari yakni tanggal 3 September itu seluruh jaringan kereta api di Jakarta telah dikuasai oleh pihak Republik Indonesia dan sekaligus diangkat Sugandi dan Suyatman sebagai Pemimpin Jawatan Kereta Api yang baru menggantikan orang-orang Jepang. Sejak pengambil alihan Jawatan Kereta Api di Jakarta, maka untuk di daerah-daerah lainnya tidak ketinggalan mengadakan gerakan yang sama, dengan demikian lancarlah usaha untuk mengadakan keseluruhan Pulau Jawa, bahkan keluar Jawa.

Bersamaan dengan pengambil alihan Jawatan Kereta Api pada tanggal 3 September 1945 tersebut, diambil alih pula Kantor Berita "Domei" dan diganti namanya menjadi Kantor Berita ANTARA milik Republik Indonesia. Pengambil alihan Kantor Berita ini oleh Adam Malik, Sumanang, Pandu Kartowiguno, Maruto Nitimiharjo, Sipahutar dan lain-lain. Aksi pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang ke Republik Indonesia selanjutnya ialah siaran radio, Jawatan Pos Telpun Telegram (PPT) di Pasar Baru dan percetakan uang G. Kolf. Co. Mengingat orang-orang Jepang masih tetap berniat menduduki posisi-posisinya semula, sehingga akhirnya orang-orang Jepang banyak ditangkap dan ditampung di Tanah Abang Timur sebagai interniran.

Kemudian pada tanggal 29 September 1945, secara resmi Suwiryo diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wali Kota Jakarta Raya dengan menduduki Balai Agung Kota di Gambir Selatan.

3.3.2 *Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (BKR Kelaskaran) di Daerah Jakarta.*

Dalam rapat tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan soal-soal :

- a. Komite Nasional.
- b. Partai Nasional Indonesia, dan
- c. Badan Keamanan Rakyat.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga Badan baru tersebut yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ini akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah, Pimpinan Pusat BKR tidak diadakan.

Pidato Presiden Sukarno tersebut mendapat sambutan dua macam dari Pemuda-pemuda seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada umumnya timbul kekecewaan bahwa Pemerintah tidak segera membentuk sebuah Tentara Nasional. Tetapi sebagian besar Pemuda terutama yang ex. anggota PETA, KNIL, dan Heiho, artinya Pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman Militer, memutuskan untuk membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangannya.

Di Kota Jakarta sebelum ada Badan Keamanan Rakyat, lebih dulu telah didirikan sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang, Badan ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1945 yang bertujuan untuk menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan. Dalam garis-garis besarnya akan mementingkan yang pokok-pokok terlebih dahulu Oleh karena itu satu bagian yang sedang juga sudah dapat dengan segera bekerja ialah Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Patokan, cara bekerjanya adalah sebagai berikut :

N A M A

Pasal 1

Sebagai Ibu organisasi yang harus mengerjakan dan memelihara keselamatan masyarakat, maka didirikan satu badan yang diberi nama Badan Penolong Keluarga Korban Perang”.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itu adalah satu, maka dari itu “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” diadakan satu bagian yang bernama “Badan Keamanan Rakyat”.

Pengurus Badan Keamanan Rakyat

Pasal 3.

Kepala-kepala “Badan Keamanan Rakyat” dari pusat sampai ke daerah-daerah menjadi anggota Pengurus Harian dari : “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”.

Dasar Pembentukan

Pasal 4

Yang mengepalai Badan Keamanan Rakyat “ harus menjalankan pekerjaannya dengan “Sukarela”

Panggilan

Pasal 5

Mereka yang mau dan ingin membantu pekerjaan “Badan Keamanan Rakyat akan dipanggil pada tanggal 24 Agustus 1945 (1945).

Di **Ken-Ken** panggilan ini akan diselenggarakan oleh “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”.

Susunan Pimpinan

Pasal 6.

1. Di **Syuu-syuu** Pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat syuu.
- 2- Di **Ken**, atau **Shi** Pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakyat **Ken** atau **Shi**.

Di dalam perusahaan-perusahaan yang penting, dibentuk pula BKR-BKR setempat, dengan sistem yang demikian tersebarlah anggota BKR kesegnap penjuru daerah dan apabila saatnya telah tiba yaitu saat untuk mengadakan tindakan dan perlawanan, mereka dapat digerakkan sekaligus mengikuti Komando yang diberikan oleh Pimpinan Pusat.

Di Tanjung Priok dibentuk BKR Laut atas prakarsa Pemuda-pemuda Pelabuhan dan Pelayaran maksudnya ialah untuk mengawal

pantai Jakarta, mengamankan lautan dan memberikan perlawanan kepada musuh yang akan mendarat.

Berhubung semakin lama semakin terasa bahwa Republik Indonesia bertambah sering menghadapi bahaya dan ancaman Pasukan Sekutu sudah mulai berdatangan di Wilayah Republik Indonesia. Pertempuran-pertempuran kian sering terjadi. Maka untuk menanggulangi hal itu dirasakan perlunya membentuk sebuah tentara yang teratur. Seorang Putra Indonesia bernama Urip Sumoharjo dipanggil Pemerintah Republik Indonesia. kepadanya diberikan perintah untuk membentuk tentara. Urip Sumoharjo telah memiliki pengalaman luas dalam bidang ketentaraan ia pernah mempunyai pangkat tinggi dalam ketentaraan Belanda. Tetapi setelah Proklamasi Kemerdekaan itu siap membantu perjuangan rakyat. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat Pembentukan tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang meliputi bagian-bagian Darat, Laut dan Udara. Maklumat tersebut dikeluarkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat keamanan, maka diadakan satu tentara Keamanan Rakyat.

Secara lengkap maklumat tersebut berbunyi :

MAKLUMAT PEMERINTAH

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan Satu Tentara Keamanan Rakyat.

Jakarta, 5 Oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
S u k a r n o.

Setelah adanya maklumat seperti tersebut di atas, kemudian Komite Nasional Pusat yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan Pemerintahan, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, maka pada tanggal 9 Oktober 1945 mengajurkan kepada masyarakat dan Badan Perjuangan untuk segera masuk mendaftarkan diri menjadi Tentara Keamanan Rakyat

Anjuran ini biasa disebut “Mobilisasi Umum” yang bunyinya sebagai berikut :

“MOBILISASI TENTARA KEAMANAN RAKYAT”

Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini, oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan Negara Republik Indonesia.

Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, Prajurit Hindia Belanda, dan Heiho, Keigun-Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dan lain-lainnya baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan Militer., supaya secepat-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di Ibukota Kabupaten masing-masing atau pada badan lainnya yang ditunjuk oleh residen (kepala daerah) atau wakilnya.

Merdeka !!

Jakarta, 9 Oktober 1945.
Komite Nasional Pusat
K e t u a,

Mr. Kasman Singodimedjo

Dengan dasar maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Besar Umum oleh Urip Sumoharjo, tetapi berhubung kota Jakarta sudah semakin banyak pasukan Sekutu, maka Markas tersebut berkedudukan di Yogyakarta dengan Pimpinannya ditunjuk Supriyadi.

Sementara itu keadaan kota Jakarta makin kacau, pihak sekutu ternyata terdapat orang-orang Belanda baik Militer maupun Sipil dan lengkap dengan unsur-unsur administrasi Pemerintahan. Sementara itu Jepang juga masih bersikap seperti Penguasa, padahal status Jepang di Indonesia dan khususnya di Jakarta hanyalah sebagai alat Sekutu

belaka. Melihat situasi yang demikian itu, maka para pemuda yang sekarang telah menjadi Tentara Keamanan Rakyat mulai bergerak untuk mengusir penjajah yang kembali menguasai Tanah Air kita.

TKR Laut yang bertugas menjaga pantai Jakarta sangat berat. Langkah pertama adalah mengambil alih kekuasaan pelabuhan dari tangan Jepang. Dengan mendapat bantuan dari buruh Pelabuhan Tanjung Priok maka berhasillah menguasai pelabuhan itu. Kemudian orang Jepang banyak yang ditangkap dan dilucuti senjatanya. Nama-nama TKR Laut ini antara lain ialah M. Hasibuan, Kasaf, Binsar Sitompul, Syamsudin Alwi, Amirudin Juneidi, Ismail Effendi, Timbul Hasibuan, Muhtar, Daulan Hasibuan, Wabidin, Pulung Suganda, Alwi Pasaribu, dan lain-lain.

Penjagaan pantai ini sangat perlu sekali mengingat Jakarta sebagai garis terdepan dari pedalaman Pulau Jawa. Di samping itu Jakarta sebagai Ibukota yang merupakan pintu gerbang masuk ke Indonesia. Memang dalam menghadapi Jepang seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali, ini dapat dimengerti karena Jepang sudah kalah perang dengan Sekutu. Akan tetapi setelah pihak Sekutu mulai melancarkan operasinya sulitlah barisan pejuang itu menghadapinya, karena tidak seimbang persenjataannya. Dengan semakin terdesaknya kekuatan pasukan kita, maka mulailah mengundurkan diri masuk ke daerah pedalaman untuk mengatur siasat dan menyusun kekuatan kembali. Sebaliknya pihak Sekutu mulai dapat menduduki tempat-tempat penting dan hampir sepenuhnya Kota Jakarta jatuh ketangan Sekutu.

Sebenarnya pihak Sekutu yang mempunyai ambisi untuk menguasai Indonesia adalah serdadu-serdadu Belanda yang terdiri dari NICA dan KNIL. Sedangkan pihak Sekutu bangsa Inggris karena mendapat hasutan dari orang-orang Belanda itu akhirnya turut ikut campur juga dalam urusan soal-soal Republik Indonesia, dan akhirnya berbuat keras pula.

3.3.3 Partisipasi masyarakat Jakarta yang berhubungan dengan Palang Merah dan Dapur Umum.

Bagi masyarakat Jakarta terutama kaum wanitanya, telah mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan membantu

penderita korban perang. Baik itu dalam bentuk Palang Merah maupun Dapur Umum. Karena sejak jaman Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang, kaum wanita juga dikenakan **Hoko Sheisin** (semangat mengabdikan), yang bertujuan untuk melayani Perang Semesta Jepang. Tetapi ternyata hasil latihan dan Pendidikan **Hoko Sheisin** itu, dipergunakan oleh kaum Wanita dalam usahanya menolong bangsanya sendiri, dalam rangka mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bentuk dari pada **hokosheisin** itu berupa latihan baris berbaris, pidato-pidato, Pendidikan terhadap anak-anak sekolah dan luar sekolah, membantu keselamatan umum dan kesehatan. Pada gerakan hoko sheisin itu akhirnya kaum wanita mendirikan perkumpulan wanita yang disebut **fuzinkai**. Di samping **Fuzinkai**, dibentuk pula di Jakarta pada bulan Desember 1942 satu barisan istimewa yang disebut Barisan Srikandi. Gerakan wanita ini, ketika meletus revolusi pada tahun 1945 menjadi lebih sadar lagi, mereka ini insyaf bahwa tugas Nasionalnya antara lain dibidang politik harus dilanjutkan. Maka mulailah berdiri laskar-laskar wanita yang terkenal pada masa itu ialah Pejuang Putri Republik Indonesia (LASWI) yang dipimpin oleh Ny. Aruji Kartawinata.

Di samping pejuang-pejuang di Medan Pertempuran, banyak pula yang berjuang dalam bidang Politik antara lain Rangkajo Rosuma Said, S.K. Trimurti, Maria Ulfah, Salawati Daud dan sebagainya.

Untuk mengkoordinasi perjuangan wanita pada masa revolusi itu, maka diadakan kongres wanita pertama pada tanggal 24--26 Pebruari 1946 yang berhasil membentuk badan Gabungan yang bernama Badan Kongres wanita Indonesia (KOWANI). Di antara keputusan kongres ini adalah: menuntut Kemerdekaan 100 persen di belakang Pemerintah. Kemudian dalam Kongres Wanita yang kedua di Madiun dari tanggal 14--16 Juni 1946, diambil keputusan sebagai berikut :

- a. Keluar : Menggabungkan diri sebagai anggota Women's Internasional Democratic Federation (W.I.D.F.).
- b. Kedalam : Segala tenaga dipusatkan kearah pembelaan Negara, seperti mengumpulkan pakaian untuk

prajurit, mengadakan Dapur Umum/pembelaan dan mengirimkan makanan kegaris depan, mengumpulkan emas intan, mengadakan pendaftaran wanita, mobile Colone, Pos-pos PPPK, hiburan bagi prajurit mengurus pengungsian dan PMI.

Di samping itu pada saat-saat pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. mengingat situasi di Jakarta semakin tidak aman, maka pada tanggal 4 Januari 1946 Pusat Pemerintahan Republik Indonesia mengambil kebijaksanaan dan memutuskan untuk memindahkan Ibukota ke Yogyakarta. Dalam rangka ini Mr. Maria Ulfah sebagai Mentri Sosial ikut sibuk bolak-balik ke Jakarta, karena di samping tugas sebagai Mentri, juga bertugas untuk mengurus Ex Degulis dan tawanan-tawanan perang khususnya wanita dan anak-anak.

Pada masa itu pula dalam rangka ikut partisipasinya wanita membantu kaum pria, maka wanita Jakarta tidak mau ketinggalan dan menyumbangkan darma baktinya kepada Negara. Dibentuk Dapur Umum dan membantu Palang Merah Indonesia, dalam rangka partisipasi dalam perang Kemerdekaan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Organisasi Wanita yang ikut pegang peranan dalam perjuangan pada masa itu ialah :

- a. Pemuda Putri Indonesia (PPI) dengan tokoh-tokohnya Ny. Sukartini dan Sumarlien.
- b. Wanita Indonesia (WANI) dipimpin oleh Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ema Jayadiningrat dan lain-lain.

Di samping itu dari Wanita Gas dan Listrik yang dipimpin oleh Lily Sjahrir, Wanita Pelopor, dan dari rumah sakit Perguruan Tinggi (RSPT) yang sekarang disebut Rumah Sakit Umum Pusat, disumbangkan obat-obat dan juru rawat rumah sakit untuk membantu Pejuang kita.

Demikianlah perjuangan Wanita baik langsung maupun tidak langsung telah ikut andil dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dan ternyata telah

menunjukkan partisipasi yang positif berupa kerjasama dengan kaum pria untuk Kemerdekaan bangsa.

3.4 Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara Nica di Daerah DKI Jakarta

3.4.1 Sikap Masyarakat

Tentara pendudukan Sekutu di Indonesia tiba dan mendarat di Indonesia pada bulan September 1945. Dua divisi Australia memasuki Kalimantan dan Indonesia Timur. Kemudian 3 divisi Inggris menduduki Jawa dan Sumatra untuk mengurus 350.000 tentara Jepang dan beberapa ratus ribu interniran Sekutu (C 14. h. 3).

Sesuai dengan Civil Affairs Agreement, sebagai hasil Chequers (Perancis) antara Pemerintahan Belanda dan Inggris, maka panglima Inggris memegang kekuasaan Wilayah Indonesia atas nama Pemerintah Belanda. Tentara Inggris itu tergabung dalam South East Asia Command (SEAC/ Komando Asia Tenggara) yang berkedudukan di Singapura. Adapun tugas Komando Asia Tenggara sesudah Jepang menyerah adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan-penyERAHAN satuan-satuan Jepang dan menjalankan syarat-syarat penyerahan.
- b. Mengamankan dan membebaskan kaum interniran dan tawanan perang Sekutu
- c. Mempertahankan keamanan di daerah kekuasaan Sekutu agar siap untuk diserahkan kembali kepada Pemerintahan masing-masing.
- d. Mengumpulkan keterangan-keterangan dan mengadili penjahat-penjahat perang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas pada tanggal 8 September 1945, dengan 7 orang perwira Inggris yang dipimpin oleh Mayor A.G. Greenhalgh sebagai Allied Mission diterjunkan dari pesawat terbang dan mendarat dengan payung (Parasut) dilapangan terbang Kemayoran. Missi Sekutu ini merupakan pengunjung asing yang pertama-tama berkunjung ke daerah Republik Indonesia. Yang kemudian bermarkas di Hotel Des Indes. Mereka ditugaskan berhubungan dengan Jenderal Mayor Jamaguci dan memberikan

laporan tentang situasi di Indonesia kepada SEAC di Singapura, untuk keperluan pendaratan tentara Inggris di Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 Rear Admiral W.R. Patterson (wakil Panglima SEAC) dengan mempergunakan kapal Perang Cumberland mendarat di Tanjung Priok, dan pada tanggal 29 September 1945 pada jam. 10.00 Letnan Jendral St Philip Christison Panglima Besar AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) mendarat di Jakarta. Panglima ini membawa tiga Divisi yang terdiri dari serdadu-serdadu India, satu divisi (23 rd Indian Division) di tempatkan di daerah Jakarta, satu Divisi (5 th Indian Division) ditempatkan di daerah Surabaya dan satu divisi lagi (26 th Indian Division) ditempatkan di Medan dan Padang untuk daerah Sumatera. Dalam pendaratan itu, Inggris diboncengi Serdadu-serdadu NICA dari orang-orang Belanda.

Akibat pendaratan yang terakhir ini, Pandit Jawaharlal Nehru mengajukan protes keras kepada pihak Inggris, karena serdadu-serdadu berkebangsaan India dipergunakan untuk melaksanakan maksud-maksud Inggris di Indonesia. Akibat protes Nehru tersebut Pemerintah Inggris menyatakan sejelas-jelasnya bahwa tentara Inggris dan India sekali-kali tidak akan mencampuri urusan kekeruhan Politik di Bumi Indonesia.

Jendral Christison kemudian mengeluarkan pernyataannya tentang kebijaksanaannya, segera setelah tiba di Jakarta. Pernyataannya ialah bahwa ia hanya bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan kaum intermiran Sekutu serta menjamin keamanan di tempat-tempat yang diduduki. Untuk melaksanakan tugasnya itu, ia mengharapkan adanya bantuan dari pihak Pemerintah Republik. Badan-badan administrasi Republik yang telah ada, ia akui kenyataannya, keamanan diluar kota-kota Pendudukan Inggris diserahkan kepada Jepang atau Republik. Terserah siapa yang berkuasa. Lebih jauh dinyatakannya, bahwa ia merasa perlu agar dalam tempo yang singkat diadakan perundingan antara Pemimpin-pemimpin Belanda dengan Republik untuk mencapai persesuaian.

Pernyataan Jendral Christison ini segera diprotes Belanda. Duta Besarnya di London telah memprotes Keputusan Kekuasaan Militer Sekutu untuk hanya menduduki Jakarta dan Surabaya saja di pulau

Jawa. Juga Jendral Christison dituduh, mengizinkan Ir. Sukarno untuk memerintah seluruh pantai tanah Jawa dan mempercayakan kepada pasukan dari Kaum Nasionalis untuk mengadakan peraturan dan ketentraman disemua daerah yang tidak diduduki oleh Pasukan Sekutu. Juga Belanda menuduh bahwa Pemerintah Inggris suka mengadakan musyawarah dengan Pergerakan Nasional Indonesia.

Sementara itu Van book tidak tinggal diam, ia mendesak Inggris untuk membasini pemberontakan di Indonesia. Kemudian Pemerintah Belanda telah mengumumkan dengan resmi pada tanggal 1 Oktober 1945 bahwa ia tidak mengenal Republik Indonesia. ia : akan berhubungan dengan Pemimpin-pemimpin Indonesia dan tidak mungkin dengan yang disebut Pemerintah Sukarno-Hatta “Boneka bikinan Jepang” yang harus dihukum karena kooperasi dengan Jepang dianggap penuh sebagai penjahat-penjahat perang.

Dengan protes Belanda itu akhirnya Inggris mundur juga dan mendekati keinginan Belanda. Menteri luar Negeri Inggris pada akhir bulan Novemper 1945 menegaskan, bahwa Inggris hendak membawa ketentraman dan keamanan di Indonesia untuk memudahkan jalannya pembicaraan antara Belanda dan Indonesia guna menyelesaikan soal Indonesia. Hal itu, katanya merupakan kewajiban moril baginya, karena pada waktu itu Belanda tidak mempunyai kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaannya.

Dengan penegasan tersebut dapat dimaksudkan merebut kembali semua peralatan Jepang yang jatuh ke tangan fihak-fihak Republik. Berarti pula akan melucuti barisan-barisan pejuang Nasional yang telah ada. Tentara pendudukan Inggris di Indonesia pada hakekatnya merupakan alat atau unsur-unsur usaha penjajahan kembali Belanda. Sejak semula Belanda belum merasa mampu mengandalkan daya mampunya sendiri.

Jadi dengan kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh tentara kerajaan Belanda mulailah babak baru perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945 yang isinya memaklumkan dibentuknya tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai langkah dan tindakan yang tegas dalam

menghadapi situasi gawat, karena kedatangan tentara Belanda yang kian hari kian merajalela dan membabi buta.

Keadaan di Jakarta menjadi semakin genting karena Belanda yang mendarat di Tanjung Priok, kemudian merayap melebarkan sayap masuk ke pedalaman. Perbuatan mereka semena-mena bahkan berani menghina Pemerintah dan menurunkan bendera Merah Putih. Pendek kata mereka bertindak seolah-olah sebagai Pemerintah yang berhak di Indonesia.

Sikap masyarakat Jakarta tetap bersemangat perjuangan seperti yang telah dibuktikan sebelumnya dalam menghadapi penjajah Jepang. Dalam menghadapi tentara Kolonial Belanda dengan NICA nya masyarakat dan Pemuda-pemuda Jakarta ternyata dapat menunjukkan keberanian dan semangat yang berkobar-kobar.

Daerah Tanjung priok adalah daerah yang pertama kali menjadi ajang pertempuran di Jakarta. Daerah ini di jaga oleh TKR Laut yang dipimpin oleh M. Hasibuan, B. Sitompul, T. Hasibuan, Syamsudin Alwi, Mohtar dan lain-lain. Di daerah Tanjung Priok sebelum tibanya serdadu-serdadu Sekutu dan NICA nya, terlebih dulu sudah dikuasai oleh Republik Indonesia. Orang-orang Jepang sudah dilucuti senjatanya oleh Pejuang-pejuang Kemerdekaan. Sehingga kedatangan, tentara Sekutu di Tanjung Priok, langsung berhadapan dengan Pejuang-pejuang Kemerdekaan itu.

Juga mengenai Markas Besar Jepang di Tanjung Priok, sudah dapat direbut oleh TKR, yang dipimpin oleh Ismail, Slamet, Amirudin Djumadi dan pegawai-pegawai jawatan kereta api. Pemuda-pemuda terus menjaga setasiun dan bersikap sebagai tukang catut, sebenarnya Pemuda-pemuda ini memata-matai gerak Sekutu.

Pada tanggal 12 November 1945, Serdadu-serdadu Belanda (NICA) mulai melakukan teror terhadap rakyat Tanjung priok, dengan jalan mengadakan penculikan-penculikan terhadap beberapa orang yang dianggap mencurigakan. Sasaran yang utama adalah pejuang-pejuang kita. Sjamsudin Alwi selaku Ketua Gabungan Barisan Pelopor ditangkap oleh Sekutu. Tetapi berkat usaha Mr. Wilopo dan Dr Muwardi, akhirnya dapat dikeluarkan dari tahanan. Karena Belanda terus-menerus mengadakan teror, akhirnya banyak pula Pemuda-

pemuda Pejuang yang kena teror. Sekali-sekali aksi teror tersebut dibalas oleh Pemuda-pemuda Pejuang untuk menculik atau melakukan serangan gerilya ke Pos-pos Penjagaan Belanda.

Keadaan di Tanjung Priok semakin panas dan kurang menguntungkan bagi Pertahanan barisan Pejuang seperti Barisan Pelopor, TKR dan lain-lain. Dengan terdesaknya pertahanan kita di garis pantai Jakarta, berarti front pertempuran seluruh Jakarta terbuka, sehingga masyarakat Jakarta harus mulai mengatur siasat perjuangan yang baru.

Sementara itu Gerakan tentara Sekutu terus masuk ke daerah pedalaman melalui Cilincing untuk menduduki Semper, Sukapura, dan Marunda. Sekalipun dalam perjalanan ini mendapat perlawanan penduduk setempat, tetapi Belanda dapat menindas dengan kejam.

Dengan terbukanya Wilayah Jakarta dari serbuan tentara Sekutu, maka roda Pemerintahan Republik Indonesia boleh dikatakan macet sama sekali. Pihak Sekutu mulai berbuat membabi buta dengan membakar Penduduk, menembaki orang-orang yang sedang berjalan, seperti yang terjadi di kampung Pejambon pada 21 November 1945. Pelanggaran keamanan terjadi di mana-mana yakni di Jalan Karet, Dukuh Atas, Gang Tengah, dan Gang Sentiong.

Jadi sejak kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA, bagi masyarakat Jakarta sudah bersikap menolak dan anti kepadanya. Akan tetapi sifat melawan itu hanyalah mengandalkan semangat keberanian dan persenjataan tradisional yang jauh tidak seimbang dengan persenjataan musuh. Dengan mudah seluruh perlawanan rakyat Jakarta itu ditumpas, sehingga banyak yang meninggalkan Jakarta, dan akhirnya Jakarta jatuh ketangan tentara Sekutu.

Sebagai serangan yang bersifat diplomasi yang artinya serangan untuk maksud menarik perhatian Dunia Internasional ialah dilakukan terhadap posisi tentara Inggris yang berkedudukan di Lapangan Terbang Cililitan. Serangan ini pada dasarnya menuntut Instruksi Pemerintah Republik, karena pihak TKR sudah diperintahkan untuk meninggalkan Jakarta. Serangan terjadi pada 1 Januari 1946 dengan tujuan bahwa TKR Jakarta Raya dan Laskar Pejuang masih kuat dan sanggup melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang akan

menindas, terutama menunjukkan bahwa semangat dan tekad rakyat mempertahankan Negara Republik Indonesia masih tetap besar, anti tertindas oleh kekuatan tentara Inggris. Pada hari itu Cililitan telah dikepung oleh beribu-ribu Pemuda Pejuang dan TKR. Banyak di antaranya yang membawa minyak tanah dan bensin untuk memudahkan pelaksanaan bumi hangus. Walaupun tidak terkoordinasi, tiap-tiap pejuang dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik yang tugasnya melakukan pembakaran terhadap sasaran yang dituju, dan menghantam lawan dengan mempergunakan senjatanya memuntahkan peluru langsung ketempat-tempat kedudukan musuh. Korban banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Inilah resiko peperangan.

3.4.2 Akibat-akibatnya

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari kedatangan tentara Sekutu dan NICA di daerah Jakarta ialah :

- a. Timbulnya perlawanan rakyat Jakarta melawan tentara Sekutu dan tentara NICA di seluruh Wilayah Jakarta. Dimana dalam pertempuran ini membuat rakyat Jakarta, bertambah mantap jiwa patriotnya, karena mempunyai Anggung jawab untuk menyelamatkan Ibukota Negara Republik dengan Jakarta sebagai pintu gerbang masuk ke Wilayah Indonesia lainnya.
- b. Dengan makin panasnya Jakarta, yang dimana-mana wilayah terjadi pertempuran-pertempuran antara pejuang-pejuang Nasional melawan tentara Sekutu di mana tidak ada keseimbangan dalam persenjataannya mengakibatkan terdesaknya perlawanan rakyat Jakarta. Sekalipun telah melakukan perlawanan yang gagah berani, akhirnya mundur untuk mengatur kekuatan baru.
- c. Banyaknya korban harta dan jiwa yang cukup besar, tidak membuat rakyat Jakarta patah semangat, melainkan menimbulkan rasa kenasionalan yang mantap, apalagi dengan bergabungnya badan-badan perjuangan dari sifat kesukuan menjadi satu organisasi yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
- d. Dengan datangnya tentara Sekutu dan tentara NICA di daerah Jakarta, membuat macetnya roda Pemerintahan Republik

Indonesia, sehingga Pemerintah Pusat merasa perlu untuk memindahkan Pusat Pemerintahannya ke daerah pedalaman yakni ke Yogyakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

- e. Sekalipun demikian Pemerintah kota Jakarta yang merupakan bagian dari Republik Indonesia masih tetap ada. Walikota Suwiryo yang hanya sebagai bukti bahwa kekuasaan Republik Indonesia di Jakarta tidak musnah sama sekali, terlebih-lebih masih mampu mengadakan perlawanan yang sifatnya diplomasi seperti yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1946 oleh TKR dan Pemuda-pemuda Pejuang dalam melancarkan semangat keposisi tentara tentara Inggris yang terkuat yang berkedudukan di Lapangan Terbang Cililitan.
- f. Membuat sikap masyarakat Jakarta bertambah anti terhadap pejahahan dari manapun juga datangnya.

BAB IV

PERJUANGAN DI DAERAH JAKARTA

4.1 Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I

Masa Pembelaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti sejak itulah Negara Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak terdapat bangsa asing yang ingin tetap mempertahankan kedudukannya, bahkan ada usaha-usaha untuk terus bercokol di Indonesia.

Jakarta yang merupakan tempat pencetus Proklamasi dan pusat administrasi pemerintahan, maka dengan cepat jadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan antara pihak penjajah dengan pihak Republik Indonesia. Insiden Bendera terjadi di mana-mana dan terjadi perebutan Instansi-instansi pemerintahan termasuk alat-alat komunikasinya.

Roda pemerintahan belum dapat berjalan semestinya, sekalipun telah disahkannya Undang-undang Dasar Negara. Presiden dan Wakil Presiden telah dipilih, dan telah di bentuk pula Komite Nasional Indonesia. Melihat situasi yang demikian itu, maka pemuda-pemuda dan rakyat Jakarta tidak puas, sehingga harus dengan segera mengambil alih semua kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan Republik Indonesia. Mulailah disusun barisan pejuang yang

merupakan persatuan untuk mengikat hasrat dari aliran-aliran yang ada diantara Sukami, Wikana, Chairul Saleh dan lain-lain.

Pengikat persatuan mereka ialah :

- a. mengisi Proklamasi.
- b. mempertahankan dan menyempurnakan susunan pemerintah Republik.
- c. menyusun dan menggerakkan seluruh rakyat.

Mereka mulai menyusun Organisasi di Menteng 31 yang diberi nama "Komite Van Aksi" yang dipimpin oleh Sukarni, Maruto Nitimihardjo, Adam Malik, Wikanana, Chairul Saleh, Pandu Kartawiguno, Kusnaini, Darwis, Djohar Nur, Armunanto dan Hanafi.

Di samping Komite ini didirikan pula Barisan Pemuda yang dinamakan API (Angkatan Pemuda Indonesia). Barisan Rakyat Indonesia (BARA) sebagai susunan massa tani dikampung-kampung dan Barisan Buruh Indonesia (BBI), sebagai susunan buruhnya. Ketiga Organisasi ini berada dibawah pimpinan langsung dari Komite Van Aksi.

Rencana pertama adalah merebut alat pengangkutan, mobil dan Kereta api. Pada tanggal 20 Agustus. 1945 dimulai oleh Sudiro dari Barisan Pelopor, dengan melarikan sebuah, mobil merk Buick yakni mobil terbagus waktu itu milik Kepala Departemen Perhubungan. Mobil itu sedang diparkir di Kantor Departemen Perhubungan (sekarang Perhubungan Laut di Jln. Merdeka Timur).

Chairul Saleh juga melarikan mobil yang sedang diparkir di Gambir Timur 9 Jakarta. Mobil-mobil tersebut dipergunakan untuk perjuangan, bahkan mobil dari Sudiro itu diserahkan kepada Presiden Sukarno dan digunakan sebagai mobil Kepresidenan.

Selanjutnya perebutan alat angkutan secara besar-besaran terjadi pada tanggal 3 September 1945 yakni merebut jawatan kereta api, trem listrik, yang ada di seluruh kota Jakarta.

Perebutan ini berjalan dengan lancar, hanya memakan waktu satu hari. Gerakan merebut Jawatan Kereta Api ini di bawah pimpinan Pemuda-pemuda Menteng 31 yang tergabung dalam Komite Van Aksi

yaitu : Djohar Nur, Legiman, Haryono, Arinansjah, Kusnandar, Niman, Kusnaini, Pandu Kartawiguna, Maruto Nititnihardjo, Hasan Gayo dan lain-lain. Ternyata pelaksanaan pengambil alihan Jawatan Kereta Api tersebut tidak mengalami kesulitan, sampai kepada penggantian pimpinan yang pada mulanya dibawah pimpinan orang-orang Jepang, diganti oleh orang-orang Indonesia. Komite Van Aksi menunjuk Sugandi dan Suyatman sebagai pimpinan Jawatan Kereta Api yang baru, dan inipun telah disampaikan dan disetujui oleh Presiden Sukarno. Komite Van Aksi juga menyampaikan bahwa seluruh jaringan Kereta Api di seluruh Jakarta dan Pulau Jawa telah dapat direbut, berkat partisipasi rakyat di daerah-daerah yang mengikuti gerakan di Jakarta. Dengan demikian seluruh jaringan Kereta Api di Pulau Jawa telah menjadi milik Republik Indonesia. Untuk tahap pertama naik Kereta Api ke daerah dari Jakarta ke daerah gratis pulang pergi juga di Pulau Jawa.

Gerakan selanjutnya menduduki Kantor Pos, Telpon, Telegram, di Pasar Baru termasuk Kantor PTT yang paling besar pada waktu itu. Kantor berita Domei dapat diambil alih dan sekaligus diganti namanya menjadi Kantor Berita Antara. Semua gerakan ini boleh dikatakan tidak mendapat perlawanan yang berarti dari pihak Jepang.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komite Van Aksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemuda Menteng 31, Pelajar Cikini 71, Mahasiswa Ika Daigaku Prapatan 10, dan Badan perjuangan Rakyat Jakarta, mulailah menyusun rencana baru, yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan massa rakyat dalam mendukung Pemerintah Republik Indonesia. Rencana baru ini ingin mengerahkan massa rakyat sebanyak mungkin untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Sukarto yang menyuarakan pernyataan pemerintah Republik Indonesia untuk yang pertama kalinya. Pidato ini pun dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan penjajah.

Karena pada masa itu sudah mulai banyak berdatangan orang-orang Inggris yang ditugaskan untuk melihat atau untuk menyelidiki keadaan di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sehingga dengan cara inilah, untuk dapat menunjukkan ke dunia luar bahwa Pemerintah Republik Indonesia didukung oleh rakyatnya.

Komite Van Aksi mengadakan rapat raksasa yang merupakan Show of Force rakyat Jakarta dan sekitarnya yang mewakili semangat rakyat Indonesia seluruhnya. Rapat tersebut berlangsung pada tanggal 19 September 1945 bertempat di lapangan Ikada (sekarang lapangan Monas). Di masa Jepang lapangan Ikada itu digunakan untuk menggembleng semangat rakyat Indonesia dalam mendukung perang Jepang melawan Sekutu, tetapi Jepang dalam mengerahkan massa dengan bennacam-macam cara dan alat untuk menarik perhatian orang banyak. Kemudian menggerakkan pegawai-pegawai kantor anak-anak sekolah, polisi dan sebagainya. Untuk ini Jepang menggunakan waktu yang cukup lama, agar perhatian orang untuk membanjiri lapangan tersebut cukup banyak.

Dalam rapat yang akan diadakan pada tanggal 19 September 1945 itu persediaan ini tidak ada sama sekah bahkan terus menerus mendapat halangan dari Jepang. Dengan bermacam jalan tipuan Jepang berusaha untuk menggagalkan rapat besar ini. Sebab Jepang sudah mengerti, bahwa mengadakan rapat besar pada waktu semangat kemerdekaan meliputi jiwa rakyat, akan dapat membahayakan kedudukan orang-orang Jepang di Jakarta sebagai akibat dari semangat yang sudah meluap-luap itu.

Untuk menggagalkan rapat ini Jepang menggunakan brigade-brigade tank-tank, pertahanan di tiap-tiap sudut dan persimpangan jalan yang hendak menuju lapangan. Jepang menyiarkan kabar dan siaran yang menyatakan rapat besar tidak jadi, diundur dan lain-lain, bahkan dengan pemimpin Jawa Hoobokai diminta untuk mengundurkan atau menggagalkan/ membatalkan rapat besar itu. Gunseikanbu sendiri bertindak, memanggil pemimpin-pemimpin Pemerintah Pusat Republik Indonesia memperingatkan pertanggungjawaban rapat itu. Kabinet Republik Indonesia terpaksa bersidang berjam-jam untuk membicarakan masalah itu. Keputusan dari sidang Kabinet Republik adalah ingin membatalkan maksud rapat besar tersebut. Akhirnya pada pagi hari yakni pada tanggal 19 September 1945 diadakan perundingan antara Komite Van Aksi yang diwakili oleh Adam Malik sebagai Ketua III dari KNI Pusat dapatlah diputuskan bahwa rapat tetap diteruskan dengan sikap yang

teguh, setelah mendengarkan laporan-laporan dan keadaan semangat rakyat yang sesungguhnya.

Pada jam yang telah ditentukan, lapangan telah di padati masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Bung Karno - Hatta dan lain-lain tiba dan dielu-elukan oleh seluruh rakyat yang dilewatinya. Untuk memasuki lapangan itu saja, diperlukan waktu setengah jam. Karena ancaman yang sudah lebih dahulu disampaikan Jepang kepada Republik, maka kedatangan pemimpin-pemimpin itu hanya sebentar saja.

Pidato Bung Karno antara lain :

“Sebenarnya pemerintah Republik Indonesia telah memberi perintah untuk membatalkan rapat ini tapi karena saudara-saudara memaksa; maka saya datang ke sini lengkap dengan menteri-mentri Pemerintah Republik Indonesia. Saya berbicara sekarang sebagai saudaramu Bung Karno, saya minta saudara-saudara tenang dan mengerti akan pimpinan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Percayalah kepada pemerintah Republik Indonesia, kalau saudara memang percaya kepada Pemerintah Indonesia yang akan mempertahankan Proklamasi Kemerdeekaan Indonesia itu, walaupun kami akan robek karenannya, maka berikanlah kepercayaan itu kepada kami dengan tunduk kepada perintah-perintah kami dan disipliner.

Sesudah perintah kami ini marilah kita sekarang pulang semua dengan tenang dan tentram.”.

Rapat berlangsung tidak lebih dari lima menit, walaupun Bung Karno sudah menyuruh bubar dan pulang kepada semua barisan rakyat, mereka dengan teratur keluar dari lapangan masing-masing, berbaris dan demonstrasi terus sepanjang jalan di kota Jakarta sampai malam hari.

Setelah terselenggaranya rapat raksasa di IKADA ini, pihak Jepang mengadakan sikap balasan, yaitu melarang orang menggerombol atau berkumpul. Peraturan darurat melarang memasang bendera Merah Putih. Pada tanggal 20 September 1945 yaitu sehari setelah berlangsungnya rapat raksasa tersebut, Kempeitai

Jepang melakukan penggerebegan dan penangkapan pemuda-pemuda yang bemarkas di Menteng 31. Segala macam yang berhubungan dengan pergerakan perjuangan di beslah seperti bendera, pamflet, semboyan-semboyan, dan senjata yang kedapatan diangkut semuanya. Pemimpin-pemimpin pemuda ditangkap dan dimasukkan ke penjara Bukit Duri. Pemuda-pemuda tersebut antara lain Darwis, Sidik, Hanafi, Aidit, A. Manaf, Roni, Wahidin dan Lukman. Dua hari kemudian menyusul penangkapan Adam Malik oleh Kempeitai di rumahnya dan dimasukkan ke penjara Bukit Duri bersama-sama pemuda yang ditangkap terdahulu.

Sekalipun banyak pemimpin Pemuda yang ditangkap tetapi semangat perlawanan rakyat Jakarta tidak dapat dipadamkan. Barisan perjuangan terus dapat menjalankan fungsinya dan banyak bemarkas di Prapatan 10 dan Kramat Raya 17 (Balai Muslimin Indonesia) yang pada waktu itu sebagai Asrama Sekolah Tinggi Islam. Sebagai pimpinan Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam ini adalah Subiyanto Joyohadikusumo dan Suroto Kunto.

Selanjutnya pada saat tentara Sekutu masuk, kenyataannya banyak membawa serdadu-serdadu Belanda dan pegawai sipil yang terkenal dengan NICA (Netherland Indies Civil Administration). Pada waktu itu barisan-barisan perjuangan banyak yang masuk menjadi Badan Keamanan Rakyat dan banyak melancarkan perlawanan terhadap tentara Sekutu.

Dua hari setelah mendaratnya tentara sekutu di Jakarta, yakni pada tanggal 1 Oktober 1945 Jenderal Christison pemimpin tentara Sekutu di Indonesia mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia. Tanggal 2 Oktober 1945 Letnan Jendral Van Mook datang di Jakarta dan pengakuan Jenderal Christison itu diprotesnya.

Dengan ditariknya tentara Jepang dari Indonesia, maka musuh yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia sudah jelas yaitu Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pada mulanya kedatangan tentara Sekutu tidak dianggap musuh oleh pimpinan perjuangan dan rakyat Jakarta. Tetapi melihat gerak-gerik tentara Sekutu, yang banyak tentara-NICA dalam perbuatannya selalu merugikan Republik Indonesia maka timbullah perkelahian-perkelahian antara orang-orang

Belanda dengan pemuda-pemuda kita. Banyak orang Belanda menunjukkan sikap seperti penguasa dan menghina pihak Pemerintah Republik Indonesia. Jalan-jalan sudah dapat direbut oleh pihak Sekutu dijadikan tempat untuk menyiksa orang-orang Indonesia yang ditangkapi.

Adanya aksi teror Belanda dengan NICA nya itu, menimbulkan kemarahan barisan pejuang rakyat Jakarta untuk bangkit melawan. Pertempuran terjadi pada tanggal 2 Oktober 1945 di dekat Stasiun Senen, sepanjang Jalan Kramat, dan terus meluas sepanjang daerah Kebayoran Lama, Pondok Gede, Klender, dan Jatinegara. Pertempuran di daerah Senen ini, barisan pejuang kita di pimpin oleh Imam Syafei. Pertempuran pertama di dekat Stasiun Senen (Tanah Tinggi) ternyata mempunyai pengaruh yang sangat positif, seolah-olah merupakan Komando untuk menggerakkan rakyat Jakarta melawan tentara NICA .

Riwayat pertempuran Jakarta tidak dapat disusun secara satu rangkaian, karena tidak ada kesatuan pimpinan yang nyata ketika itu baik untuk semua daerah maupun untuk semua pasukan. Sedang jumlah barisan pejuang kelaskaran sangat banyak, dan dalam gerakan-gerakannya ada pelbagai pemimpin yang berdiri sendiri. Perlu dicatat badan-badan yang pada bulan November 1945 mengadakan rapat di Cempaka Putih untuk mempersatukan semua pasukan di bawah satu Komando berupa Laskar yaitu Api - Batak di bawah H. Panggabean, OPI (Oesaha Pemuda Indonesia) di bawah pimpinan Imam Syafei, H. Panggabean, Moh. Sidil, dan K.M. Sitompul; KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) oleh Seleng, Sumilat, Palar, dan Rappar dari pasukan Tanah Tinggi, dipimpin Jansen Panggabean. Pada pertemuan tersebut semua pasukan dilebur ke dalam Laskar Rakyat Jakarta Raya, dan Imam Syafei terpilih sebagai panglima dan Reppar sebagai wakilnya.

Di samping kesatuan Badan Perjuangan tersebut, masih terdapat lagi nama seperti : API - Ambon (Nurul Tanasak, Latuharhary sebagai penasehat), API Siku Gambir (Uken Efendi) API Siku - Jatinegara (Natapradja), API Siku Senen (Zakir). Pasukan Partai Rakyat Jelata dipimpin oleh Harun Al Rasyid dan Abdullah, Pasukan PDR dan lain-lain, di samping pasukan yang telah dibentuk secara resmi seperti

BKR di bawah pimpinan Mufreini Mukmin dan BKR. Laut di bawah pimpinan M. Hasibuan, T. Hasibuan, Edy Martadinata, dan kemudian Barisan Pelopor yang terdiri atas orang-orang tua yang kemudian masuk partai-partai politik.

Pemerintah Republik Indonesia menginsyafi bahwa hanya dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk secara lokal, tidak dapat perlawanan secara sentral sehingga tak akan mungkin dapat menyelesaikan perjuangan. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah, yang menyatakan berdirinya Tentara Nasional.

Sementara itu aksi teror dari gerombolan NICA di Jakarta terus berjalan, perlawanan rakyat terjadi di mana-mana, seperti di Tanjung Priok, yang merupakan sasaran pertama. Pada tanggal 11 Oktober 1945 terjadi pertempuran di daerah Kebayoran Baru, Klender, Cawang, Pondok Gede, dan Pasar Minggu. Pertempuran ini terus ke Gang Kemolong, dan Gang Listrik, di lingkungan Kramat. Walikota Suwito menyerukan kepada seluruh penduduk agar membantu menjaga keamanan dan ketentraman.

Pada tanggal 4 November 1945 rakyat Jakarta dengan semangat meluap-luap melancarkan perjuangan penyerangan terhadap kedudukan serdadu Belanda di Kemayoran. Serangan ini banyak menimbulkan korban, Serdadu Belanda melancarkan serangan balasan kepada serangan rakyat di Jaga Monyet dan Harmoni, beberapa rumah penduduk dan langgar di Petojo Binatu dibakar.

Serangan badan-badan perjuangan menggoyahkan kedudukan tentara Sekutu dan tentara NICA. Balasan dari tentara Sekutu dan tentara nica yang semakin mengganas dan membabi buta, hingga terjadilah pertempuran antara pihak Sekutu dan pihak Republik. Akhirnya keluar Instruksi dari Pemerintah yang ditujukan kepada TKR dan laskar-laskar perjuangan di Jakarta, bahwa pada tanggal 19 November 1945, harus meninggalkan kota Jakarta masuk ke daerah pedalaman.

Meskipun demikian, pada tanggal 28 November 1945, laskar-laskar rakyat yang masih tinggal di Jakarta sempat melakukan perlawanan kepada pihak Sekutu dan NICA di daerah Tanah Tinggi,

Senen, Kramat, Salemba dan Matraman. Kedua belah pihak mengalami korban jiwa akibat pertempuran yang terjadi ini. Serdadu-serdadu Belanda di Batalion X terus menembaki rakyat di sepanjang perjalanan atau jalan Paal Putih, Kramat, Prapatan, Tanah Tinggi, Senen dan mengganggu lalu lintas, sehingga keadaan Jakarta makin bertambah panas dan kacau.

Barisan-barisan perjuangan yang masih tinggal di Jakarta pada waktu itu adalah barisan perjuangan dari Tanah Tinggi di bawah pimpinan Imam Syafei dan barisan perjuangan daerah Jatinegara di bawah pimpinan Haji Darip. Sedangkan pimpinan BKR Jatinegara di bawah pimpinan Sambas Atmadinata, Ramli dan Sumantri.

Adapun kekuatan TKR pada waktu itu terdapat di daerah Jakarta Timur yang dipimpin oleh Moh. Mufreni Mukmin. Ketika Jakarta harus dikosongkan karena politik diplomasi Pemerintah pada tanggal 19 November 1945, TKR Jakarta terbagi atas dua bagian, yang sebagian mengundurkan kedudukannya ke sebelah barat (Tangerang) dipimpin oleh Daan Yahya, Idris, Daan Anwar, dan Singgih. Sebagian lagi terus menuju ke Cikampek dengan enam Batalyon yang berkedudukan di Kerawang (Yon I) Cikarang (Yon II), Cikampek (Yon III), Dawuan (Yon IV), Bekasi (Yon V), dan Cibarusa (Yon VI). Komando pertempuran ditempatkan di Lemah Abang dan daerah pertempuran meliputi daerah-daerah Karawang sampai Kelapa Nunggal.

Dengan politik diplomasi dari Pemerintah pada bulan November 1945 Pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dari pihak Sekutu dan Belanda. Bersamaan dengan itu Pemerintah mengeluarkan pula pernyataan berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tersebut Kabinet Presidensial diganti dengan Kabinet Ministerial, kemudian Pemerintah menunjuk Sutan Sahrir sebagai Perdana Menteri terhitung mulai tanggal 14 November 1945.

Adanya perintah untuk mengosongkan kota Jakarta dari pihak Republik Indonesia kepada TKR dan barisan perjuangan, mengakibatkan berkurangnya kekuatan Republik menghadapi tentara

Sekutu dan tentara NICA (Belanda). Sebaliknya kesempatan ini digunakan oleh pihak Sekutu dan Belanda meluaskan daerah kekuasaan dan tidak sedikit pula tambahan kekuatan tentara Sekutu dan Belanda dikirim ke Indonesia, masuk Jakarta.

Sekalipun demikian di Jakarta, pertempuran tidak dapat padam sama sekali, karena di daerah Tanjung Priok, Cilincing, Kramat, dan Jatinegara, masih terus menerus menjadi tempat pertempuran. Ditambah lagi kekuatan TKR dari daerah Bekasi, Cikampek, Tangerang, sewaktu-waktu masih dapat melancarkan serangannya ke kota Jakarta, yang dapat mengacaukan kedudukan tentara Sekutu dan NICA.

Sementara itu Walikota Suwiryo pada tanggal 13 Desember 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Kota tetap akan ada di Jakarta dan sanggup menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya walaupun ada gangguan dari musuh. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1945, tentara Inggris menduduki Kantor Keresidenan Republik Indonesia di Jakarta Kota.

Pada tanggal 2 Januari 1946 serdadu-serdadu NICA membakar rumah-rumah di Jatinegara, Kemuning, Gang Ambon. Di Jalan Lokomotip, tembak. menembak terjadi di Pisangan Baru dan Pasar Mede. Berhubung, Jakarta dirasa tidak aman, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Pusat Pemerintahan Republik dipindahkan ke Yogyakarta berikut Presiden dan Wakil Presiden.

Menjelang ulang tahun pertama Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pejuang-pejuang wanita Jakarta giat mencari dana untuk mendirikan sebuah tugu peringatan Proklamasi, yang akan didirikan di komplek, gedung Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Usaha mencari dana ini disponsori oleh tokoh wanita bernama Yo Masdani, dan pada tanggal 17 Agustus 1946 berhasil mendirikan tugu tersebut yang diresmikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, dan disaksikan oleh Walikota Jakarta. Pejuang-pejuang wanita dan pelajar-pelajar. Dalam peringatan selanjutnya diadakan api anggun di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tapi Belanda mencegahnya akhirnya terjadi perlawanan sampai terjadi tembakan dan pemuda yang bernama Suprpto gugur dalam perlawanan ini.

Pada tanggal 26 Agustus 1946 Lord Killeam datang di Jakarta, ia bertugas menjadi perantara perdamaian antara persengketaan Indonesia - Belanda. Kemudian pada tanggal 18 September 1946 Komisi Jendral Belanda diketuai Prof. Schermerhorn tiba di Jakarta untuk melaksanakan perundingan. Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 1946 di Jakarta berlangsung persidangan penghentian permusuhan antara Indonesia-Belanda yang diketuai Lord Kiflearn untuk sementara Cease fire dapat disetujui.

4.2 Masa Aksi Militer Belanda I di Jakarta

Untuk mengakhiri peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di Jakarta maupun di luar Jakarta, antara pihak Sekutu Belanda dan pihak Republik terus mengadakan sidang agar terjadi perdamaian. Untuk membahas masalah perdamaian ini, terjadilah gencatan senjata (Cease Fire), dan masing-masing pihak membentuk Panitia Gencatan Senjata. Indonesia mempercayakan Panglima Besar Jendral Sudirman, sebagai anggota, karena itu pada tanggal 1 November 1946 Jendral Sudirman beserta Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Let. Jend. Oerip Soemohardjo, Laksamana Nazir, Komandan Udara Suryadana tiba di Jakarta. Mereka dikawal regu peleton Republik Indonesia bersenjata lengkap di bawah pimpinan Mayor Lukas Kustaryo. Sampai di perbatasan kota Jakarta terjadi insiden, para pengawal Panglima Besar Jendral Sudirman tidak boleh memasuki kota Jakarta dengan bersenjata. Komandan pasukan perbatasan Belanda memerintahkan anak buahnya untuk melucuti senjata-senjata para pengawal-pengawal tersebut. Hal yang demikian tidak diterima oleh Panglima Jendral Sudirman, sehingga rombongan Panglima Besar Jendral Sudirman kembali dan tidak jadi menghadiri sidang di Jakarta.

Kejadian tersebut diprotes oleh Menteri Pertahanan RI, dan akhirnya kedatangan Panglima Besar Jendral Sudirman untuk menghadiri sidang gencatan senjata, diperlakukan secara baik dan dihormati sebagaimana mestinya. Rakyat Jakarta secara spontan menyambut peristiwa itu dengan sangat meriah. Kota Jakarta yang tadinya tidak nampak Bendera Merah Putih pada waktu kedatangan Jendral Sudirman Sang Merah Putih berkibar di mana-mana. Serdadu-

serdadu Inggris yang ditugaskan menjaga jalan-jalan, tak berdaya membendung rakyat agar tidak mendekat kepada Jendral Sudirman. Memang masa rakyat sangat besar jumlahnya. Panitia gencatan senjata ini bekerja sampai tanggal 30 November 1946, tetapi belum menghasilkan keputusan apa pun, sampai terbentuknya Kabinet Sjahrir sidang diteruskan lagi.

Dalam situasi gencatan senjata ini, ternyata tidak digunakan semestinya oleh pihak Sekutu dan NICA. Kesempatan ini memberikan pihak Sekutu dan Belanda, untuk menambah kekuatan mereka dan mengatur siasat baru untuk melemahkan pasukan perjuangan pihak Republik. Hal ini dapat diperkirakan sebelumnya oleh Panglima Besar Sudirman. Maka dalam pidatonya menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembakan-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Pembicaraan masalah gencatan senjata baru dalam tingkat politik dan persetujuan prinsip.

Perundingan dilanjutkan, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir dengan anggota tiga orang yaitu : Mr. Moh. Roem, Dr. Susanto Tirtoprodjo, dan Dr. A.K. Gani. Selain itu disertai anggota-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifudin, Dr. Sudarsono dan Dr. Leimena.

Pokok perundingan adalah program politik, yang terdiri atas :

- a. Berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia, Merdeka 100%.
- b. Mempersiapkan rakyat dan Negara di segala lapangan, politik, Militer, Ekonomi, Sosial untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Pihak Belanda menyusun Komisi Jendral yang ditugaskan untuk berunding dengan Indonesia, dipimpin oleh Prof. Schermerhom. Anggota-anggotanya adalah Max Van Poll, F. de Boer dan H. J. Van Mook.

Perundingan dimulai pada tanggal 7 Oktober 1946 di Jakarta. Dalam perundingan ini Komisi Jendral mengajukan usul-usul yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jika Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat menerima masa peralihan, diusulkan

- a. Agar Republik Indonesia mau menerima kedudukan sebagai negara bagian.
- b. Agar Republik Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban serta benar-benar menguasai keadaan daerah yang dikuasainya.

Hal inilah yang menjadikan sebab untuk sementara perundingan mengalami penundaan. Baru pada tanggal 10 November 1946 perundingan diteruskan di Linggarjati, yang menghasilkan sebuah naskah yang terdiri dari 17 pasal. Naskah ini kemudian diparaf dan kemudian diteruskan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah tersebut antara lain :

- a. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara, berdasarkan federasi, dinamai negara Indonesia Serikat.
- b. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia - Belanda.

Naskah persetujuan Linggarjati ini setelah disampaikan kepada pemerintah, akhirnya banyak menimbulkan pelbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang kontra dan ada yang pro. Terutama dalam kalangan partai-partai politik banyak menimbulkan bahan pembicaraan, dan perbedaan pendapat. Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang berlarut-larut, pemerintah mengambil jalan tengah mengadakan penyempurnaan Komite Nasional Indonesia Pusat dengan menyerukan kepada partai-partai politik besar memilih calonnya dengan jumlah dua kali lipat dari pihak perwakilannya dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil daerah di luar Jawa Madura.

Keanggotaan KNIP yang baur ini dilantik pada tanggal 28 Februari 1947. Akhirnya pemerintah berhasil mendapat dukungan dari KNIP untuk meratifikasikan Persetujuan Linggarjati tersebut, dan pada tanggal 25 Maret 1947 naskah ditandatangani.

Sekalipun naskah Linggarjati sudah ditanda tangani, hubungan Indonesia - Belanda tidak bertambah baik. Masing-masing pihak mengadakan penafsiran beberapa pasal persetujuan, yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Apalagi pihak Belanda telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata, dalam usahanya untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Di kota Jakarta pihak Belanda setapak demi setapak meluaskan kekuasaannya, dengan jalan membentuk badan-badan resmi dan pelbagai usaha lainnya yang bermaksud melenyapkan usaha Pemerintahan Nasional yang berkuasa di kota Jakarta. Masyarakat Jakarta menjadi gelisah karena pihak Belanda sudah bersikap sebagai penguasa dan banyak menimbulkan/memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh penduduk Jakarta.

Pemerintahan rangkap di Jakarta berjalan terus, lepas dari tangan pemerintah Pendudukan Militer Jepang, ke tangan Pemerintah Republik Indonesia, dan kemudian pihak Belanda sudah mulai menyusun pemerintah kolonialnya. Sekalipun demikian, rakyat Jakarta tetap berdiri tegak di belakang pemerintah Republik Indonesia, yang secara langsung dikuasai oleh Walikota Suwiryono, untuk menjalankan Pemerintah Nasional Kotapraja Jakarta. Sampai dengan tanggal 21 Juli 1947 yakni bertepatan dengan Aksi Militer Belanda yang pertama di mana Belanda merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang masih ada di kota Jakarta harus ditumpas. Mereka ditahan di Gang Chasse selama hampir empat bulan, lalu dipindahkan ke Tangerang dan kemudian pada tanggal 21 November 1947 dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Gedung Balai Kota diduduki dengan kekerasan. Seluruh kekuasaan di kota Jakarta kini berada di tangan Belanda. Dengan didudukinya Balai Kota dan ditawannya Walikota, berakhirlah sejarah Pemerintahan Nasional kota Jakarta sebagai penyelenggara otonomi di tengah-tengah kancah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan berakhirlah pula Pemerintahan rangkap di kota Jakarta.

Selanjutnya kota Jakarta jatuh ke tangan pihak penjajah Belanda, dan akan dikembalikan pemerintahan seperti sebelum Perang Dunia II. Tetapi pihak Belanda menginginkan suatu Negara Federal Indonesia dengan Ibukotanya Jakarta. Pihak Belanda melancarkan pengembangan wilayah Ibukota Federal Indonesia, dengan menambahkan wilayah-wilayah sekelilingnya masuk menjadi Wilayah kota Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1948 dengan Staatsblad 1948 No. 178, wilayah Stadsgemeente Batavia, Regentschap Meester Cornelis dan Buitezorg (Bogor) dikeluarkan

dalam kekuasaan Negara Pasundan, untuk dijadikan Ibukota Negara Federal Indonesia. Luas wilayah Ibukota yang direncanakan itu kurang lebih 1800 km persegi, dengan batas-batasnya

- Di sebelah barat : Kali Cisadane (dengan daerah kecil disebelah dekat Tangerang)
- Di sebdah timur : Kali Cilengi dan kali Bekasi (dengan daerah kecil disebelangnya dekat kota Bekasi).
- Di sebelah selatan : Batas-batas sebelah selatan Onderdistrik-onderdistrik Parung, Cibinong dan sebagian dari Citeureup.
- Di sebelah utara : Pulau Seribu termasuk kedalamannya.

Dari rencana wilayah Ibukota Negara Federal Indonesia itu jelas bahwa Belanda mengabaikan sama sekali kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat Jakarta banyak yang tertekan lahir bathinnya, terlebih-lebih adanya politik blokade ekonomi terhadap daerah-daerah pendudukan Belanda di kota Besar termasuk Jakarta. Dalam politik blokade ekonomi tersebut yang menjadi sasaran utama adalah bahan makanan. Bagi rakyat Jakarta yang langsung di bawah kekuasaan Belanda, dengan cepat menderita akibatnya. Banyak warung penjual makanan tutup, toko-toko diawasi dengan ketat, banyak orang kehilangan mata pencaharian.

Keadaan kota Jakarta sejak bulan Mei 1947 disinyalir oleh Menteri-menteri Beel dan Jenkman bersama-sama ahli ekonomi keuangan Hirschfield dan Alberda keadaannya sangat buruk. Meskipun seluruh persediaan emas di Javasche Bank dijual tetap tidak akan tahan sampai akhir tahun, mengingat keadaan keuangan demikian, buruknya, sedangkan kenaikan devisa tidak ada apalagi ditambah dengan adanya Aksi Militer Belanda pertama itu, keadaan perekonomian masyarakat bertambah buruk lagi.

Setelah ada pengumuman pemberhentian Aksi Militer pada tanggal 4 Agustus 1947, negeri Belanda menyatakan bahwa garis Van Mook (garis demarkasi), dan daerah yang diduduki Belanda akan dijamin keamanan dan ketentramannya. Tetapi Belanda akan menjalankan gerakan pembersihan terhadap kekuatan Republik Indonesia. Akibatnya pasukan Republik Indonesia membalasnya

dengan perang Gerilya. Dengan adanya perang gerilya ini, sekalipun kota Jakarta kelihatan tenang tetapi sebenarnya lebih genting, karena banyak terjadi aksi bumi hangus, dan serangan mendadak kepada pos-pos tentara Belanda.

4.3 Masa Aksi Militer Belanda II dan Periode Perang Gerilya

Posisi Belanda di Indonesia semakin sulit, akibat desakan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri keadaan perekonomian Belanda semakin buruk. Untuk memperbaiki keadaan perekonomian tersebut, sebenarnya yang pertama dari aksi militer, yang menurut pembicaraan akan selesai dengan cepat tanpa banyak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu sasaran utama dari aksi militer Belanda yang pertama itu, untuk menguasai daerah-daerah yang banyak menghasilkan pertanian dan minyak bumi yakni di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur dan daerah di luar Jawa yang banyak tambang minyak. Perkiraan Belanda itu melesat, sekalipun pada langkah pertamanya serangan berhasil baik, bahkan tercapai dalam waktu yang pendek dengan menggunakan kurang lebih 75% dari target waktu yang direncanakan. Pada akhirnya setelah mendapat perlawanan dari pihak RI dengan melancarkan serangan balasan secara perang gerilya serta politik bumi hangus, dari sedikit demi sedikit pertahanan Belanda terdesak.

Sementara itu karena desakan dari dunia International-agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata, untuk mengadakan perundingan lagi dengan pihak RI. Pihak Belanda terpaksa mengikuti Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947, aksi militernya dihentikan.

Dengan adanya tindakan Dewan Keamanan PBB itu, pihak RI merasa kuat. Sedangkan perang gerilya terus berlanjut, sebaliknya pihak Belanda juga terus mengadakan pelanggaran gencatan senjata tersebut. Kegiatan membentuk negara-negara bagian terus berjalan, Pada tanggal 26 Agustus 1947 negara Kalimantan Timur sudah dibentuk. Kota Jakarta wilayahnya akan diperluas dan akan keluar dari Negara Pasundan untuk dijadikan Ibu Kota Negara Federal Indonesia.

Pihak Belanda menghendaki “Pertempuran harus dihentikan dulu”, sebelum dibicarakan Naskah politik “Masalah Keamanan dan Politik harus dipecahkan bersama-sama”.

Tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Jasa Baik yang terdiri atas tiga negara kemudian terkenal dengan KTN (Komisi Tiga Negara) yang anggotanya terdiri dari Australia, Belgia dan Amerika Serikat, tiba di Jakarta. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 dilangsungkan perundingan di atas kapal Renville yang kemudian terkenal dengan Persetujuan Renville. Isinya dari pada persetujuan tersebut antara lain :

1. Penghentian tembak-menembak.
2. Daerah-daerah dibelakang garis Van Mook (garis demarkasi harus dikosongkan dari pasukan-pasukan RI.
3. Selama masa perahhan kedaulatan dipegang Belanda.
4. Belanda bebas membentuk Negara-negara bagian didaerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
5. Dalam Uni Indonesia - Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan negeri Belanda.

Dalam usaha Belanda mendirikan negara-negara bagian itu, maka pada tanggal 24 April 1948 oleh pihak Belanda diakui lah berdirinya Negara Pasundan. Dengan adanya Negara Pasundan ini, maka -dengan peraturan termuat dalam Staatsblad 1948 No. 115. Daerah Swatantra Propinsi Jawa Barat dan masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dihapuskan. Akan tetapi penghapusan daerah Swatantra tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya daerah otonom yang tidak ikut dihapuskan, sehingga Stadsgemeente Batavia tidak lagi berada di bawah Propinsi Jawa Barat, melainkan langsung di pusat/tangan Pemerintah Pusat Hindia Belanda.

Selama kota Jakarta berada langsung di tangan Pemerintah Pusat Hindia Belanda, pengawasan keamanan dan ketertiban/ketentraman sangat ketat. Sulit bagi barisan perjuangan melancarkan perlawanan kepada pihak Belanda. Begitu pula tidak ada pos-pos laskar peduangan secara tetap, dan hanya menempati rumah-rumah penduduk yang selalu berpindah-pindah. Sedangkan kekuatan RI yang secara resmi telah dibentuk seperti TRI dari TKR atau BKR dulu bermarkas di

perbatasan Kota Jakarta. Dari daerah perbatasan kota inilah melancarkan perang gerilya masuk ke pusat Pemerintahan Hindia Belanda/pihak Belanda.

Jadi setelah adanya persetujuan Renville kedua belah pihak terus berusaha mendirikan negara. Pihak Belanda, menghendaki negara bagian untuk mewujudkan Indonesia terus mengadakan kegiatan hubungan dengan luar negeri, dan berusaha pula masuk ke dalam Uni Negara Indonesia Serikat.

Pada tanggal 9 Maret 1948, Van Mook mengesahkan Pemerintahan Federal Sementara tanpa Negara RI di dalamnya. Dan Belanda tidak menghendaki RI masuk ke dalam Negara Indonesia Serikat, sebelum membubarkan angkatan perang dan melepaskan hubungan dengan luar negeri, Van Mook terus melancarkan politik *divide et impera*.

Di Jawa Belanda mendirikan Negara-negara Pasundan, distrik Federal Batavia, Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Selatan, Jawa Timur dan Madura. Menteri Luar Negeri D. U. Stikker, seorang yang Realist beranggapan bahwa RI harus tetap ikut ambil bagian dalam Pemerintahan Federal Sementara itu, kalau tidak demikian pasti akan terjadi Aksi Militer II. Di samping itu juga Stikker sangat prihatin, karena aksi gerilya RI makin hebat dan melumpuhkan roda Pemerintahan Belanda di daerah pendudukan serta melemahkan potensi ekonomi Belanda.

Stikker berpendapat bahwa persoalan keamanan tidak mungkin dapat diselesaikan dengan tuntas, tanpa disertai persetujuan politik. Pihak Belanda menuduh bahwa keadaan militer di Jawa semakin buruk, dan jumlah pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan pihak RI semakin meningkat.

Tanpa melalui KTN, Perdana Menteri Moh. Hatta mengadakan perundingan langsung dengan Belanda sebagai saksi. Pada tanggal 27 Nopember 1948 delegasi Belanda datang ke Indonesia, yang terdiri dari Menteri Seberang Lautan Mr. E. M. J. A. Sassen, Menteri Luar Negeri D. U. Stikker dan Wakil Pemerintah Agung Belanda L. Neher. Perundingan dilangsungkan di Kaliurang antara P. M. Moh. Hatta dan

Delegasi Belanda secara langsung tanpa pengawasan KTN. Perundingan tidak berhasil mempertemukan pendapat, karena perselisihan masalah prinsip.

Dengan gagalnya perundingan di Kaliurang tersebut, pihak Indonesia menyampaikan Kota ke KTN mengenai pendirian RI. Pada tanggal 11 Desember 1948 pihak Belanda juga menyampaikan nota ke KTN sebagai pernyataannya, bahkan sebagai penutup dari nota tersebut ditambahkan bahwa perundingan dibawah KTN tidak berfaedah, karena pada hakekatnya RI tidak mau mengakui adanya gencatan senjata dan persetujuan Renville.

Setelah perundingan mengalami jalan buntu, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya terhadap RI di Yogyakarta. Ibukota RI direbut dan diduduki, Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah pembesar Negara kita menyingkir dan ditawan oleh tentara Belanda. Sejak itulah Pemerintah di Indoneisa dibentuk secara darurat dan di bawah pimpinan Menteri Sjafouddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra, sampai dengan pemulihan kedaulatan Republik Indonesia.

Dalam masa aksi militer Belanda II ini, kota Jakarta sepenuhnya dapat dikuasai oleh Belanda. Hal ini dapat dimengerti karena sejak adanya Instruksi Pemerintah tanggal 19 Nopember 1945, Jakarta harus dikosongkan dari pasukan Republik, sehingga pasukan-pasukan TKR terbagi dua bagian, yang sebagian mengundurkan kedudukan ke sebelah barat menuju Tangerang, di bawah pimpinan Daan Yahya, Kemal Idris, Daan Anwar, dan Singgih. Sedang yang sebagian lagi terus menuju ke arah timur yakni ke Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, Dawuan, Cibarusa, dengan komandan pertempuran ditempatkan di Lemah Abang. Kemudian barisan perjuangan kelaskaran ada yang menggabungkan diri dengan TKR tersebut, tetapi ada pula yang masih tetap tinggal di Jakarta dengan melakukan perang gerilya.

Untuk mengonsolidasi kekuatan dan dengan mundurnya pasukan TKR dari kota Jakarta dan dari daerah-daerah pertempuran, daerah Bekasi yang ada di bawah wewenang Komando TKR Resimen V, ditempatkan :

1. Batalyon Mayor Sambas Adinadinata bermarkas di kampung Tugu Bekasi Timur.
2. Batalyon Sadikin, bermarkas dikampung Cabang Cikarang.
3. Batalyon Mayor Katamsi, bermarkas dikampung Bajang Kulur.

Komandan Resimen VI TKR bermarkas di Lemah Abang dibawah pimpinan Letnan Kolonel Mufreini Mukmin.

Jadi jelas bahwa dalam masa aksi militer Belanda pertama maupun Aksi Militer Belanda kedua, kota Jakarta sepenuhnya dapat dikuasai oleh Belanda. Akan tetapi daerah-daerah perbatasan kota Jakarta tetap dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Republik. Dari daerah-daerah perbatasan kota inilah pasukan Republik dapat melancarkan perang gerilya, yang sulit dihadapi oleh pihak Belanda. Makin lama pertahanan Belanda makin terdesak, dan inisiatif menyerang berganti di pihak pasukan Republik.

Untuk pertahanan di Jakarta Timur, selain TNI dan laskar-laskar perjuangan yang ada di daerah itu, dibantu pula oleh TRI Laut di bawah pimpinan Mayor Matmuin Hasibuan, untuk melayani front Marunda Cilincing. Tentara Belanda yang berkedudukan di Warung Jengköl, Pulo Gadung, berhadapan dengan TNI yang dibantu laskar-laskar KRIS, Hisbullah, Pesindo, dan Pasukan Rakyat Jakarta.

Mata-mata Belanda rupanya tahu persis keadaan pasukan Republik, dari kesemua yang ada pada pasukan Republik dilaporkan kepada pihak Belanda. Dengan demikian pihak Belanda dapat mengalirkan kekuatan untuk menghancurkan pertahanan pasukan RI. Aksi militer Belanda II di Jakarta boleh dikatakan sebagian besar kekuatan tentara Belanda ditujukan untuk menghadapi gerakan pasukan Republik yang terdapat di perbatasan kota. Daerah perkampungan Bekasi, seperti Kampung Kandang Sapi, Desa Gapuramuka, perkampungan Penggarutan, Bogor, dan Pemahan Desa Pahlawan Setia (kecamatan Babelan). Dari Tanjung Priok melalui Bojongkaratan (Marunda) dan dari Jakarta lewat Karang Tengah - gardu Cabang, serdadu-serdadu Belanda mengurung daerah-daerah perkampungan itu dengan maksud akan menawan TNI.

Dalam keadaan terkepeung itu, siang hari pesawat-pesawat Belanda menyerang dari udara dengan menembakkan peluru dua belas koma

tujuh kepada penduduk. Penduduk menjadi panik, dan banyak yang ditangkap dan digiring ke kampung Tambun Lobang Buaya dan di tempat inilah mereka ditembak secara kejam tanpa perikemanusiaan. Melihat situasi yang demikian akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat Bekasi. Bersama-sama dengan TRI mengadakan pembalasan menggempur tentara Belanda di Jakarta.

Perlu dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Februari 1948 di Jakarta telah didirikan Gerakan Plebesit Republik Indonesia (GPRI) yang di pimpin Ali Budiardjo SH, gerakan ini berkembang pesat di daerah Bekasi. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk Bekasi banyak pendatang dari Jakarta ketika ada Instruksi untuk mengosongkan kota Jakarta, sehingga separuhnya rakyat Bekasi berdiri di pihak RI.

Dengan adanya GPRI ini, maka kontak dengan pasukan-pasukan gerilya dapat berlangsung lebih teratur. Terlebih-lebih setelah adanya kantong-kantong gerilya keadaannya menjadi sangat kuat, berhubung kantong-kantong gerilya yang besar dan adanya kegiatan-kegiatan melakukan serangan gerilya. Kota Jakarta dapat dikurung akibatnya tentara Belanda tidak dapat bebas bergerak apalagi bila berani ke daerah perbatasan sudah pasti dapat dihabiskan.

Karena tekanan-tekanan makin kuat, akhirnya Belanda menyadari bahwa dengan kekerasan militer, menemui jalan buntu, bahkan makin lama makin menyulitkan kedudukan Belanda, apalagi dibarengi dengan ancaman Amerika Serikat untuk mencabut bantuan Marshal Plan, akhirnya memaksa Belanda untuk menerima Konferensi Meja Bundar (KMB), yang bersumber kepada pengakuan kedaulatan sesuatu Negara Indonesia terhadap wilayah bekas Hindia Belanda.

4.4 Interaksi di Daerah Jakarta dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional.

Maklumat Pemerintah No. X, Peristiwa 3 Juli 1946, dan Pernberontakan PKI. 1948.

Dalam pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut

Undang-undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Mohamad Hatta mengeluarkan sebuah Maklumat yang bernomor K dan karena itu dikenal sebagai Maklumat No. K. Isi Maklumat itu ialah :

1. Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya MPR, dan DPR, disertai Kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (22, h. 249)

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan guna mendirikan satu Partai tunggal bernama Partai Nasional Indonesid. Akan tetapi usaha untuk mendirikan partai ini kemudian dibatalkan, khawatir Atas usul Badan Pekeda Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 3 Nopember 1945, Pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai-Partai Politik. Tindakan Pemerintah RI terhadap pihak Sekutu dan Tentara NICA selanjutnya adalah dengan menempuh langkah-langkah diplomasi. Antara Pimpinan-Pimpinan Pemerintah R.I. banyak mengadakan pendekatan dengan pihak Sekutu dan Belanda.

Situasi di Jakarta pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 benar-benar membingungkan. Dari luar diancam oleh pihak Sekutu dan NICA, sedang dari dalam diancam oleh Pergolakan Politik dari Golongan yang pada dasarnya tidak setuju dengan Politik Diplomasi Pemerintah. Karena Jakarta terus dirongrong oleh pihak Sekutu, yang menjurus ke arah pertempuran fisik yang lebih besar, maka Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memindahkan Pusat Pemerintahannya ke Yogyakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Pemindahan Pusat Pemerintahan itu dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1946.

Sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 itu, berdirilah Partai-partai politik. Pertama kali Masyumi

tanggal 7 Nopember 1945, kemudian disusul Serikat Rakyat Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) tanggal 29 Januari 1946. Sedang sebelumnya telah berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 21 Oktober 1945 di bawah pimpinan M. Yusuf, Partai Indonesia tanggal 1 Nopember 1945 yang disusul oleh Partai Rakyat Indonesia (PARAS) yang keduanya pada tanggal 17 Desember 1945 berfungsi menjadi Partai Sosialis. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) pada tanggal 22 November 1945 dan Partai buruh Indonesia, Nopember 1945 (22, h. 250).

Partai-partai tersebut kemudian melancarkan perjuangan Politik. Memang dalam Maklumat Pemerintah tersebut telah dijanjikan untuk segera mengadakan Pemilihan Umum, yang akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tetapi mengingat situasi yang belum memungkinkan, karena pada masa itu tentara Sekutu dan tentara NICA telah mengadakan gerakan-gerakan yang banyak merugikan pihak Republik Indonesia. Sehingga keadaan Republik Indonesia menjadi kacau Ibukota RI yang masa itu masih berada di Jakarta, ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Keadaan Jakarta sudah mulai tidak aman, akhirnya pada tanggal 19 November 1945 terpaksa harus dikosongkan dari Pasukan Republik, Pemerintahan RI macet. Jadi jelas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak mungkin sama sekali.

Sejak dipindahkannya Ibukota Negara itu, di Jakarta tidak banyak mengalami Pergolakan Politik, tetapi beralih pula ke Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk meneruskan Pemerintahan Jakarta dipegang oleh Walikota Suwiryo, yang pada masa itu terus mendapat gangguan dua pihak, yaitu Sekutu dan Tentara Belanda. Di kota Jakarta, terjadi Pemerintahan rangkap satu pihak di tangan Republik, dan di pihak lain di tangan Sekutu.

Untuk selanjutnya terjadinya Pergolakan Politik dalam Negeri seperti Peristiwa 3 Juli 1946 dan juga terjadinya Pemberontakan PKI 1948, untuk kota Jakarta boleh dikatakan tidak mengalami secara fisik, karena sejak kepindahan Ibukota Negara ke Yogyakarta tanggal

4 Januari 1946 tersebut di atas, hampir seluruh Wilayah kota Jakarta berada dalam kekuasaan pihak Sekutu sampai dengan pemilihan Kedaulatan Republik Indonesia.

Sebagai partisipasi rakyat Jakarta, untuk membantu Pemerintah dalam menumpas Pemberontakan PKI tersebut, maka banyak Pemuda Jakarta yang dikirim ke Madiun, di antaranya Pemuda bernama Itjang dan 17 anak buahnya gugur, dalam rangka penumpasan Pemberontakan PKI Madiun, sewaktu ia beristirahat di daerah sekitar Wonogiri, di rumah lurah yang ternyata lurah tersebut adalah kaki tangan PKI.

4.5 Perjuangan Masyarakat Jakarta selama Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik)

Kota Jakarta merupakan Pusat pergolakan politik, pusat pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Di dalam peranannya Jakarta sebagai Kota Perjuangan yakni sebagai tempat teretusnya Pergerakan Nasional, Ikrar Pemuda dan pencetus Proklamasi. Dengan peranan Kota Jakarta yang sangat besar itu, maka saat Indonesia telah terhindar dari belenggu penjajahan tidak mustahil apabila Jakarta tetap menjadi rebutan dari pihak Penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Sebelum Kota Jakarta jatuh ke tangan pihak Belanda, sebagai Walikota Jakarta adalah Suwiryo, yang menjalankan Pemerintahan daerah mengikuti Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Untuk sementara masih mengikuti aturan-aturan tata Pemerintahan seperti masa pendudukan Militer Jepang. Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Kota Jakarta, maka Badan Legislatif maupun Eksekutif dipegang langsung oleh Walikota Jakarta Suwiryo, di samping memegang pula pimpinan atas Korps Pamongpraja dan Kepolisian di Kota Jakarta.

Mengenai susunan aparatur kepegawaian Pemerintah Nasional Kota Jakarta, terdiri dari pelbagai Jawatan. Menjelang berakhirnya Pemerintahan Nasional itu, masih didapati susunan Organisasi Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- I. Jawatan Sekretariat meliputi :
 1. Sekretariat
 2. Bagian Urusan Pegawai
 3. Bagian Perbaikan Gedung Balai Agung
 4. Bagian Penerangan
 5. Bagian Mobil-mobil
 6. Bagian Pajak
 7. Bagian Urusan Surat-surat
 8. Bagian Arsip
 9. Bagian Kamar Ketik
 10. Bagian Pengiriman Surat-surat.
- II. Jawatan Tata Keuangan terdiri dari :
 1. Bagian Perhitungan Keuangan
 2. Bagian Keuangan Negeri
 3. Bagian Alat-alat
 4. Bagian Pemeriksaan Bendahara
 5. Bagian Urusan Tanah
 6. Bagian Urusan Air
 7. Bagian Bendahara.
- III. Jawatan Pamong Praja
 1. Pusat Pamong Praja
 2. Pamong Praja Daerah-daerah.
- IV. Jawatan Pengajaran dan Pendidikan.
- V. Jawatan Kesehatan Kota.
- VI. Jawatan Kesehatan Kehewan.
- VII. Jawatan Tehnik.
- VIII. Jawatan Ekonomi.
- IX. Jawatan Sosial.

Mengenai banyaknya Pegawai, semuanya termasuk Pamong-pamong berjumlah 1410 orang.

Kemudian kota Jakarta jatuh ke tangan pihak Belanda kembali, sejak adanya Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, maka

Pemerintahan Kota Jakarta diatur menurut aturan seperti sebelum terjadi Perang Dunia II. Sejak bulan Maret 1948, penyelenggaraan Pimpinan Umum Pemerintahan daerah Stadsgemeente Batavia berada di tangan Residen Hoofdijdelijke Pestuursdienst Batavia yang pada waktu itu dijabat oleh Mr. M. A. F. Swoger, sedang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehari-hari dilakukan oleh Asisten Kota yang dijabat, oleh R. Th. Praaning (nama aslinya : Prawira Adiningrat). Pada tanggal 25 Agustus 1948 ditetapkan untuk menyelenggarakan Stadsgemeente Batavia ialah :

1. Stadsbestuursraad (Majelis Pemerintahan Kota Jakarta).
2. College Van Dagelijkebestuur (Badan Pemerintah Harian).
3. Burgemeester (27, h 123).

Kemudian dalam bidang Sosial Ekonomi Belanda mengadakan blokade Ekonomi terutama dalam bidang makanan, sehingga mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam mencari mata pencaharian. Banyak penduduk meninggalkan Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan di luar Jakarta.

Dalam bidang Sosial Budaya, Belanda sangat ketat sekali mengawasi masyarakat Jakarta, sehingga dalam bidang ini pun tidak dapat berkembang. Bahkan ada usaha pihak Belanda memasukkan kebudayaan Barat ke Kota Jakarta. Sekalipun demikian kebudayaan asli Jakarta tidak lenyap, sepertinya Topeng Betawi, tari ondel-ondel, dan kesenian tradisional khas Jakarta, lainnya. Buktinya sekarang masih dapat kita lihat betapa banyaknya organisasi-organisasi Kesenian Tradisional khas Jakarta.

Dalam bidang pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Agama dan kepercayaan, Belanda berusaha untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah Belanda seperti sebelum Perang Dunia II, tetapi untuk ini belum dapat berjalan karena masih adanya Perang Gerilya dari pihak Republik Indonesia. Sementara itu untuk kepercayaan, bahwa masyarakat Jakarta bertambah kuat terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana mayoritas penduduk Jakarta memeluk Agama Islam. Bahkan dengan menggunakan keyakinan agama tersebut, untuk melawan bangsa Belanda yang pada masa itu disamakan dengan orang-orang kafir.

Dalam bidang Kepemudaan, karena sebagian besar Pemuda Jakarta ikut dalam perjuangan, bersama-sama TRI maupun barisan-balisan perjuangan maka dalam kegiatan kepemudaan di Jakarta tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Kegiatan dan kehidupan kewanitaan selama perang Kemerdekaan yang lebih menonjol adalah bahwa kaum wanitapun juga mendirikan perkumpulan wanita bersama Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dan Perkumpulan Putri Wanita Indonesia. Tokoh-tokoh wanita pada waktu itu ialah Lasmiyah, Jo Masdani, Lily Sutanto, S.K. Trimurti dan sebagainya.

Sedang Pers yang pada waktu itu masih dapat terbit adalah Merdeka di bawah pimpinan B.M. Diah, ini pun tidak bebas karena diawasi dengan ketat. Pers yang terbit pada masa Agresi Mihter Belanda di Jakarta dimonopoli oleh surat kabar Kolonial Belanda yang hanya memberitakan untuk kepentingan pihak Belanda. Tetapi bagi masyarakat Jakarta, masih ada pula yang menikmati Pers berbahasa Indonesia, hanya penerbitannya bukan di Jakarta seperti Berita Indonesia, Pelita Rakyat, Kedaulatan Rakyat dan lian-lain.

BAB V.

KEADAAN DI DAERAH JAKARTA MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

5.1 Masa Menjelang Persetujuan KMB

Dengan adanya petunjuk dari Dewan Keamanan dan adanya pendekatan politik antara pihak RI dan Belanda maka pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan RI-Belanda. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi Republik di bawah pimpinan Mr. Moh. Izoozin sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen, dengan anggota-anggotanya : Mr. N.S. Blom, Mr. Ais. Jacob, Dr. J.J. Van Der Velde dan empat orang penasehat.

Masalah pokok yang dibicarakan dalam perundingan ialah tuntutan RI agar pihak Belanda menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, dan pengakuan terhadap status RI yang mempunyai daerah kekuasaan tertentu. Karena perundingan berjalan lambat, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 14 April 1949 Drs. Moh. Hatta datang ke Jakarta untuk memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Sebaliknya pihak Belanda juga memberikan hal yang semacam itu kepada delegasi Indonesia. Dalam memberikan

penjelasan ini termasuk perundingan informal karena tidak dalam pengawasan Komisi PBB. Pada dasarnya pihak Belanda telah setuju tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta, dengan syarat harus dibarengi dengan perintah penghentian perang Gerilya. Sebagai kelanjutan dari perundingan Roem Royen itu pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara RI, BFC dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB, yang dipimpin oleh Critchley. Dalam perundingan ini dibahas masalah yang sama seperti perundingan Roem Royen, bahkan lebih luas lagi. Di antaranya diusulkan Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag. Setelah para pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta, maka perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi pada tanggal 19--22 Juli 1949 antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi Antar - Indonesia.

Dalam Konferensi ini dibicarakan masalah politik *divide et impera* Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia. Konferensi ini mengalami kegagalan, kemudian pada tanggal 30 Juli 1949 dilanjutkan lagi di Jakarta, membahas masalah pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Akhirnya kedua belah pihak setuju membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB) Delegasi Indonesia di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan delegasi BFO di bawah pengawasan Komisi PBB, yang dipimpin oleh Critchley, dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai, dan baru selesai pada tanggal 2 Nopember 1949. Upacara penanda-tanganan Naskah diadakan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland.

Bersamaan dengan itu di Jakarta diadakan upacara bersama-sama membubuhkan tanda-tangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.h.J. Lovink pada naskah Pengakuan Kedaulatan.

Bagi masyarakat Jakarta pada masa menjelang persetujuan KMB, tetap dalam keadaan tertekan, karena pihak Belanda masih terus melancarkan aksi militernya untuk menghadapi perang gerilya yang dilancarkan oleh pasukan-pasukan TNI. Hal ini sejalan dengan sikap

Panglima Besar Angkatan Perang Jendral Soedirman, yang pada tanggal 1 Mei 1949 memberikan amanatnya berupa peringatan kepada para Komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah seperti Linggarjati, Renville dan lain-lain, perundingan atau persetujuan dengan Belanda selalu merugikan perjuangan. Jadi berpegang pada amanat Panglima Angkatan Perang tersebut, maka barisan perjuangan di Jakarta bersama-sama TNI yang kebanyakan masih bermarkas di daerah perbatasan kota seperti di daerah Bekasi, Tangerang dari lain-lain, tetap melancarkan perang gerilya menekan pertahanan Belanda. Pada saat-saat demikian Belanda sulit ke luar daerah Jakarta untuk kontak dengan pertahanannya di tempat lain seperti Bogor, Bandung dan sebagainya.

Para pemuda Jakarta yang terdiri dari berbagai suku dapat bersatu menggalang satu kekuatan yang besar guna menunjukkan kepada pihak lawan bahwa mereka tidak sudi lagi dijajah. Persatuan pemuda ini lebih kuat lagi setelah adanya Konperensi Antar - Indonesia di Jakarta tanggal 30 Juli 1949, yang benar-benar dapat mewujudkan kesatuan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Persatuan sedemikian itu sebenarnya telah dirintis sejak timbulnya Persatuan Rakyat Jakarta, terdiri dari berbagai-bagai barisan perjuangan seperti API - Ambon, API - Batak, API - Jatinegara, API - Gambir, API - Senen, Hizbulm, KRIS, OPI, dan sebagainya. Jadi menjelang akan diadakan persetujuan KMB tersebut, pasukan Republik yang ada di Jakarta dan diperbatasan kota selalu dalam keadaan siap, sambil memperhatikan perkembangan politik diplomasi yang sedang ditempuh oleh kedua belah pihak. Akhirnya setelah mendengar bahwa para pemimpin pemerintah R.I. yang ditahan telah dikembalikan ke Yogyakarta, dan telah ditanda tangani pengakuan kedaulatan RI dari pihak Belanda, barulah percaya, bahwa perundingan akan dapat menyelesaikan pertikaian antara Indonesia - Belanda.

5.2 Sikap Masyarakat Terhadap Konperensi Antar Indonesia

Sejak Van Mook melancarkan politik divide et impera dengan cara mendirikan negara-negara bagian yang akan digabungkan menjadi

negara Federal Indonesia, maka sejak itu pula masyarakat Jakarta sudah bangkit menentanginya. Usaha Van Mook untuk memecah belah persatuan rakyat Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian itu, telah dijawab oleh pemuda-pemuda dan rakyat Jakarta dengan mendirikan Persatuan Rakyat Jakarta yang di bawah pimpinan Imam Syafe'i. Persatuan Rakyat Jakarta tersebut terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa di dalamnya. Sekali pun pada masa aksi militer ke satu dan Aksi Militer ke dua sepenuhnya hampir dapat disebut oleh Belanda, namun bagi masyarakat Jakarta tidak dapat berubah pendiriannya melainkan tetap berdiri di pihak Republik. Hal ini dapat dimengerti karena pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berada di Jakarta, sehingga sudah selayaknya rakyat Jakarta tetap mempertahankan kemerdekaan itu.

Keteguhan hati Rakyat Jakarta untuk mempertahankan kemerdekaan, sebenarnya secara fisik sudah dimulai sejak tanggal 3 September 1945 melancarkan perebutan Jawatan Kereta Api dan alat-alat komunikasi lainnya tangan Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan adanya rapat raksasa di Ikada tanggal 19 September 1945. Jadi jelas rakyat Jakarta dari jauh sebelumnya telah menghendaki adanya Kemerdekaan Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh Nusantara seperti jaman kerajaan Majapahit dahulu. Akan tetapi-mengingat penjajahan Belanda dan kemudian Jepang yang banyak mengalami penderitaan lahir dan batin adalah penduduk yang berada di wilayah Hindia Belanda, maka pengertian Nusantara bagi masyarakat Jakarta adalah Wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke.

Kemudian wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke itu, akan dipecah oleh politik *divide et Impera* Belanda dengan arsiteknya adalah Van Mook, ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Meskipun pada mulanya memang seolah-olah Van Mook berhasil dalam usahanya itu, karena kepandaian Belanda dalam memberikan janji-janji palsu, tetapi akhirnya rakyat di negara-negara tersebut sadar bahwa dirinya terisolasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan sehingga cepat-cepat memalingkan pandangannya untuk kembali masuk kedalam warga masyarakat Indonesia. Ini terjadi menjelang akan dilangsungkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Cepat-

cepat mereka mengadakan Konperensi Antar Indonesia untuk membahas status mereka nanti dalam Konperensi Meja Bundar. Kebetulan Konperensi tersebut dapat dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 akan berhasil membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan tertib sebelum dan sesudah Konperensi Meja Bundar. Ini dapat dimengerti mengapa Konperensi tersebut dapat berhasil baik dalam sidangnya di Jakarta. Tidak lain karena Jakarta sejak lama merupakan tempat perpaduan antar suku bangsa di Indonesia ini, sehingga masyarakat Jakarta ikut membantu sepenuhnya akan penyelenggaraan Konperensi Antar Indonesia tersebut.

Ini semua bukan terjadi secara kebetulan, melainkan memang sudah menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia sejak timbulnya pergerakan nasional. bahwa cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita nasional. Dengan timbulnya kesadaran Nasional untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, dapat dilanjutkan dalam Konperensi Antar Indonesia itu. Tidak mustahil bahwa rakyat di negara-negara bagian sangat mengharapkan untuk bergabung menjadi negara kesatuan Indonesia yang bebas dari cengkraman bangsa Asing.

Untuk menunjukkan realisasi persatuan Nasional itu tercermin susunan Panitia Persiapan Nasional yang menjadi delegasi Indonesia dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar di Den Haag, yang akan dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1949 nanti. Susunan delegasi Indonesia tersebut ialah : Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T. B. Simatupang, Mr. Sumardi. Sedang dari delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak.

Walaupun demikian, bagi masyarakat Jakarta masih harus menjalankan kesiap-siagaan, untuk menjaga apabila sampai perundingan KMB tersebut menemui jalan buntu. Jadi kesiap-siapan ini terus tetap berjalan karena masyarakat Jakarta, tidak dapat melepaskan pengalaman perundingan dengan sebelumnya, yang terus menerus merugikan pihak Indonesia, sekalipun ada perintah untuk menghentikan perang gerilya, tetapi kesiap-siagaan tersebut tetap dijaga.

Komando-komando tempur dari Barisan Perjuangan Jakarta seperti Imam Syafe'i, Haji Darip, terus mengadakan kontak dengan TNI yang kebanyakan masih berada siap tempur di markasnya masing-masing di daerah perbatasan kota. Inipun juga dalam rangka kesiapan siagaan apabila perundingan mendapat jalan buntu. Jadi jelaslah bahwa sikap masyarakat Jakarta terhadap Konperensi Antar Indonesia sangat mendukung kearah tercapainya cita-cita nasional, dan tetap mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

5.3 Sikap Masyarakat Jakarta Terhadap Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan itu terjadi dengan jalan mengubah Konstitusi RIS sehingga struktur Negara Republik Indonesia yang menurut Konstitusi tersebut berbentuk federal, kini berubah menjadi unitaristis. Perubahan Konstitusi RIS itu dilakukan dengan undang-undang RIS 1950 no. 7 dalam mana sekaligus dimuat naskah selengkapnyanya dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Kesatuan itu.

Menjelang terbentuknya Negara Kesatuan itu maka wilayah-wilayah negara-negara bagian yang dibubarkan oleh Presiden RIS dan kemudian digabungkan kepada negara bagian Republik Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut dikenal dengan sebutan **daerah pilihan**.

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsunglah pemilihan Kedaulatan Indonesia dari tangan Kerajaan Belanda kepada Bangsa Indonesia. Pada hari yang sama itu berdirilah Republik Indonesia Serikat sebagai suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Dengan berdirinya negara Federal Indonesia yang Pemerintahnya menurut pasal 68 ayat 3 dari Konstitusi RIS berkedudukan di Ibukota Jakarta, maka Gewest Batavia en Ommelanden merupakan suatu Distrik Federal yang masuk negara bagian Pasundan.

Pada masa Aksi Militer Belanda II, dan pihak Belanda terus melancarkan politik *divide et impera*, maka Belanda mengangkat seorang Indonesia untuk menjadi Walikota Jakarta. Orang Indonesia itu bernama Mr. Sastromulyono..., ini dalam usaha Van Mook untuk menciptakan Negara Federal Indonesia. Untuk menghapuskan semua yang masih berhubungan dengan negara yang akan diciptakan Van Mook tersebut, dari sedikit demi sedikit dibuang terutama yang akan mempengaruhi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi RIS belum dapat merubah keseluruhan Undang-undang yang diciptakan oleh Belanda di Indonesia. Maka selama tidak ada pencabutan/perubahan oleh RIS aturan-aturan hukum yang masih ada tetap berlaku. Dengan demikian maka *Stadsgemeente* Batavia sebagai suatu daerah swantara di dalam lingkungan wilayah distrik Federal Jakarta tetap berlangsung menurut peraturan perundangan desentralisasi.

Pemerintah daerah Jakarta sejak permulaan Maret 1950 dijalankan oleh seorang pejabat tunggal. Pada waktu itu jabatan walikota Jakarta masih tetap dipegang oleh Mr. Sastromuljono (hak/ pengangkatan Belanda). Pemerintah tunggal tersebut di atas tidak berlangsung lama, karena Kementrian Dalam Negeri RIS telah melakukan usaha-usaha untuk membentuk suatu majelis yang baru. Akhirnya berhasillah dibentuk sebuah Panitia Pembaharuan Majelis Pemerintah Kota Jakarta yang terdiri dari tujuh orang yaitu Suwiryo, sebagai ketuanya dan dengan dibantu oleh anggota-anggota yaitu: Supranoto, Mr. Suyono, Mr., Yusuf Wibisono, Syamsuddin Saat, Mr. St. Alisjahbana dan B. R. Motik. Panitia tersebut terkenal dengan Panitia Tujuh. Panitia ini diberi tugas untuk membentuk Majelis Kota Jakarta, yang akan duduk terdiri dari wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan aliran-aliran lainnya yang dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat Kota Jakarta dewasa ini.

Terbentuknya Majelis Kota Jakarta yang telah disahkan sebagai anggota-anggota Majelis Pemerintah Kota Jakarta yang baru sejak tanggal 9 Maret 1950, oleh Presiden Republik Indonesia diputuskan untuk mencabut pemerintah tunggal Kota Jakarta, terhitung tanggal 11 Maret 1950 diangkatlah 25 orang menjadi anggota Dewan Perwakilan Kota sementara dari kota praja Jakarta. Pada waktu

dilakukan usaha-usaha membentuk Majelis, Pemerintahan Kota Jakarta yang Baru, oleh Partai Persatuan Marhaen Indonesia dengan disokong oleh 55 organisasi lainnya telah dikemukakan sebuah usul yang isinya mendesak kepada pemerintahan RIS agar memperbaharui. Juga jabatan yang hingga saat itu masih dipegang oleh pejabat yang diangkat pada masa pemerintahan Pre Federal (Mr. Sastromuljono). Ternyata usul itu diterima oleh semua organisasi yang hadir dalam pemilihan. Demikian berdasarkan desakan yang diajukan oleh organisasi-organisasi itu, maka oleh Presiden Republik Indonesia Serikat dengan surat keputusan tanggal 23 Maret 1950 no: 479 diangkatlah Suwiryo menjadi walikota Jakarta lagi mengganti Mr. Sastromuljono yang diangkat oleh Belanda tersebut. Selanjutnya walikota Jakarta itu menjalankan tugas pemerintahan daerah ibukota Jakarta dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri RIS. Dan sebutan untuk Ibukota Jakarta mulai akhir bulan Maret 1950 ditetapkan dengan nama "Kotapraja Jakarta Raya".

Menjelang akhirnya RIS, oleh Negara Indonesia Timur sebagai suatu negara Bagian, maka pada tanggal 15 Juni 1950 ditetapkan suatu undang-undang pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur berlaku untuk lingkungan wilayahnya yaitu Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Demikianlah akhirnya bentuk negara Federasi diubah menjadi negara Kesatuan yang meliputi seluruh Indonesia seperti yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi jelaslah bahwa sikap masyarakat Jakarta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada bedanya dengan sikap rakyat Jakarta untuk mencetuskan Kemerdekaan Indonesia yakni tetap menghendaki adanya keutuhan Tanah Air Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah suatu negara bentukan baru, melainkan merupakan lanjutan dari pada Negara Republik Indonesia Serikat yang diubah bentuknya dari suatu federasi menjadi berbentuk kesatuan.

Kemudian untuk kota Jakarta, dalam hubungannya dengan kota-kota lainnya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kotapraja Jakarta Raya selain mempunyai derajat yang setingkat lebih atas dari pada Kota Besar berdasarkan Undang-undang 1948 no: 22 juga memiliki suatu kelainan tersendiri, yaitu swatantra,

ini merupakan satu-satunya daerah yang memakai sebutan “Kotapraja”.

Dengan demikian bagi rakyat Jakarta, merupakan suatu beban yang berat dengan ditunjuknya Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia, yang akan terus mengatur jalannya administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian masyarakat Jakarta tetap berdiri tegak sampai berhasilnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yakni menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

5.4 Kegiatan Masyarakat pada Berbagai Bidang Kehidupan

Telah dijelaskan bahwa kota Jakarta di samping peranannya sebagai ibu kota negara sejak jaman kolonial Belanda, juga berperan sebagai daerah pantai yang letaknya sangat strategis, dalam hubungan pelayanan internasional dari dulu sampai sekarang.

Mengingat Jakarta, berperan sebagai tersebut di atas sudah pasti terjadi berbagai macam peradaban berpadu di kota Jakarta, sehingga peradaban masyarakat Jakarta merupakan bentuk peradaban internasional. Akan tetapi unsur-unsur kebudayaan Jakarta asli sudah demikian kuatnya, maka tidak menjadi musnah dengan masuknya kebudayaan dari luar Jakarta, bahkan terjadi akulturasi yang saling isi mengisi sehingga menambah kesempurnaan kebudayaan Jakarta asli.

Begitu pula pada waktu menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik), Jakarta tetap dapat memainkan peranannya sebagai kota perjuangan, kota budaya dan pusat percaturan politik. Dengan demikian dalam segi ekonomi, kota Jakarta tetap mempunyai pengaruh besar dalam lingkungan wilayah sekitarnya.

Dalam aksi militer Belanda yang terkenal dengan kekejaman dan kekerasannya, sampai dapat menimbulkan kegelisahan penduduk Jakarta, dan tidak sedikit penduduk Jakarta yang lari meninggalkan Jakarta untuk mencari nafkah di luar kota Jakarta. Terlebih-lebih dengan adanya blokade ekonomi Belanda yang menjadi sasaran adalah bahan makanan yang dikuasai oleh Belanda. Akibatnya dengan terpaksa penduduk Jakarta mendatangkan beras dari luar Jakarta untuk

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dikota. Ini pun dengan sangat sulit dibawa ke Jakarta, karena di jalan-jalan selalu ada pemeriksaan oleh serdadu-serdadu Belanda. Tidak sedikit beras penduduk yang disita, dan orangnya ditangkap oleh serdadu Belanda dijadikan tawanan perang.

Belanda selalu curiga terhadap penduduk Jakarta, dan dianggapnya selalu bekerja sama dengan pasukan Republik yang bermarkas di luar kota Jakarta. Oleh karena itu dalam bidang sosial ekonomi, keadaan penduduk Jakarta sangat menyedihkan.

Kemudian dalam bidang sosial budaya Belanda berusaha memasukan kebudayaan Barat ke Indonesia, khususnya kota Jakarta, agar penduduk Jakarta mau membantu Belanda dalam perangnya merebut kekuasaan di Indonesia. Maka sekolah-sekolah sudah mulai dirintis baik negeri maupun swasta.

Sekolah-sekolah ciptaan Jepang ditutup dan diganti dengan sekolah-sekolah sistim Barat. Tetapi ini pun belum dapat berjalan dengan baik karena pihak RI dan Belanda, masih terus terjadi peperangan. Sebaliknya bagi masyarakat Jakarta, sudah mulai mengadakan gerakan untuk menghidupkan kembali kesenian, dan pendidikan di Jakarta. Terlebih-lebih setelah kedua pihak antara Indonesia - Belanda, mulai mengadakan politik diplomasi untuk mengakhiri pertikaian antara Indonesia - Belanda. Sekalipun belum menggunakan gedung-gedung yang permanen tetapi usaha kearah itu sudah mulai dirintis.

Adapun dalam bidang agama dan kepercayaan, bagi masyarakat Jakarta yang terdiri dari berbagai suku bangsa maka juga terdapat beraneka agama yang dipeluknya. Akan tetapi mayoritas penduduk Jakarta memeluk agama Islam, dan dari kepercayaan yang ada padanya, banyak digunakan untuk menghadapi Belanda. Misalnya perkumpulan pemuda-pemuda Islam perkumpulan pemuda-pemuda Kristen dan sebagainya. Bahkan timbul pasukan-pasukan Islam seperti : Hisbullah, Sabilillah, dan sebagainya. Pasukan-pasukan ini beranggapan berperang melawan Belanda, sama dengan berperang melawan bangsa kafir. Ini suatu cara untuk memenangkan perjuangan dan mendapatkan pengaruh. Dalam Bidang Kewanitaan, sekalipun

tidak banyak wanita-wanita terlibat pertempuran secara langsung, namun peranan wanita dalam Revolusi Fisik tidak kecil. Banyak wanita yang menceburkan dirinya dalam bidang Palang Merah, Dapur Umum dan dalam sosial untuk mendidik anak-anak yang terlantar. Tokoh-tokoh wanita seperti : S. K. Trimurti, Maria Ulfah, Jo Masdani, LasLily Sutanto dan lain-lain sangat besar dalam usahanya membantu perjuangan dalam revolusi kemerdekaan. Bahkan banyak pula yang menceburkan diri dalam bidang politik dan laskar perjuangan. Seperti Laskar Wanita Indonesia, Perkumpulan Puteri Indonesia dan sebagainya.

5.5 Pelaksanaan Hasil KMB di Daerah Jakarta

Bersamaan waktunya dalam penanda tanganan naskah pengakuan kedaulatan di Netherland pada tanggal 27 Desember 1949, maka di Jakarta juga dilangsungkan upacara bersama antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda membubuhkan tanda tangannya pada naskah Pengakuan Kedaulatan dari tangan Belanda ke tangan Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinasi Angkatan Perang RI sedangkan A. H. J. Lovink sebagai Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan

Belanda melaksanakan Penanda tanganan tersebut di atas. Pada hari yang sama itu berdirilah Republik Indonesia Serikat sebagai suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk Federal. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Pusat tentang perkembangan-perkembangan ketata negaraan yang baru, maka didaerah Kota Jakarta juga terjadi perubahan-perubahan susunan aparatur pemerintahan. Dengan berdirinya Negara Federal Indonesia pada akhir tahun 1949 belumlah berarti hubungan-hubungan ke tata negaraan di Indonesia menjadi tetap, karena kemudian ternyata bahwa bentuk federasi bukanlah suatu bentuk negara yang di hendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Sehingga dalam bulan-bulan pertama dari, tahun 1950 di beberapa negara bagian terjadi pergolakan-pergolakan yang menuntut dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan dibentuknya suatu Negara Republik Indonesia Kesatuan. Berhubung dengan terjadinya

perubahan terhadap status Wilayah Jawa Barat sebagai akibat dari pembubaran negara Pasundan itu, maka terhadap kedudukan Wilayah yang merupakan Distrik Federal itu serta pula terhadap kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah Swatantra maupun sebagai Lingkungan Wilayah yang langsung dikuasai oleh alat-alat perlengkapan RIS diadakan peninjauan seperlunya untuk kemudian diatur kembali.

Sebagai tindakan yang pertama maka oleh Presiden RIS dengan keputusannya tanggal 24 Maret 1950 no.,125, ditentukanlah lingkungan Wilayah yang baru dari daerah Ibu Kota Jakarta yaitu Wilayah Ibukota itu diperluas dengan Wilayah-wilayah sekelilingnya yang berbatasan, sehingga lingkungannya menjadi :

1. Kotapraja Jakarta.
2. Pulau Seribu.
3. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Jakarta, yaitu :
 - a. Sebagian dari Distrik Tangerang Ilir, yaitu Onderdistrik Cengkareng.
 - b. Sebagian dari Distrik Kebayoran, yaitu Wilayah yang meliputi Onderdistrik Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir, dan Kebayoran Udik.
 - c. Sebagian dari Distrik Kramat Jati, yaitu Onderdistrik Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Pasar Rebo.
 - d. Sebagian dari Distrik Bekasi, yaitu Wilayah yang meliputi Onderdistrik Pulo Gadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing (Desa Cilincing dan Desa Semper).

Sedang Wilayah-wilayah lainnya dari Distrik Federal, Jakarta yang tidak diambil untuk memperluas Ibukota itu, seperti distric Tangerang Udik, Distrik Depok dan lain-lainnya, semuanya dikembalikan untuk selanjutnya diurus oleh Negara Republik Indonesia yang akan diatur tersendiri.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 1950 Gubernur Distrik Federal meletakkan Jabatannya, dan menyerahkan kekuasaan Pemerintah Kepada Wali Kota Jakarta Suwiryo, yang berhubungan dengan lingkungan Wilayah Ibukota yang baru itu.

Sebagai tindak lanjut dari Pemerintah R.I.S. maka pada tanggal 13 Mei 1950 ditetapkanlah Undang-undang darurat no: 20 yang berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1950. Undang-undang dinamakan Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya mengatur hal ikhwal Pemerintahan atas Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 Konstitusi R.I.S.. Dalam Undang-undang Federal itu sekaligus diatur pula kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah yang mengurus Rumah Tangganya sendiri, yang sejak beberapa waktu yang lalu juga berada dalam peninjauan Pemerintah R.I.S.

BAB VI

PENUTUP

Setelah dicoba menguraikan pokok-pokok permasalahan seperti tersebut diatas, maka akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah benar-benar hasil perjuangan bangsa Indonesia atas usahanya sendiri tanpa ada campur tangan bangsa asing.
2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, terutama disponsori oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, pemuda-pemuda dan PETA yang benar-benar tebal rasa kenasionalannya.
3. Rapat Raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan Show of Force rakyat Jakarta yang mempunyai arti besar dalam usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dan sekaligus menunjukkan kesetiakawanan rakyat pada Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan yang masih banyak rongrongan dari pihak penjajah.
4. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak dapat ditentukan oleh satu cara,

akan tetapi dapat ditempuh dengan berbagai cara yaitu dengan perjuangan fisik dan diplomasi.

5. Pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki adanya persatuan dan kesatuan atas dasar persamaan tujuan yakni bebas dari tekanan lahir batinnya yang berarti tidak mau ditindas oleh penjajah manapun juga. Oleh karena itu usaha memecah belah dari Belanda dengan politik *divide et impera* nya dapat digagalkan, bahkan akhirnya berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Terpilihnya kembali kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena berbagai aspek. Di antara aspek yang sangat menentukan adalah letak Jakarta yang sangat strategis dan mempunyai daerah pantai yang tidak begitu besar ombaknya, serta tanahnya yang datar dan luas-mudah dikembangkan menurut kebutuhan sarana perkotaan dan aman dari bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan sebagainya.

Daftar Pustaka

A Buku-buku

1. Adam Malik, *Riwayat Proklamaasi 17 Agustus 1945*, Wijaya, Jakarta, 1975.
2. Baksan, Oemar” *Catatan Ringkas tentang PETA dan Peristiwa Rengasdengklok*, Jakarta, 1955.
3. Dimiyati, Mohammad, *Sejarah Perjuangan Indonesia*, Wijaya, Jakarta, 1961.
4. Dinas Sejarah Militer Kodam V Jaya, *Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang dan Bekasi dalam menegakkan Kemerdekaan RI*, Wingsari, Jakarta, 1975.
5. Hatta, Mohammad, *Sekitar Proklamasi*, Tinta Mas, Jakarta 1970.
6. -----*Peranan Pemuda Menuntut Indonesia Merdeka, Indonesia Adil dan Makmur*. Angkasa, Bandung, 1966.
7. Iwa Kusuma Sumantri, Prof., SH., *Sejarah Revolusi Indonesia*, Jilid Pertama, Grafica, Jakarta, 1963.
8. Koch, D. M. G., *Menuju kemerdekaan, Sejarah Pergerakan Kebangsaan indonesia sampai tahun 1942*, Pembangunan Jakarta, 1951.
9. Kementrian Penerangan R. I., *Kotapraja Jakarta Raya*, Jakarta, 1952.

10. Kertapati, Sidik, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembaharuan*, Jakarta.1964.
11. Mardanas Safwan, *Peranan Gedung Menteng 31 dalam Perjuangan Kemerdekaan*, DMS, Jakarta 1973
12. Nugroho Notokusanto, *Latar Belakang Pembentukan Tentara PETA*, Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970.
13. Nasution, A.II. Dr. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. "Proklamasi"*, Jilid I, Disjarah AD, Angkasa, Bandung, 1977.
14. ----- *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia "Diplomasi atau Bertempur"*, Jilid II, Disjarah AD, Angkasa, Bandung 1977.
15. ----- *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia "Diplomasi sambil Bertempur"*, Jilid III, Disjarah AD, Angkasa, Bandung 1977.
16. Oey Hong Lee., *Naga dan Tikus, Kisah Perang Tiongkok Jepang (7 Juli 1937 - 2 September 1945)*, PT. Lucky, Jakarta, 1959.
17. Pringgodigdo, A.G., "*Berdirinya Negara Republik Indonesia*", *Pewarta*, No. 8 - 12, tahun ke XI 196 1.
18. Pringgodigdo, A. K., Mr., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1964.
19. Prawiroatmodjo, Soehoed, Kolonel TNI, *Perlawanan Bersenjata terhadap Fasisme Jepang*, Merdeka Press, Jakarta 1953.
20. Radik Utoyo Sudiryo, *Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945 - 1949*, Alda, Jakarta, 1977.
21. Ruslan Abdul Gani, H., *Asia Tenggara dalam Sinar Apinya Hari Pahlawan Indonesia*, Departemen Penerangan RI., Jakarta, 1953.
22. Sartono Kartodirdjo, Dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI PT. Grafitas, Jakarta 1976.
23. Sihombing, ODP, Drs., *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962.
24. Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*, Idayu, Jakarta, 1975.

25. Subardjo, Djojoadisurjo, SH., *Lahirnya Republik Indonesia*, PT. Kinta, Jakarta 1962.
26. Suroto, Drs., *Indonesia ditengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad*, jilid 1, II, Jambatan, Jakarta, 1961.
27. The Liang Gie, *Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta, Kotapraja Jakarta Raya*, Jakarta 1958.

B. HARIAN/MAJALAH

28. *Asia Raya*, 28 Desember 2602 (1942).
29. *Asia Raya*, 24 April 2603 (1943).
30. *Asia Raya* 19 maret 2604 (1944).
- 31., *Asia Baroe*, 11, Sukabumi, TH. I -- 8, 2604 (1944).
32. *Djawa Baroe*, No. 7, tahun 2605 (1945).
33. *Kan Po*, No. 1, Jakarta, tahun ke 1, bulan 8 -- 2602.
34. *Kan Po*, No. 3, Jakarta, tahun ke 1, bulan 9 -- 2602.
35. *Kan Po*, No. 5, Jakarta, tahun ke 1, bulan 10 -- 2602.
36. *Kan Po*, No. 8, Jakarta, tahun ke 1, bulan 12 -- 2602.
37. *Kan Po*, No. 10, Jakarta, tahun ke 11, bulan I -- 2603.
38. *Kin Po*, No. 16, Jakarta, tahun ke 11, bulan 4 -- 2603.
39. *Kan Po*, No. 2 1, Jakarta. tahun ke 11, bulan II -- 2603.
40. *Kan Po*, No. 43, Jakarta, tahun ke 111, bulan 5 -- 2605.
41. *Pandji Poestaka*, No. 2, 11 April 2602 (1942).
42. *Pandji Poestaka*, No. 2, 1 November 2603 (1943).
43. *Peratoeran-peratoeranDjawa Hokookai*, Jakatal 2604.
44. *Sinar Matahari II*, Jakarta, 30 Desember 2603 (1943).
45. *Soeara MIAI*, tahun I, 2603 (AD 1943, Jakarta, 1943).
46. *Soeara Asia*, Jakarta, II Djuh 2602 (1942).

C. HASIL WAWANCARA/CERAMAH.

47. *Ibu Fatmawati*, (Eks. Pejuang '45 Jakarta), rekaman kembali wawancara tanggal 14 Agustus 1974, di Jalan Cilandak No. 5 Jakarta.
48. *Bapak Hasan Gayo*, (Eks Pemuda Menteng 3 1) hasil ceramah tanggal 31 Maret 1978 di Gedung Joeang '45 Jakarta.

49. *Bapak Imam Sjafei*, (Eks Komandan Tempur Pejuang Senen Siku), hasil ceramah tanggal 15 Oktober 1979 di Gelanggang Remaja, Planet Senen, Jakarta.
50. *Bapak Kusnandar*, (Eks Pemuda Menteng 3 1), rekaman kembali wawancara tanggal 17 Oktober 1977, di Gedung Sumpah Pemuda Jakarta.
51. *Bapak Karim Halim*; (Eks Sekolah Tinggi Islam Masa Jepang) hasil ceramah tanggal 11 September 1978 di Gedung Joang '45 Jakarta.
52. *Bapak Kasimo, L. J.* (Eks Pejuang '45 Jakarta), hasil ceramah tanggal 19 Agustus 1974 di Gedung Joang '45 Jakarta.
53. *Bapak Mufreini Mukmin*, (Eks Komandan BKR Jakarta), rekaman kembali wawancara tanggal 12- 8 - 1974 di Kantor Pemugaran DKI Jakarta.
54. *Ibu Tri Murti, Dra.* (Eks. Pejuang '45 Jakarta), rekaman kembali wawancara tanggal 18 Juni 1977, di Kramat Lontar Jakarta.
55. *Bapak Subadio, Ahmad, Prof.* (Eks Pejuang '45 Jakarta), rekaman kembali wawancara tanggal 4 Agustus 1976 dikediamannya Jl. Cikini Raya No. 82 Jakarta.
56. *Bapak Singgih, Drs.* (Eks Shodanco PETA Daidan Jakarta), rekaman kembali ceramah tanggal 2 September 1975, didepan DPRD. Krawang. Jakarta.
57. *Bapak Subeno* (Eks Shodanco PETA Cudan Rengasdengklok), rekaman kembali wawancara tanggal 9 Agustus 1974 di Rengasdengklok.
58. *Bapak Sudiro*, (Eks Pimpinan Barisan Pelopor), hasil ceramah tanggal 23 Juli 1978.
59. *Ibu Asia Ulfah Subadio, S. H.* (Eks Pejuang '45 Jakarta), hasil ceramah tanggal 21 April 1978 di Gedung Joang '45 Jakarta.

